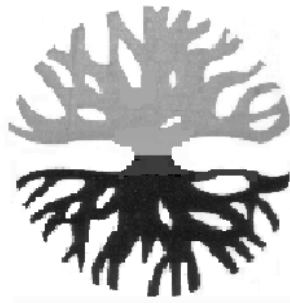




LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2007



Diterbitkan : Desember 2007





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT



BUPATI PASAMAN

KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah yang Maha Kuasa, kami menyambut baik dengan terbitnya laporan "**Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007**". Laporan ini merangkum permasalahan lingkungan dan upaya pemecahannya oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang lestari dan terjaga.

Dengan terbitnya laporan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman dan semua pihak yang turut membantu sehingga dapat diterbitkannya laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007.

Demikianlah semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terima kasih.

Lubuk Sikaping, Desember 2007



BUPATI PASAMAN

YUSUF LUBIS

KATA PENGANTAR

Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan. Sesuai dengan Agenda 21 tentang Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan telah mengekspresikan bahwa secara global sangat penting meningkatkan pemahaman terhadap keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta resultan sebab akibatnya. Kenyataan ini menggarisbawahi pentingnya laporan pengelolaan lingkungan hidup disusun baik pada tingkat lokal/ daerah, nasional, regional maupun global.

Infomasi tentang lingkungan hidup di daerah perlu disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan bagi publik, serta sarana keterlibatan publik dalam ikut berperan menentukan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam menginformasikan lingkungan hidup di daerah tersebut terdapat dua hal yang perlu disampaikan yaitu kondisi lingkungan hidup beserta analisis dan



kecenderungannya serta data tahunan berkala tentang lingkungan hidup, baik primer dan sekunder.

Kepala Dinas lingkungan Hidup, Kebersihan
dan Pertamanan
Kabupaten Pasaman

Drs. H. DESWAR HARDANI, MM
NIP. 010 081 589



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii



DAFTAR TABEL

SUMBER DAYA ALAM

Halaman



Tabel 3.1	:	Luas Hutan Menurut Fungsi / Lahan	SDA	-	1
Tabel 3.2	:	Perincian Luas Lahan Menurut Penggunaanya	SDA	-	1
Tabel 3.3	:	Kawasan Hutan yang Rusak Perkecamatan di Kabupaten Pasaman	SDA	-	2
Tabel 3.4	:	Luas dan Perkiraan Produksi Pertambangan Golongan C	SDA	-	2
Tabel 3.5	:	Luas Lahan Kritis	SDA	-	3
Tabel 3.6	:	Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Lahan (GNRHL) Kabupaten Pasaman	SDA	-	4
Tabel 3.7	:	Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi	SDA	-	6
Tabel 3.7	:	Rencana dan realisasi Kegiatan penghijauan	SDA	-	6
Tabel 3.8	:	Jenis – jenis Tumbuhan di Kabupaten Pasaman	SDA	-	7
Tabel 3.9	:	Nama Burung/ Fauna yang Dilindungi di Kabupaten Pasaman	SDA	-	9
Tabel 3.10	:	Mamalia di Kabupaten Pasaman	SDA	-	12
Tabel 3.11	:	Reptilia di Kabupaten Pasaman	SDA	-	13
Tabel 3.12	:	Luas Areal Hutan Kesepakatan Berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan di Kabupaten Pasaman	SDA	-	14
Tabel 3.13	:	Luas Areal Hutan Kesepakatan Berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan di Kabupaten Pasaman Tahun 2006 /2007	SDA	-	15
Tabel 3.16	:	Jenis Kerusakan hutan di Kecamatan Tigo Nagari	SDA	-	18
Tabel 3.17	:	Jenis Kerusakan hutan di Kecamatan Bonjol	SDA	-	19



Tabel 3.18	:	Jenis Kerusakan hutan di Kecamatan Panti	SDA	-	22
Tabel 3.19	:	Jenis Kerusakan hutan di Kecamatan Rao	SDA	-	23
Tabel 3.20	:	Jenis Kerusakan Hutan di kecamatan M apat Tunggul	SDA	-	25
Tabel 3.21	:	Jenis Kerusakan Hutan di kecamatan M apat Tunggul Selatan	SDA	-	26
Tabel 3.22	:	Luas dan Penyebaran Kelas Lereng	SDA	-	27
Tabel 3.23	:	Luas dan Jenis tanah	SDA	-	28
Tabel 3.24	:	Luas Lahan Kering M enurut Penggunaannya	SDA	-	29
Tabel 3.25	:	Nama-nama Sungai dan Wilayah yang dilalui di Kabupaten Pasaman	SDA	-	30
Tabel 3.26	:	Debit A liran Air dari bebera pa Sungai Terbesar	SDA	-	34
Tabel 3.27a	:	Sumber Air baku dan Produksi Air Bersih PDAM	SDA	-	41
Tabel 3.27b	:	Distribusi Air Bersih PDAM menurut jenis Pelanggan ...	SDA	-	41
Tabel 3.27c	:	Manfaat Air Tanah Berdasarkan Jenis kegiatan	SDA	-	41
Tabel 3.28	:	Data Hujan Harian Tahun 2006	SDA	-	42
Tabel 3.29	:	Kualitas Air Hujan	SDA	-	43
Tabel 3.30	:	Kualitas Udara Ambien	SDA	-	44
Tabel 3.31	:	Kualitas Udara Ambien	SDA	-	45
Tabel 3.32	:	Kondisi Iklim	SDA	-	46
Tabel 3.33	:	Mamalia di Kabupaten Pasaman	SDA	-	47
Tabel 3.34	:	Reptilia di kabupaten Pasaman	SDA	-	48
Tabel 3.35	:	Lokasi Rawan bencana Pada tahun 2007	SDA	-	49
Tabel 3.36	:	Tabel Nama Sungai Rawan Banjir Pada tahun 2007 di kabupaten Pasaman	SDA	-	52
Tabel 3.37	:	Lakasi Rawan Bencana Longsor / Gerakan Tanah di Kabupaten Pasaman	SDA	-	53



SUMBER DAYA BUATAN



Tabel 3.1.a	: Hasil Analisa Kualitas Air Tanah	SDB	-	1
Tabel 3.1.b	: Hasil Analisa Kualitas Air Tanah	SDB	-	2
Tabel 3.1.c	: Hasil Analisa Kualitas Air Tanah	SDB	-	3
Tabel 3.2.a	: Hasil Analisa Kualitas Air Limbah	SDB	-	4
Tabel 3.2.b	: Hasil Analisa Kualitas Air Limbah	SDB	-	5
Tabel 3.3	: Pemantauan Kualitas Air	SDB	-	6
Tabel 3.4	: Pemantauan Kualitas Air Tanah	SDB	-	9
Tabel 3.5	: Volume Air	SDB	-	12
Tabel 3.6	: Daftar Sumur Pantau	SDB	-	12
Tabel 3.7	: Banyak Pelanggan dan pemakaian Air menurut Lokasi	SDB	-	13
Tabel 3.8	: Banyak Rumah Tangga Tanpa Septic Tank	SDB	-	13
Tabel 3.9	: Banyak Pupuk dan Pestisida yang digunakan di Kolam	SDB	-	14
Tabel 3.10	: Banyak Pupuk dan Pestisida yang digunakan di Tambak	SDB	-	14
Tabel 3.11	: Banyak Pupuk dan Pestisida yang digunakan di Sawah	SDB	-	14
Tabel 3.12	: Banyak Rumah Tangga Bertempat Tinggal di bantaran /Tepi Sunagi	SDB	-	15
Tabel 3.13	: Jumlah Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar yang di Gunakan	SDB	-	15
Tabel 3.14	: Daftar Industri Penghasil Limbah B3	SDB	-	15
Tabel 3.15	: Pengelolaan Sampah	SDB	-	16
Tabel 3.16	: Jumlah Sampah dan Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Pasaman	SDB	-	17
Tabel 3.17	: Produk Hukum terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup	SDB	-	18
Tabel 3.18	: Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	SDB	-	18
Tabel 3.19	: Jumlah pengunjung/ Kedatangan Wisatawan Objek Wisata di Kabupaten Pasaman per tahun	SDB	-	19
Tabel 3.20	: Jumlah Hotel/Penginapan dikawasan Bahari	SDB	-	19
Tabel 3.21	: Ketersediaan Hotel/ Penginapan di Kabupaten Pasaman per Tahun	SDB	-	19
Tabel 3.22	: Indeks Harga PDRB Kabupaten Pasaman menurut			



Lapangan Usaha (2005 - 2007) SDB - 20



Tabel 3.23	: Indeks Berantai PDRB Kabupaten Pasaman Atas dasar Harga Konstan(Laju Pertumbuhan Ekonomi	SDB	-	21
Tabel 3.24	: Potensi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pasaman Tahun 2007	SDB	-	22
Tabel 3.25	: Luas Tanam, Luas Panen Dan Produksi Padi Per Kecamatan Tahun 2006	SDB	-	23
Tabel 3.26	: Luas Sawah Menurut jenis Pengairan di Kabupaten Pasaman	SDB	-	24
Tabel 3.27	: Luas Panen (Ha) Sayur-sayuran di Kab.Pasaman	SDB	-	25
Tabel 3.28	: Luas Panen dan Produksi Palawija di Kab. Pasaman ..	SDB	-	26
Tabel 3.29	: Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Pasaman	SDB	-	27
Tabel 3.30	: Luas Tanaman Pekebunan Menurut Jenis Taman	SDB	-	28
Tabel 3.31	: Luas tanaman Kopi dan Kakao yang di serang Hama Keadaan Bulan Juli 2006 s/d Juli 2007	SDB	-	29
Tabel 3.32	: Luas Tanaman Karet yang di serang Hama	SDB	-	30
Tabel 3.33	: Produksi Telur dan Daging dari Ternak Unggas di Kabupaten Pasaman	SDB	-	31
Tabel 3.34	: Sarana Pemotongan Hewan Pada Kecamatan di Kabupaten Pasaman	SDB	-	32
Tabel 3.35	: Banyak Ternak, Jumlah pemotongan dan Produksi Daging Menurut Jenis ternak	SDB	-	32
Tabel 3.36	: Banyaknya Unggas /Jumlah Pemotongan dan Produksi Menurut Jenis Unggas	SDB	-	33
Tabel 3.37	: Jumlah dan Jenis Temak pada Kecamatan di Kabupaten Pasaman	SDB	-	34
Tabel 3.38	: Jumlah Rumah tangga Pemeliharaan Temak Berdasarkan Jenis Temak Pada Kecamatan di Kabupaten Pasaman	SDB	-	35
Tabel 3.39	: Luas Areal Budidaya Ikan Perairan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman	SDB	-	36
Tabel 3.40	: Luas Lahan Perikanan Kabupaten Pasaman per			



	Kecamatan	SDB	-	37
Tabel 3.41	: Data Jumlah Petani Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pasaman	SDB	-	38
Tabel 3.42	: Data Alat Tangkap Ikan Kabupaten Pasaman	SDB	-	39
Tabel 3.43	: Produksi Ikan Budidaya menurut Kecamatan	SDB	-	40
Tabel 3.43	: Banyak Populasi dan Produksi Ikan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pasaman	SDB	-	41
Tabel 3.44	: Produksi Ikan di Perairan Umum tahun 2007	SDB	-	42
Tabel 3.45a	: Pemantauan Emisi Industri Besi dan Baja	SDB	-	43
Tabel 3.45b	: Pemantauan Emisi Pulp dan Kertas	SDB	-	44
Tabel 3.45c	: Pemantauan Emisi Pembangkit Listrik tenaga Uap ...	SDB	-	44
Tabel 3.45d	: Pemantauan Emisi Industri Semen	SDB	-	45
Tabel 3.45e	: Pemantauan Emisi Industri Bukan Logam	SDB	-	45
Tabel 3.45f	: Pemantauan Emisi Industri Logam	SDB	-	45
Tabel 3.46	: Luas Pengusahaan Hutan Tanaman Industri	SDB	-	47
Tabel 3.47	: Pemantauan Kualitas Air Laut	SDB	-	47
Tabel 3.48a	: Luas Tutupan Turumbu Karang	SDB	-	49
Tabel 3.48b	: Presentase Kerusakan Padang Lamun	SDB	-	49
Tabel 3.48c	: Presentase Kerusakan Padang Lamun	SDB	-	49
Tabel 3.49	: Kependudukan di Laut dan Pesisir	SDB	-	50
Tabel 3.50	: Budidaya Laut dan Pesisir	SDB	-	50
Tabel 3.51	: Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Bahari	SDB	-	50
Tabel 3.52	: Abrasi dan Reklamasi	SDB	-	50
Tabel 3.53	: Hasil Analisa Kualitas Limbah Cair Hotel di Kawasan Wisata Bahari	SDB	-	51

SUMBER DAYA MANUSIA



Tabel 3.1	:	Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman	SDM	-	1
Tabel 3.2	:	Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman 2006	SDM	-	2
Tabel 3.3	:	Tingkat Kematian Bayi Per - 1000 Kelahiran di Kabupaten Pasaman	SDM	-	3
Tabel 3.4	:	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhannya Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pasaman	SDM	-	4
Tabel 3.5	:	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan	SDM	-	5
Tabel 3.6	:	Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kab . Pasaman	SDM	-	6



Tabel 3.7	: Jumlah Penduduk Luas Daerah dan Fasilitas Kesehatan	SDM	-	7
Tabel 3.8	: 10 jenis penyakit Dominan di Kab. Pasaman	SDM	-	8
Tabel 3.9	: Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman	SDM	-	9
Tabel 3.10	: Rasio Jumlah tenaga Dokter dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasaman	SDM	-	10
Tabel 3.11	: Rasio Jumlah Tenaga perawat, Bidan dan Perawat Bidan dengan Jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman	SDM	-	11
Tabel 3.12	: Banyaknya Penderita Penyakit	SDM	-	12
Tabel 3.13	: Perkembangan banyaknya Sarana Kesehatan di Kabupaten Pasaman	SDM	-	13
Tabel 3.14	: Jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah serta jenis kelamin	SDM	-	14
Tabel 3.15	: Jumlah penduduk, Luas Daerah kepadatan dan Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan	SDM	-	15
Tabel 3.16	: Persentase Penduduk yang Berumur 10 tahun ke Atas Berdasarkan Jenis kegiatan dan jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman	SDM	-	16
Tabel 3.17	: Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pasaman	SDM	-	17
Tabel 3.18	: Jumlah Penduduk Luas daerah dan tenaga Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman	SDM	-	18
Tabel 3.19	: Jumlah Personil Menurut Tingkat pendidikan	SDM	-	19



KK KATA PENGANTAR

Kelanjutan hidup dan fungsi kehidupan masyarakat pada sebuah Kabupaten sangat tergantung kepada bagaimana cara pemerintah bersama masyarakatnya mengelola lingkungan hidup secara bijaksana demi kemakmuran untuk generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2007, merupakan penerbitan seri laporan tahunan kualitas lingkungan hidup daerah Kabupaten Pasaman. Sejak tahun 2004 SLHD Kabupaten Pasaman menggunakan pendekatan *State, Pressure dan Response (SPR)* Model SPR pertama kali dikembangkan oleh OECD untuk pelaporan lingkungan hidup yang kemudian diadopsi oleh UNEP untuk penyusunan *State of The Environment Report*. Pendekatan yang menekankan hubungan sebab akibat ini diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan dan masyarakat umumnya untuk melihat hubungan antara permasalahan lingkungan hidup, ekonomi dan lainnya.



Pengelolaan lingkungan hidup sangat erat kaitannya terhadap perubahan lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sedangkan mutu analisis dalam laporan SLHD sangat tergantung pada informasi data dasar yang berguna bagi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta peran serta dalam mengambil keputusan yang berwawasan lingkungan hidup. Laporan Status lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kabupaten Pasaman tahun 2007 ini disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan, pengawasan dan keterlibatan publik untuk ikut berperan serta dalam menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam laporan ini ada dua hal yang perlu disampaikan yakni kondisi lingkungan hidup serta analisis dan kecenderungannya serta data tahunan tentang lingkungan hidup baik primer maupun sekunder.

Sebagai representasi dari Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) yang dimulai sejak tahun 2003, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah disusun dengan menggunakan metoda penyusunan "*State of Environment Report*" yang dikeluarkan oleh PBB. Untuk Kabupaten Pasaman laporan ini mulai dibuat tahun 2004 dengan mencoba merangkum permasalahan lingkungan pada masing – masing kecamatan, studi kasus kondisi lingkungan yang lebih difokuskan pada Kecamatan Lubuk Sikaping yang merupakan cerminan dan tolok ukur status lingkungan di Kabupaten secara keseluruhan. Dalam Laporan Status Lingkungan ini tercakup data – data terbaru selama tahun 2007 dan juga data – data tertentu dari tahun 2005 dan 2006 dengan pertimbangan bahwa data –data yang bersangkutan untuk tahun 2007 masih belum tersedia.

Demikianlah laporan status lingkungan hidup Daerah Kabupaten Pasaman ini disusun, Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan kajian yang mendalam bagi semua pihak untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan. Kami yakin dan percaya bahwa masih SLHD Kabupaten Pasaman 2007



banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam menyusun laporan Status Lingkungan hidup Daerah ini, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan laporan ini sangat kami harapkan.

Akhimya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terlaksananya penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pasaman, mudah – mudahan kerjasama seperti ini tetap terbina dan dapat ditingkatkan lagi untuk masa yang akan datang .

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Pasaman

Drs. H. DESWAR HARDANI. MM
NIP. 010 081 589



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tujuan Penulisan	I - 1
1.2 Ruang Lingkup Penyusunan SLHD	I - 2
1.3 Proses Penyusunan	I - 2
1.4 Visi Misi Kabupaten pasaman	I - 3
1.5 Gambaran Umum Kabupaen Pasaman	I - 4



	A . Kondisi /Letak Geografi	I	-	4
	B. Demografi Penduduk	I	-	5
1.6	Kebijakan Pembanguna n Daerah Yang Berkelanjutan	I	-	5
1.7	Kebijakan Pembanguna n Lingkungan Hidup	I	-	6
1.8	Kebijakan Pembanguna n Tata Ruang	I	-	9
1.9	Kebijakan Pembanguna n Sosial, Ekonomi dan Budaya	I	-	11
	A . Bidang Ekonomi	I	-	53
	B. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup ..	I	-	11
	C. Bidang Agama	I	-	57
	D. Bidang Pendidikan	I	-	59
	E. Bidang Sosial Budaya	I	-	60
	F. Bidang Ketertiban Umum	I	-	68
 BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA				
2.1	Pengelolaan Dan Isu Lingkungan	II	-	1
	A . Kualitas Air	II	-	5
	B. Kualitas Udara	II	-	5
	C. Ancaman Kerusakan Hutan	II	-	5
2.2	Tingkat Kesadaran Masyarakat	II	-	14
2.3	Aktifitas Menjaga Lingkungan	II	-	15
 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN				
		III	-	1
3.1 Sumber Daya Alam				
3.1.1	Hutan	III	-	2
	A . Kecamatan Tigo nagari	III	-	5
	B. Kecamatan Bonjol	III	-	5
	C. Kecamatan Panti	III	-	6
	D. Kecamatan Rao	III	-	6
	E. Kecamatan M apat Tunggul	III	-	7
	F. Kecamatan M apat Tunggul selatan	III	-	8
3.1.2	Lahan	III	-	8



3.1.3	Sungai	III - 12
3.1.4	Air	III - 19
	A. Kuantitas dan Kualitas Air Sungai	III - 19
	B. Kualitas Air Tanah	III - 20
	C. Kualitas Air Hujan	III - 22
	D. Air Limbah	III - 22
3.1.5	Udara dan Atmosfer	III - 22
3.1.6	Keaneka Ragaman Hayati Flora dan Fauna	III - 26
3.1.7	Pertambangan dan Energi	III - 29
3.1.8	Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Pasaman	III - 31
3.2	Sumber Daya Buatan	
3.2.1	Air	III - 33
3.2.2	Analisa dan Pemantauan Kualitas Air, Udara Ambien dan Iklim	III - 36
	A. Pamantauan dan Analisa Kualitas Air Tanah	III - 36
	B. Pamantauan dan Analisa Kualitas Air Limbah	III - 37
	C. Pamantauan dan Analisa Air Hujan	III - 39
	D. Pamantauan dan Hasil Analisa Udara Ambien	III - 39
3.2.3	Lingkungan Pemukiman	III - 40
3.2.4	Fasilitas Umum	III - 46
3.2.5	Pariwisata	III - 51
3.2.6	Sektor perekonomian	III - 52
3.2.7	Perindustrian	III - 56
3.2.8	Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	III - 60
3.2.9	Perkebunan	III - 62
3.2.10	Perikanan dan Peternakan	III - 66
3.2.11	Sub Sektor Perikanan	III - 69
	3.2.11.1. Perikanan Budi Daya	III - 69
	3.2.11.2. Perikanan diperairan Umum	III - 71

3.3 Sumber Daya Manusia



3.3.1	Kependudukan	III	-	75
3.3.2	Kesehatan	III	-	80
3.3.3	Pendidikan	III	-	86
3.3.4	Ketenagakerjaan	III	-	87

BAB IV REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1	Kebijakan Upaya Perbaikan Lingkungan	IV	-	1
4.2 Sumber Daya Alam				
4.2.1	Hutan	IV	-	2
4.2.2	Pemulihan Lahan Kritis	IV	-	3
4.2.3	Pengendalian Pencemaran Air dan Sungai	IV	-	5
4.2.4	Pengelolaan Pencemaran Udara	IV	-	6
4.2.5	Keaneka Ragaman Hayati	IV	-	7
4.2.6	Kegiatan Pertambangan, Energi dan Bahan Galian	IV	-	8
4.3 Sumber Daya Buatan				
4.3.1	Pengelolaan Lingkungan Pemukiman	IV	-	8
4.3.2	Fasilitas Umum	IV	-	10
4.3.3	Limbah	IV	-	10
4.3.4	Industri dan Dunia Usaha	IV	-	11
4.3.5	Perikanan dan Peternakan	IV	-	12
4.3.6	Pembuangan Akhir Sampah	IV	-	12
4.3.7	Perekonomian	IV	-	13
4.4 Sumber Daya Manusia				
4.4.1	Kependudukan	IV	-	14
4.4.2	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	IV	-	14
4.4.3	Peningkatan Fasilitas Kesehatan	IV	-	16
4.4.4	Pendidikan	IV	-	18
4.4.5	Sosial dan Tenaga Kerja	IV	-	19
4.4.6	Masalah sosial dan tenaga Kerja	IV	-	21



DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR ISTILAH



Kabupaten Pasaman terletak pada posisi $00^{\circ}55'$ LU s/d $00^{\circ}06'$ LS serta antara $99^{\circ}45'$ s/d $100^{\circ}21'$ BT. Luas keseluruhan Kabupaten Pasaman adalah $3.947,63 \text{ Km}^2$ atau 9,35% dari luas Propinsi Sumatera Barat. Memiliki ketinggian permukaan yang bervariasi antara 50 s/d 2.913 m di atas permukaan laut. Dari luas di atas hanya sekitar 49.017 Ha atau 12,22% yang dimanfaatkan untuk kawasan perumahan, jasa, industri, pertanian dan perkebunan sementara areal lainnya merupakan kawasan hutan dan pegunungan.

Sebagai konsekuensi logis pemekaran Kabupaten Pasaman, berdasarkan Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 yang sebelumnya memiliki luas 7.835 Km^2 ini menjadi $3.947,63 \text{ Km}^2$. Kabupaten Pasaman saat ini perlu lebih memfokuskan arah kebijakan umum pembangunannya pada sektor-sektor ekonomi yang selama ini kurang diperhatikan seperti pertambangan, perikanan, industri dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Hal ini juga didukung dengan telah terbukanya jalur transportasi ke Propinsi Riau melalui Kecamatan Mapat Tunggul sehingga pengembangan Kecamatan Rao dan Panti yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi ke depan merupakan pilihan yang tepat.

Dengan semakin berkembangnya Kabupaten Pasaman sesuai program – program pembangunan dan dinamika masyarakat telah memunculkan pula permasalahan-permasalahan baru di bidang lingkungan. Ada empat isu utama yang perlu menjadi perhatian oleh para pengambil kebijakan di Kabupaten Pasaman yakni; isu alih fungsi lahan dan lahan kritis, banjir, tanah longsor dan pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia selain itu juga isu lingkungan mengenai kualitas air, kualitas udara, dan ancaman kerusakan hutan. Keempat isu tersebut terkait dengan keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.



Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, pemanfaatan lahan produktif di Kabupaten Pasaman pada beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini merupakan akibat tuntutan pembangunan sesuai dengan perencanaan pengembangan wilayah serta meningkatnya kebutuhan penduduk akan sarana dan prasarana. Meningkatnya pemanfaatan lahan yang selama ini merupakan kawasan hutan bagi aktivitas perkebunan dan pertanian baik oleh pemerintah melalui perusahaan daerah, swasta maupun masyarakat sekitar serta pembangunan kawasan pemukiman telah meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam yang ada.

Permasalahan banjir di Kabupaten Pasaman, terutama di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman merupakan banjir musiman yang terjadi pada musim hujan. Bencana alam perlu penanganan lebih lanjut baik dengan meningkatkan kegiatan konservasi kawasan hutan dan kawasan sempadan sungai serta pengaturan drainase.

Mengingat sebagian besar daerah Kabupaten Pasaman adalah perbukitan maka sangat rawan terhadap bahaya tanah longsor. Permasalahan tanah longsor pada kawasan seperti ini semakin mendesak untuk dikelola dengan pendekatan yang lebih persuasif.

Masalah pencemaran di Kabupaten Pasaman juga merupakan isu utama yang perlu dikelola. Dari hasil pengamatan di lapangan dan hasil monitoring oleh Dinas lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan terhadap beberapa lokasi kegiatan industri yang ada didapatkan bahwa nilai mutu lingkungan masih berada dibawah ambang batas yang berlaku.

Untuk kawasan kegiatan pertambangan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan sedini mungkin terutama di lokasi - lokasi pertambangan emas seperti Bonjol, Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Rao Utara dan Duo Koto dan lain-lain serta mengingat usaha penambangan yang dilakukan menggunakan merkuri (Hg) yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan pengusaha penambangan dan



pengolahan bahan galian golongan C dalam skala besar di Rao, Rao Selatan, Lubuk Sikaping dan Bonjol perlu dikelola dan dipantau pengelolaan lingkungannya sedini mungkin sehingga dampaknya ke depan dapat diminimalisir. Demikian juga dengan kegiatan pembuatan jerat babi di Duo Koto, kegiatan yang telah dimulai sekitar tahun 1985 ini mesti disikapi dengan cermat dan tepat dalam pengelolaan limbahnya.

Dengan semakin berkembangnya Kabupaten Pasaman sesuai dengan isu lingkungan yang diuraikan di atas maka dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pasaman ke depan, informasi kualitas lingkungan dan sumber daya yang ada selayaknya menjadi bahan pertimbangan dan kajian.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penulisan

1. Menyediakan data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah Kabupaten Pasaman pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup Kabupaten Pasaman sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akutabilitas publik.
3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Properda), dan kepentingan penanaman modal (investor) di Kabupaten Pasaman.
4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan



(*Good Enviromental Governance*) di Kabupaten Pasaman serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

1.2. Ruang Lingkup Penyusunan SLHD

A. Data Utama

Data utama yang digunakan dalam menyusun laporan SLHD Kabupaten Pasaman adalah Data lingkungan hidup, serta data pendukung lainnya (seperti data sosial dan ekonomi) untuk memperkuat analisis.

B. Tahun Data

Data yang digunakan dalam penyusunan laporan SLHD adalah data tahun 2006 dan 2007 dan data tahun-tahun sebelumnya (3-4 tahun terakhir) untuk melihat kecenderungan (trend)

1.3. Proses Penyusunan

A. Pembentukan Tim Penyusun

Laporan SLHD merupakan laporan pemerintah Kabupaten Pasaman, oleh karena itu dalam penyusunannya melibatkan instansi terkait. Keterlibatan Instansi terkait (anggota) tim Penyusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman.

B. Metodologi Pengumpulan Data SLHD

Pengumpulan data SLHD dilakukan oleh Tim penyusun dengan tahap sebagai berikut :



1. Pengadaan data : dengan cara mengumpulkan data primer dan data skunder di lapangan maupun mengumpulkan data dari anggota tim (dinas terkait)
2. Pemilihan data : dengan cara dipilah sesuai dengan kebutuhan.
3. Verivikasi data : data yang didapat dipilah dan ditetapkan dan perlu dilakukan verivikasi kembali sebelum dimasukan kedalam kumpulan data penyusunan laporan SLHD
4. Pengokedan : dengan cara memasukan data yang telah ditentukan (SDA, SDB, dan SDM).

C. Metode Penyusunan Laporan SLHD

Laporan SLHD disusun oleh tim sebagai berikut :

1. menentukan isu lingkungan hidup utama dalam satu tahun berjalan berdasarkan kriteria dan identifikasi permasalahan yang berkembang di Kabupaten Pasaman mengenai lingkungan hidup.
2. Isu lingkungan tersebut dipilih secara S-P-R dan dituangkan kedalam bab per bab.
3. Menyampaikan kondisi lingkungan (air, udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut) berdasarkan data yang terkumpul dari anggota tim
4. Menyampaikan rekomendasi sesuai dengan permasalahan dan upaya penyelesaian yang sedang dilakukan atau yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam memperbaiki lingkungan.
5. Melakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam SLHD tahun sebelumnya.



1.4. Visi dan Misi Kabupaten Pasaman

Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk priode 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

**“ Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan
memanfaatkan sumberdaya yang ada,
melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik”**

Pada visi ini terlihat ada 3 komponen utama yang mendapat penekanan dalam visi pembangunan yakni :

- a. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, yaitu suatu kondisi masyarakat yang sehat jasmani, rohani, ekonomi, sosial budaya dan terciptanya rasa aman.
- b. Pemanfaatan sumberdaya alam yang ada secara optimal, yaitu upaya menggali, meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan segenap potensi yang ada (sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan) untuk kesejahteraan rakyat
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good Governance) yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur yang bersih, bebas KKN dan bertanggung jawab.

Pencapaian visi pembangunan ini akan diupayakan melalui pelaksanaan misi sebaga berikut :



1. Meningkatkan derajat kesehatan , kuantitas dan kualitas pendidikan , pendapatan masyarakat, pelaksanaan dan pengamalan ajaran agama , adat istiadat serta memelihara persatuan dan kesatuan.
2. Mengembangkan penelitian dan pengkajian serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan.
3. Meningkatkan kualitas , kesejahteraan, penegakan disiplin dan pengawasan aparatur.
4. Mensinergiskan peranan swasta dalam pembangunan daerah .
5. Mewujudkan pelayanan prima.

1.5. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman

A. Kondisi / Letak Geografi

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 4.011,08 KM² yang terdiri dari 12 kecamatan dan 32 nagari. Secara geografis dilintasi khatulistiwa dan berada pada 0°55' LU - 0°06' LS dan 99°45' BT - 100°21' BT. Ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.240 meter diatas permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Pasaman merupakan Kabupaten paling Utara dari Propinsi Sumatera Barat dan berbatasan dengan yakni :

Bagian Utara : Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara

Bagian Timur : Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan Kabupaten 50 Kota

Bagian Selatan : Kabupaten Agam



Bagian Barat : Kabupaten Pasaman Barat.

B. Demografi /Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Pasaman tahun 2007 256.060 dengan komposisi 126.911 jiwa laki-laki dan 129.149 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Pasaman.

1.6. Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan

Lubuk Sikaping sebagai Ibu Kota Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah banyak mengalami kemajuan apalagi setelah ditetapkan sebagai salah satu centra pengembangan di Kabupaten Pasaman sebagai pusat pemerintahan dan pusat pendidikan. Setelah keluarnya Undang – undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pemekaran kabupaten Pasaman yang sebelumnya program pembangunan dititik beratkan pada bidang pertanian dan perkebunan tetapi setelah pemekaran titik berat pembangunan diarahkan pada bidang pertanian, perikanan, dan peternakan, perkebunan dan pertambangan tanpa meninggalkan bidang-bidang lainnya.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dalam melaksanakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasaman mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi yang kemudian dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang



berpedoman kepada Visi dan Misi Daerah kemudian dilengkapi dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh masing-masing SKPD. Penyusunan RKPD berpedoman pada Renstra SKPD.

1.7. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Pembangunan sektor Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lingkungan Hidup (LH) diarahkan kepada usaha pengelolaan SDA agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan generasi penerus, serta menjamin lanjuatan pembangunan di masa yang akan datang. Pengelolaan SDA dan LH di kabupaten Pasaman meliputi 3 (tiga) aspek yakni : pembinaan, pengelolaan dan pengawasan SDA serta lingkungan. Pemanfaatan SDA haruslah sesuai dengan kaedah pengelolaan sumberdaya yang dikelola seimbang, serasi dan selaras, sehingga untuk masa yang akan datang pengelolaan SDA dan LH dapat dipertahankan bagi keberlanjutan pembangunan, dengan mengeluarkan produk-produk hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dapat dilihat pada kumpulan data SDB. 3.17 dan anggaran pengelolaan lingkungan juga dapat dilihat pada kumpulan data SDB. 3.18.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, yang menjadi arah kebijaksanaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan konservasi, rehabilitasi, penghematan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam mengolah dan mengelola potensi sumber daya daerah



- bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat secara adil, stabil dan berkelanjutan .
- b. Memanfaatkan sumber daya alam secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertahankan kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup sesuai dengan penataan ruang yang penggunaannya diatur melalui Peraturan Daerah .
 - c. Mengelola lingkungan hidup agar tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan demi terwujudnya kesimbangan, keselarasan dan kedinamisan antara sistem ekologi, sosial ekonomi dan sosial budaya demi pembangunan yang berkelanjutan .
 - d. Melestarikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas hidup, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan melalui pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam .
 - e. Meningkatkan peran serta dan tanggung jawab sosial masyarakat dan lembaga sosial masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup, terutama dalam pemantauan eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah dan teknik konservasi .
 - f. Meningkatkan kesadaran warga masyarakat terhadap wawasan lingkungan guna memelihara ekosistem, tatanan lahan dan tata ruang sejalan dengan pemetaan dan inventarisasi flora dan fauna .
 - g. Mengembangkan partisipasi masyarakat guna menjaga, memelihara, dan mempertahankan kelestarian hutan, daerah pinggiran dan daerah kritis .



- h. Mencegah dan menanggulangi pencemaran serta perlindungan terhadap erosi melalui pengawasan, penegakan hukum yang tegas dan konsisten khususnya pada wilayah yang dilindungi dan wilayah lahan kritis.
- i. Meningkatkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam potensial guna mendapatkan manfaat optimal dan dampak positif maksimal secara berkelanjutan.
- j. Memulihkan kesuburan tanah dan memelihara sumber-sumber air dan sungai untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin ketersediaan air yang cukup untuk kebutuhan pertanian dan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan dan penyediaan air sehingga dapat dicegah terjadi erosi dan banjir.

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman

Visi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman adalah ***Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas, Aman, Nyaman dan Lestari***. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah meningkatkan kualitas lingkungan dan mengoptimalkan daya dukung lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dengan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup baik karena faktor alam maupun karena perbuatan manusia melalui pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan dan juga pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia tanpa mengganggu kelestarian lingkungan yang ada sehingga terwujudnya suatu pembangunan yang berkelanjutan.



Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan **Misi Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan
- c. Meningkatkan lingkungan yang sehat, bersih, indah dan nyaman.

1.8. Kebijakan Pembangunan Tata Ruang

Meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya pergerakan antar wilayah/ kawasan, akan memunculkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang akibat tekanan terhadap ruang dan sumber daya alam.

Permasalahan tersebut pada dasarnya timbul karena adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan karena terbatasnya ruang yang tersedia. Selain itu masing-masing sektor/ daerah memanfaatkan ruang dan tanah sesuai dengan target sektor/daerahnya tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan kegiatan di sektor/daerah lainnya dalam lingkup pembangunan daerah dalam satu kesatuan tatanan lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah tidak dapat dilakukan secara sektoral semata, namun harus lebih berorientasi kepada pembangunan wilayah dan kawasan yang multisektoral. Untuk itu rencana tata ruang wilayah harus dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar tatanan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna secara berkelanjutan.



Pada hakekatnya tujuan penataan ruang sejalan dengan tujuan pembangunan, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan bagi seluruh penduduk, kestabilan yang tangguh dan dinamis serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu penataan ruang juga bertujuan agar terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat dibudidayakan serta tercapainya tata ruang yang berkualitas. Dengan demikian penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama lahan dan air yang terbatas jumlahnya, dengan seefektif dan seefisien mungkin agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Begitu pula halnya dengan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman. Pada tahun 1992/1993 telah disusun Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Kabupaten Pasaman dan telah di Perdakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 05 Tahun 1994), sedangkan Undang-Undang Penataan Ruang baru diterbitkan pada akhir tahun 2000 (tepatnya November 2000) dan disosialisasikan pada masyarakat pada tahun berikutnya, sehingga produk yang sudah dihasilkan belum didasarkan pada materi Undang-undang Penataan Ruang tahun 1992.

Salah satu tujuan disusunnya RTRW Kabupaten Pasaman adalah sebagai dasar dalam penerbitan perizinan lokasi pembangunan. RTRW yang dibuat harus mencerminkan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Untuk menarik investasi guna memacu pertumbuhan perlu didukung oleh RTRW yang memadai, dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi perizinan serta mekanisme koordinasi antar instansi.



Pengaruh globalisasi (keberadaan Propinsi Riau dan Kebijakan SIJORI) menyebabkan suatu daerah / wilayah perlu merelokasi kegiatan pembangunannya yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap pola pemanfaatan lahan / ruang dan arah pemanfaatan ruang serta kebijakan pembangunan suatu daerah (termasuk Kabupaten Pasaman) yang akan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Untuk mengantisipasi era globalisasi ini, perlu disusun suatu rencana tata ruang wilayah mengingat relokasi maupun membuka daerah dan usaha ekonomi baru seperti pemanfaatan potensi sumber daya alam, kedekatan pangsa pasar dan lain-lain akan sangat kuat mempengaruhi pemanfaatan lahan.

1.9. Kebijakan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya

A. Bidang Ekonomi

Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Usaha pada sektor industri di Kabupaten Pasaman pada umumnya adalah berskala kecil dan mayoritas merupakan industri rumah tangga yang menghasilkan berbagai produk olahan komoditas pertanian seperti industri pengupasan dan pengeringan coklat, industri gambir dan minyak nilam serta industri kerajinan rakyat seperti perabot dan Usaha jerat babi.

Sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman, maka dengan dibukannya pertambangan di Kecamatan Rao Utara nantinya akan membangun pabrik berukuran skala besar, maka



sektor industri kedepan akan semakin mempunyai peran strategis dalam perekonomian, terutama agroindustri yang mampu mengolah hasil bumi dan sumberdaya alam lainnya, sehingga menjadi komoditi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, dengan kata lain akan mampu menciptakan nilai tambah dalam perkonomian. Adapun industri potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Pasaman diantaranya adalah:

- a. Industri pengolahan ikan sale/ikan pindang/presto
- b. Industri pengalengan buah salak.
- c. Industri pengolahan minyak nilam.
- d. Industri pengolahan karet.
- e. Industri pengolahan kopi.
- f. Industri pengolahan kelapa.
- g. Industri pengolahan kacang tanah (kacang goreng).
- h. Industri pengolahan makanan ikan/temak (pelet).
- i. Industri keramik.
- j. Industri batu tulis.
- k. Industri batu bata.
- l. Industri pengolahan gambir
- m. Industri Pangolahan bahan galaian tambang

Tentu saja, untuk dapat mengembangkan sektor industri dengan baik dibutuhkan data yang akurat tentang para pelaku usaha industri, untuk itu pendataan yang komprehensif dan kepemilikan izin usaha akan sangat penting artinya agar kebijakan yang dibuat untuk pengembangan sektor industri akan semakin jelas arah dan sarannya.



Sektor perdagangan memegang peran penting dalam aktivitas ekonomi suatu masyarakat, karena melalui sektor ini distribusi barang dan jasa terjadi dalam perekonomian. Sektor perdagangan di Kabupaten Pasaman selama lima tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup baik.

Pada saat ini di Kabupaten Pasaman terdapat banyak pasar nagari, pasar daerah dan pasar serikat, dimana pasar-pasar yang cukup besar berada di ibu kecamatan. Dengan banyaknya jumlah pasar dan tersebar di seluruh wilayah daerah ini, dengan waktu pasar yang juga beragam, jelas dibutuhkan suatu penanganan yang serius untuk mengembangkan dan meningkatkan peran pasar-pasar ini dalam menjalankan fungsi distribusi komoditas barang dan jasa dalam perekonomian, baik secara lokal maupun regional. Hal ini sangat penting artinya agar berbagai komoditas potensial yang dihasilkan daerah ini dapat dipasarkan dengan baik dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi pasar yang berada pada Kecamatan Lubuk Sikaping sudah cukup sempit sehingga pada hari pasar menyebabkan kemacetan lalu lintas dikarenakan banyaknya mobil, bendi dan O jek yang parkir disekitar lokasi jalan raya dan juga kondisi pasar yang hanya hidup dua kali dalam satu minggu jelas akan sangat membatasi aktivitas perdagangan dan distribusi barang dan jasa di wilayah ini, apalagi jika komoditas utama yang dihasilkan adalah komoditas pertanian yang berumur relatif pendek. Akibatnya, bagi para petani yang harus mengambil hasil bumi sedangkan di tempat tinggal mereka bukan hari pasar, maka mereka harus menjual hasil pertanian mereka ke pasar di kecamatan atau wilayah lain. Hal ini jelas membutuhkan biaya transportasi dan angkutan yang lebih besar jika dibandingkan dengan menjual di pasar desa setempat.



Pada akhirnya kondisi seperti ini akan menyebabkan biaya distribusi komoditas yang dihasilkan menjadi tinggi dan akibatnya tentu akan mengurangi tingkat pendapatan yang akan diterima oleh para pelaku ekonomi, khususnya para petani di wilayah ini yang merupakan bagian terbesar dari penduduk di kabupaten ini. Dan secara makro hal ini akan menimbulkan tingginya biaya ekonomi masyarakat untuk mendistribusikan maupun mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian.

Sasaran dan Target Sektor Industri dan Perdagangan

Dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi wilayah Kabupaten Pasaman yang cukup luas, maka sektor industri dan perdagangan merupakan sektor ekonomi strategis yang harus dikembangkan dan ditata secara optimal untuk dapat mendorong perekonomian daerah dengan baik. Adapun sasaran dan target pembangunan untuk sektor industri dan perdagangan untuk lima tahun kedepan adalah:

Sektor Industri

Pengembangan sektor industri di Kabupaten Pasaman harus diarahkan pada agroindustri yaitu industri yang mengolah hasil bumi dan pertanian rakyat di daerah ini. Untuk itu, sasaran dan target kebijakan sektor industri adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha sektor industri, terutama industri kecil dan rumah tangga, melalui berbagai pelatihan dan



pendidikan. Baik yang dilakukan secara terstruktur di tempat pelatihan formal, maupun secara langsung di lokasi pelaku usaha.

2. Meningkatkan kesadaran pelaku industri akan arti penting standar mutu produk, sebagai faktor penentu peningkatan daya saing produk. Melalui kegiatan sosialisasi maupun pelatihan.
3. Meningkatkan produktivitas, khususnya tenaga kerja sektor industri kecil dan rumah tangga, dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah tangga dan masyarakat.
4. Meningkatkan daya cipta dan kreasi pelaku industri untuk dapat melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan daya saing produk.
5. Meningkatkan kemampuan menciptakan lapangan kerja baru dengan diversifikasi usaha industri.
6. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri, khususnya industri kecil dan rumah tangga.
7. Meningkatkan akses pelaku industri terhadap berbagai sumber pembiayaan, permodalan, pemasaran dan bentuk kemitraan lainnya.
8. Memberikan arah pengembangan yang terencana dan jelas agar sesuai dan dapat mendukung arah pengembangan perekonomian Kabupaten Pasaman di masa mendatang.
9. Membangun keterkaitan antar industri yang kuat baik secara vertikal yaitu keterkaitan input, output, maupun secara horizontal yang merupakan keterkaitan antar industri sejenis.
10. Menetapkan suatu kawasan atau daerah baru untuk lokasi industri besar dimanan dilihat dari perkembangan Kabupaten pasaman yang mengelolan



sumberdaya alam yang ada dan juga banyaknya investor masuk ke Kabupaten Pasaman.

Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor penentu bagi distribusi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Untuk itu sarana dan prasarana pendukung aktivitas perdagangan harus dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap distribusi barang dan jasa. Adapun faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan sektor perdagangan adalah sarana pasar dan SDM pelaksana, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pengelola pasar. Sasaran dan target kebijakan pengembangan sektor perdagangan Kabupaten Pasaman untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha sektor perdagangan terutama pedagang kecil dan menengah serta para pengelola pasar.
2. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha perdagangan dan jasa akan arti penting SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) bagi pembuatan kebijakan dan pengembangan sektor perdagangan dimasa mendatang.
3. Meningkatkan efisiensi pendistribusian barang dan jasa dalam perekonomian.
4. Meningkatkan pengawasan kualitas pelayanan terhadap pelaku usaha perdagangan .



5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana informasi dan telekomunikasi serta transportasi sebagai sarana penunjang perdagangan, baik skala lokal maupun regional.
6. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha perdagangan dan jasa, khususnya pedagang kecil dan menengah.
7. Meningkatkan akses pelaku usaha perdagangan dan jasa berskala kecil terhadap berbagai sumber pembiayaan, permodalan dan bentuk kemitraan lainnya.
8. Meningkatkan kualitas fasilitas pasar yang tersebar di seluruh wilayah.
9. Meningkatkan akan pasar melalui berbagai macam promosi dan pameran dagang baik lokal maupun regional

Strategi dan Arah Kebijakan

Sektor Industri

Untuk dapat memberikan arah dan menodorong pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Pasaman pada masa yang akan datang, khususnya lima tahun kedepan, maka perlu dibuat rumusan bagi arah kebijakan dan strategi serta program pembangunan sektor industri yang akan dilakukan. Hal ini sangat penting artinya bagi kesinambungan perkembangan sektor industri khususnya dan pertumbuhan serta kemajuan ekonomi pada umumnya. Adapun rumusan kebijakan yang perlu dilakukan adalah:



- a. Kebijakan yang terkait dengan upaya pendalaman dan penguatan struktur industri, baik secara vertikal dari hulu ke hilir maupun secara horizontal. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun sinergi antara industri kecil dengan industri sedang dan besar, antara industri hulu dengan industri hilir. Dengan demikian sektor industri akan tumbuh bersama dan menjadi kuat bersama. Untuk itu perlu dibuat suatu kawasan industri yang dapat menampung dan mengorganisir aktivitas produksi secara lebih efektif dan efisien.
- b. Perbaiki pola kemitraan yang dikembangkan dewasa ini, untuk dapat lebih mengarahkan pada membangun kemandirian masing-masing elemen yang bermitra dan bukan menjalin ketergantungan antara yang satu dengan lainnya.
- c. Penataan dan pembinaan terhadap sentra industri kecil sebagai mayoritas pelaku ekonomi di sektor ini dalam konteks memperkuat struktur industri dengan tujuan meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas, dengan memperhatikan karakteristik industri dan proses produksi serta aktivitas vital yang terkait di dalamnya.
- d. Karena kawasan wilayah yang cukup luas dengan potensi yang juga beragam, maka pengembangan industri harus diarahkan pada penguatan industri pendukung sektor pertanian dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya yang ada di wilayah ini.
- e. Melakukan perbaikan teknologi industri yang digunakan untuk dapat mendorong efisiensi dan produktivitas produksi dengan teknologi tepat guna.



Sektor Perdagangan

Dengan banyaknya pasar yang tersebar di 12 kecamatan dengan hari pasar yang berbeda, maka aktivitas perdagangan di Kabupaten Pasaman berjalan dengan baik dan cenderung tidak terkonsentrasi di Kecamatan Lubuk Sikaping. Sementara aktivitas pertanian dan produksi barang dan jasa menyebar di seluruh wilayah. Untuk itu, kebijakan pengembangan sektor perdagangan lima tahun mendatang harus diarahkan pada peningkatan aktivitas perdagangan agar distribusi barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Pasaman dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Adapun strategi kebijakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Melakukan penataan kawasan perdagangan, pendataan yang akurat bagi pelaku usaha serta efisiensi birokrasi perizinan usaha. Dengan demikian diharapkan sektor perdagangan akan semakin kondusif dan pendistribusian komoditas ekonomi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- b. Pembangunan pusat perdagangan (pasar induk) untuk komoditas pertanian maupun industri yang hidup setiap hari, agar *output* daerah dapat didistribusikan lebih cepat dan lebih efisien, mengingat komoditas utama yang dihasilkan daerah ini adalah komoditas pertanian yang rentan terhadap kerusakan dan umur pendek.



- c. Mendorong iklim usaha yang kondusif bagi pedagang kecil untuk tumbuh dan berkembang bersama para pedagang besar dalam mendorong perekonomian daerah.
- d. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pasar dan jasa transportasi sebagai sarana pendukung utama sektor perdagangan khususnya dan roda perekonomian pada umumnya.
- e. Menyiapkan sarana informasi pasar untuk pelaku usaha lokal agar dapat memasuki pasar regional dan internasional.
- f. Mencarikan alternatif baru untuk pasar karena pasar lama Lubuk Sikaping kurang memadai untuk lokasi pasar dikarenakan lokasi pasar kurang besar dan juga diarahkan kepada pasar Benteng Nagari Tanjung Beringin.

Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pengembangan sektor pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan merupakan salah satu program utama pemerintah baik ditingkat nasional maupun di daerah (kabupaten/ kota) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan protein hewani dan untuk penyediaan bahan baku industri pertanian. Disamping itu pengembangan sektor pertanian juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, melalui peningkatan produksi dan produktivitas, sekaligus untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah bertekad sektor pertanian akan terus dikembangkan menjadi pertanian yang maju, efisien dan tangguh melalui usaha-usaha diversifikasi,



intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian dengan pendekatan agribisnis dengan tetap memelihara kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pola kehidupan masyarakat.

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pasaman, terutama sub sektor pertanian pangan dan hortikultura, dimana beras merupakan komoditi andalan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di samping tanaman pangan lainnya yang berasal dari tanaman palawija. Oleh karena itu usaha pengembangan dan peningkatan produksi pertanian akan terus mendapat prioritas utama dengan mencari cara-cara yang lebih efisien dan efektif untuk mengimbangi peningkatan permintaan masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian merupakan andalan utama Kabupaten Pasaman yang senantiasa selalu mendapat prioritas utama dalam kegiatan pembangunan ekonomi hingga saat ini laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman atas dasar harga konstan mencapai 5,99 % pada tahun 2007.

Kebijakan dan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Untuk meningkatkan daya saing komoditi pertanian Kabupaten Pasaman perlu dilakukan penerapan teknologi tepat guna, diversifikasi komoditi, peningkatan produksi dan peningkatan mutu dan pengolahan hasil. Selanjutnya usaha diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan



dengan perencanaan dan penyelenggaraan yang makin terpadu serta disesuaikan dengan kondisi tanah, air dan iklim, pola tata ruang dengan tetap memelihara kelestarian dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Di samping itu, para petani di daerah ini perlu dibina dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam berusaha, dengan tujuan agar para petani memiliki jiwa kewirausahaan (bisnis) dalam mengelola usahanya, sehingga produksi yang dihasilkan berkualitas dan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi serta mampu berkompetisi di pasaran.

Pembangunan pertanian tanaman pangan perlu terus ditingkatkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi yang berimbang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana produksi, perbaikan dan penanganan pasca panen. Di samping itu mengupayakan perbaikan sistem pemasaran hasil produksi. Pembangunan tanaman hortikultura yang meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan perlu ditingkatkan berdasarkan keunggulan komparatif, Kompetitif, potensi tenaga kerja dan tersedianya lahan.

Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pasaman diarahkan pada percepatan swasembada pangan melalui peningkatan produksi sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, di samping itu bertujuan untuk pengentasan kemiskinan melalui kegiatan perbaikan gizi keluarga dan peningkatan kegiatan usaha tani komoditi pangan yang bernilai tinggi. Kebijakan ini juga ditujukan untuk penumbuhan agribisnis berskala ekonomis melalui kegiatan sentra produksi dan jasa pelayanan.



Peningkatan sumberdaya manusia baik aparat maupun petani pelaksanaan melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan serta peningkatan sumber daya alam melalui pemanfaatan lahan tidur, konservasi dan rehabilitasi lahan. Kesemuanya dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di daerah ini.

Untuk mencapai tujuan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pasaman perlu digunakan strategi pendekatan sistem agribisnis dan memadukan antara pembangunan pertanian dengan perekonomian pedesaan secara berkelanjutan serta memperhatikan keberadaan sumber daya manusia pertanian. Dengan strategi pendekatan tersebut maka orientasi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak hanya kepada peningkatan produksi dan pendapatan petani saja, tapi diperluas mencakup pengembangan keseluruhan sistem agribisnis yang diterapkan secara terpadu.

Selanjutnya yang menjadi sasaran kebijaksanaan dengan memperhatikan potensi, peluang, pertumbuhan pangan selama beberapa tahun terakhir serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang adalah:

- a. Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura .
- b. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasaman.
- c. Penyerapan dan perluasan lapangan kerja .
- d. Rehabilitas dan pengembangan lahan .
- e. Pengembangan usaha tani jeruk.
- f. Pengembangan usaha tani jagung dan kacang kedelai.



- g. Pengembangan sentra produksi buah-buahan.
- h. Pengembangan irigasi pedesaan dan mekanisasi pertanian.

Melalui kebijakan ini diharapkan adanya kemampuan dari petani untuk mengembangkan pemasaran komoditi yang dihasilkan melalui kegiatan:

- a. Pengembangan kualitas dan standarisasi produk-produk tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Pengembangan pelayanan informasi pemasaran di pedesaan.
- c. Perluasan pasar dan hasil-hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Mengembangkan temu usaha untuk menciptakan kemitraan usaha antara petani produsen dengan pengusaha.
- e. Mengembangkan usaha pertanian yang mendukung agroindustri

Sektor Perikanan

Sejak pemisahan Kabupaten Pasaman menjadi dua Kabupaten, yaitu menjadi Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman merupakan daerah daratan, sehingga kegiatan perikanan pun diarahkan kepada yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di daratan, yaitu kegiatan Perikanan Budidaya dan Perikanan Perairan Umum, karena memang daerah ini tidak mempunyai kawasan laut lagi.

Berdasarkan kondisi di atas, maka potensi daerah Kabupaten Pasaman adalah terutama Perikanan Budidaya ikan perairan umum, seperti pada tahun 2007 luas areal perikanan rakyat di daerah ini adalah 1.038 Ha dengan produksi 3.321.600 ton. Untuk memenuhi kebutuhan benih ikan dalam rangka



menunjang budidaya ikan di Kabupaten Pasaman terdapat BBI yang terbesar di Sumatera Barat yang terletak di Rao dengan luas BBI seluas 4,0 Ha.

Sasaran dan Target Pembangunan

Sasaran

- a. Peningkatkan kemampuan sumberdaya manusia masyarakat perikanan dan peternakan
- b. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur perikanan dan peternakan
- c. Penerapana paket teknologi baru sesuai dengan rekomendasi untuk masyarakat perikanan dan peternakan
- d. Tersedianya paket teknologi, sarana dan prasarana budidaya dan pengolahan yang memadai
- e. Tersedianya sistem dan metoda serta sarana pengolahan yang memadai
- f. Tersedianya sarana dan prasana perkantoran
- g. Teridentifikasinya potensi pengembangan usaha perikanan dan peternakan
- h. Terlaksananya pengawasan dan monitoring
- i. Tersedianya data dan informasi pasar
- j. Tersedianya data dan laporan kegiatan pembangunan
- k. Terlaksananya pelestarian sumberdaya perikanan dan peternakan
- l. Tersedianya data dan laporan kepegawaian
- m. Terlaksananya tertip administrasi dan kearsipan.



Target Pembangunan

Pengembangan budidaya perikanan di Pasaman diharapkan akan dapat menyumbangkan PAD, dari komoditi budidaya ikan air tawar.

Target pengembangan budidaya pada tahun 2006 – 2010, meliputi:

1. Lahan budidaya ikan keramba : 625 Unit, est produksi 937 ton.
2. Lahan budidaya ikan air tenang (kolam): 2568 Ha, est produksi 1.6948 ton.
3. Penangkapan ikan di perairan umum : 1.038 Ha, est produksi 250 ton.

Kebijakan Pembangunan

Kebijakan Operasional Pembangunan Perikanan

Secara nasional telah dicanangkan "**Gerakan Nasional Pembangunan Perikanan**", oleh sebab itu sebagai pengejawantahan dari gerakan nasional tersebut, di tingkat Kabupaten juga perlu dicanangkan gerakan serupa. Namun karena terkendala akan keadaan geografis dan potensi daerah, maka gerakan tersebut disesuaikan dengan kondisi alam yang ada, yaitu kepada budidaya dan perikanan di perairan umum. Dengan demikian kebijakan pembangunan perikanan di Kabupaten Pasaman, diarahkan kepada:

- a. Peningkatan produksi perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- b. Mengembangkan dan memperkuat industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil.
- c. Memelihara keberlanjutan sumberdaya perikanan serta ekosistem perairan tawar.



- d. Memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan suatu sumberdaya perikanan.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka program ini adalah :

- a. Prioritas pengembangan usaha penangkapan ikan di perairan umum melalui budidaya ikan di karamba, budidaya di kolam, budidaya di sawah (minapadi) dan budidaya di saluran irigasi/ badan air untuk ikan yang mudah dan disenangi masyarakat.
- b. Peningkatan produktivitas melalui *restocking* ikan di perairan umum dan produktivitas lahan budidaya melalui pengembangan teknologi dan peningkatan akses distribusi serta pemasaran dalam negeri.
- c. Pemberdayaan usaha perikanan melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perikanan.
- d. Pengembangan kelembagaan petani nelayan.

Program Pembangunan Perikanan

Program pembangunan perikanan di Kabupaten Pasaman lebih diarahkan pada upaya pengembangan perikanan air tawar yakni melalui pengembangan penangkapan ikan di perairan umum melalui *restocking*, budidaya ikan di kolam, karamba, minapadi dan budidaya ikan di saluran irigasi (sariban). Pengembangan penangkapan di perairan umum dilakukan dengan upaya pokok pemanfaatan kesuburan perairan umum untuk pertumbuhan ikan melalui penebaran (*restocking*) berbagai jenis ikan herbivora dan pemakan plankton di sungai, waduk dan saluran irigasi serta perairan lainnya.

Pengembangan budidaya di kolam, karamba dan budidaya di saluran irigasi, dilakukan secara terpadu dengan pengembangan budidaya ikan di sawah

**TABEL 3.1 : LUAS HUTAN MENU RUT FUNGSI / STATUS**

Kabupaten : Pasaman
 Propinsi : Sumatera barat
 Tahun Data : 2007

No.	Hutan	Luas (Ha)
A.	Kawasan Konservasi	
1.	Hutan suaka alam dan wisata (HSAW)	18.945
2.	Taman Wisata	0
3.	Taman Buru	0
4.	Taman Nasional	0
5.	Taman Hutan Raya	0
6.	Hutan Lindung	226.563
B	Hutan Produksi	0
C	Hutan Kota	0
Total Luas Hutan		245.508

Sumber : Dinas kehutanan 2007

TABEL 3.2. : PERINCIAN LUAS LAHAN MENU RUT PENGGUNAANYA

Kabupaten : Pasaman
 Propinsi : Sumatera barat
 Tahun Data : 2006

No.	Peruntukan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman/perkampungan	7.190
2.	Pertanian	34.744
3.	Perkebunan	33.167
4.	Industri	300
5.	Pertambangan	-
6.	Lainnya	323.707
Jumlah		401.108

Sumber : Analisa Data Pokok Pembangunan Kab. Pasaman Bappeda



**TABEL 3.3. : KAWASAN HUTAN YANG RUSAK PERKECAMATAN
DI KABUPATEN PASAMAN**

Kabupaten : Pasaman
Propinsi : Sumatera barat
Tahun Data : 2007

No.	Kecamatan	PL (HA)	LK (HA)	LB (HA)	KBN (HA)	JUMLAH (HA)
1.	Tigo Nagari	70	1360	192	-	1622
2.	Bonjol	70	750	1095	85	2000
3.	Panti	375	400	235	-	1010
4.	Rao	1206	18436	1269	1005	21916
5.	Mapat Tunggul	1256	18400	1150	900	21706
6.	M. Tunggul Sel	9565	530	1565	-	11660
7.	Lubuk Sikaping	6,5	6,5	5	5831	5849
	TOTAL	12548,5	39882,5	5511	7821	65763

Sumber : Dinas Kehutanan 2007

Keterangan:

PL : Kawasan Hutan yang dibuka oleh penebang liar
LK : Kawasan Hutan yang sudah menjadi lahan kritis
LB : Kawasan Hutan yang sudah dibakar
KBN : Kawasan Hutan yang dibuka untuk kebun

TABEL 3.4: LUAS DAN PERKIRAAN PRODUKSI PERTAMBAHAN GO LONGAN C

Kabupaten : Pasaman
Propinsi : Sumatera barat
Tahun Data : 2007

No.	Lokasi	Luas (Ha)	Produksi (m ³)
1.	PRATAMA KARYA Bt. Tikarang Rao Selatan	1 Ha	70.000 m ³
2.	SUBUR BROTHER Batang Sumpur Bonjol	1 Ha	7234,29 Ton
3.	BA RETTA MUDA PRATAMA Batang Asik Rao Selatan	1 Ha	5853,60 m ³
4.	Z. DT. SINARO Batang pakau Lb. Sikaping	1 Ha	8533,07 Ton

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi 2007

**TABEL 3.5. : LUAS LAHAN KRITIS**

Kabupaten : Pasaman
 Propinsi : Sumatera barat
 Tahun Data : 2007

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas Lahan Kritis (Ha)					Luar Kawasan	Jml
			HK	HL	HP	HSAW	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bonjol	45.478,25	-	4.601,12	714,16	5.714,67	11.029,95	2.454,60	13.436,08
2.	Duo Koto	29.253,53	-	12.271,05	1.851,45	-	14.122,50	1.767,30	15.967,26
3.	Tigo Nagari	20.632,17	-	2.848,92	-	1.670,45	4.632,99	3.766,84	8.399,83
4.	L. Sikaping	48.113,96	-	14.225,33	220,78	2.162,09	16.608,20	2.045,71	18.653,91
5.	M. Tunggul	110.427,07	-	49.900,33	3.342,59	-	53.242,92	8.092,90	61.335,82
6.	Panti	43.718,71	-	-	14.621,81	1.372,76	15.994,57	3.309,49	19.304,06
7.	Rao	99.042,53	-	41.357,39	-	-	41.357,39	11.435,82	52.793,21

Sumber : Dinas Kehutanan 2007



TABEL 3.6 : KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN LAHAN (GNRHL) KABUPATEN PASAMAN

Kabupaten : Pasaman
 Propinsi : Sumatera barat
 Tahun Data : 2004, 2005, 2006

A. TAHUN ANGGARAN 2003/2004, PELAKSANAAN TAHUN 2004

1. Lokasi Pelaksanaan GNRHL

No	Lokasi	DAS	Luas (Ha)	Jenis Kegiatan
1.	Kec. Tigo Nagari Kenagarian Binjai Jorong Padang Kubu	Masang Antokan	25	Hutan Rakyat
2.	Kec. Rao Kenagarian Padang Matinggi Jorong Muaro Penyanggrahan	Rokan	200	Reboisasi
3.	Kec. Rao Kenagarian Padang Matinggi Jorong Muaro Cubadak	Rokan	400	Reboisasi
	Total		1.225	

B. TAHUN ANGGARAN 2004/2005, PELAKSANAAN TAHUN 2005

2. Lokasi Pelaksanaan GNRHL

No	Lokasi	DAS	Luas (Ha)	Jenis Kegiatan
1.	Kec. Rao Utara Kenagarian Langgung Jorong Lubuak Hijau	Roakan Hulu	200	Hutan Rakyat
2.	Kec. Rao Utara Kenagarian Langgung Jorong Sungai Ranyah	Rokan Hulu	200	Reboisasi
3.	Kec. Rao Kenagarian Padang Matinggi Jorong Polongan Duo	Rokan	100	Reboisasi
	Total		500	
4.	Kec. Rao Utara Kenagarian Langgung Jorong Lubuk Hijau	Rokan Hulu	1 Unit	Dam Pengendali



C. TAHUN ANGGARAN 2005/2006, PELAKSANAAN TAHUN 2006

3. Lokasi Pelaksanaan GNRHL

No	Lokasi	DAS	Luas (Ha)	Jenis Kegiatan
1.	Kec. Mapat Tunggul Sel. Kenagarian Silayang Jorong Bangkok	Rokan Hulu	200	Reboisasi
2.	Kec. Mapat Tunggul Sel. Kenagarian Silayang Batu Kambing	Rokan Hulu	150	Reboisasi Pengkayang
3.	Kec. Mapat Tunggul Sel. Kenagarian Silayang Batu Kambing	Rokan	100	Hutan Rakyat
4.	Kec. Mapat Tunggul Sel. Kenagarian Silayang Jorong Bangkok	Rokan Hulu	250	Hutan Rakyat Insentif
5.	Kec. Mapat Tunggul Sel. Air Concang	Rokan Hulu	50	Hutan Rakyat Pengkayang
Total			750	
6.	Kec. Mapat Tunggul Sel. Kenagarian Silayang Jorong Bangkok	Rokan Hulu	1 Unit	Dam Pengendali
7.	Lubuk Gadang	Rokan Hulu	4 Unit	Sumur Resapan
8.	Lubuk Layang	Rokan Hulu	4 Unit	Sumur Resapan
9.	Silyang	Rokan Hulu	6 Unit	Sumur Resapan

D. TAHUN ANGGARAN 2006/2007, PELAKSANAAN TAHUN 2007

4. Lokasi Pelaksanaan GNRHL

No	Lokasi	DAS	Luas (Ha)	Jenis Kegiatan
1.	Kec. Rao Selatan kenagarian Lubuk Layang	Sumpur	150	Hutan Rakyat
2.	Kec. Lubuk Sikaping Kenagarian Sundatar Jorong Salibawan	Sumpur Hulu	50	Hutan Rakyat
3.	Kec. Duo Koto Kenagarian Andilan Jorong Setia	Rokan	150	Hutan Rakyat
Total			350	

Sumber : Dinas Kehutanan 2007


TABEL 3.7 : RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN REBOISASI

Kabupaten : Pasaman
 Propinsi : Sumatera barat
 Tahun Data : 2007

No.	Lokasi	Rencana		Realisasi	
		Luas (Ha)	Jml Pohon	Luas (Ha)	Jml Pohon
1.					
2.					
3.					
4.	Total				

Sumber : Dinas Kehutanan 2007

TABEL 3.7 : RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGHIJAUAN

Kabupaten : Pasaman
 Propinsi : Sumatera barat
 Tahun Data : 2007

No.	Lokasi	Rencana		Realisasi	
		Luas (Ha)	Jml tanaman	Luas (Ha)	Jml Tanaman
1.					
2.					
3.					
4.	Total				

Sumber : Dinas Kehutanan 2007

**TABEL SDA. 3.8 : JENIS – JENIS TUMBUHAN DI KABUPATEN PASAMAN**

1	2	3
1	Kalampaian	<i>Anthocephalus cadamba</i>
2	Sungkai Rimbo	<i>Haplophragma acrolobum</i>
3	Sapek Gadang	<i>Macaranga spruinosa</i>
4	Kundua	<i>Tetrameles nudiflora</i>
5	-	<i>Gochidion sp. 1</i>
6	Madang	-
7	Madang	<i>Alseodaphne sp.</i>
8	Tapih	<i>Canangium odoratum</i>
9	Madang lansek	-
10	Madang	<i>Endiandra sp. 1</i>
11	Balun-balun ijuak	<i>Diospyros cauliflora</i>
12	Duku Rimbo	<i>Disoxylum exelsum</i>
13	Kasai	<i>Aglaia trichostemon</i>
14	-	<i>Crataxylon sp. 1</i>
15	Tapih	-
16	lalan	<i>Santria oblongifolia</i>
17	-	-
18	Seedling pada Daerah rawa	-
19	-	<i>Batostemma sesquifolium</i>
20	Mali-mali	<i>Leea angulata</i>
21	-	<i>Zingiber sp. 1</i>
22	-	<i>Marantha grandis</i>
23	Sirih kaduak	<i>Piper sp. 1</i>
24	-	<i>Forrestia griffithii</i>
25	Anggrek tanah	<i>Calanthe sp.</i>
26	Aka tobo	<i>Dorris sp.</i>
27	-	<i>Rapidophora sp.</i>
28	Aka Ampaleh	<i>Tetraceia indica</i>
29	Kanango	<i>Canangium odoratum</i>
30	Sitawa	<i>Costus speciosus</i>
31	-	<i>Cyrtandra pendula</i>
32	Jawi—jawi	<i>Ficus microcarpa</i>
33	Balik angin	<i>Mallotus sp. 1</i>
34	Sicacang	<i>Leea sp. 1</i>
35	Sungkai rimbo	<i>Haplophragma macrolobum</i>
36	Kalek	<i>Eugenia sp. 1</i>
37	Balun ijuak	<i>Diospyros cauliflora</i>
38	Tapih	<i>Canangium odoratum</i>
39	Simasam pada	<i>Ardisia</i>
40	Jawi-jawi	<i>Ficus microcarpa</i>

Sumber : Dinas Kehutanan/sub BKSDA 2007



SAMBUNGAN SDA 3.8

41	Madang	-
42	Lalan	<i>Santiri oblongifolia</i>
43	-	<i>Gchidion sp. 1</i>
44	Kasai rimbo	<i>Aglaia</i>
45	Madang	<i>Litsea sp. 1</i>
46	Kundua	<i>Tetrameles nudiflora</i>
47	Sibasah	<i>Saurauia sp</i>
48	Kalumpang	<i>Sterculia sp</i>
49	Kasai	<i>Pometia sp.</i>



**TABEL SDA 3.9 : NAMA BURUNG / FAUNA YANG DILINDUNGI
DI KABUPATEN PASAMAN**

No.	Nama Daerah	Nama Latin	Keterangan
1	2	3	4
1	Anggang Uban	<i>Aceros comatus</i>	Dilindungi
2	Tiuang Kabau	<i>Acridoteres javanicus</i>	
3	Tiuang	<i>Acridoteres tristis</i>	
4	-	<i>Aegithina tiphia</i>	
5	Buruang Janguik	<i>Alopius bres</i>	
6	Ruak-ruak	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	
7	Anggang	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Dilindungi
8	-	<i>Anthracoceros undulatus</i>	
9	-	<i>Anthreptes singalensis</i>	
10	Layang-layang	<i>Apus affinis</i>	
11	Pipik Jantuang	<i>Araethya longirosta</i>	Dilindungi
12	Kuau	<i>Argusianus argus</i>	Dilindungi
13	Takua-takua	<i>Blythipicus rubiginosus</i>	
14	Kuntua	<i>Bubulcus ibis</i>	Dilindungi
15	Anggang	<i>Buceros bicornis</i>	Dilindungi
16	Anggang	<i>Buceros rhinoceros</i>	Dilindungi
17	Kudun	<i>Buceros vigil</i>	Dilindungi
18	-	<i>Cacomantis merulinus</i>	
19	Rajo udang	<i>Ceyx erythacus</i>	Dilindungi
20	Rajo udang	<i>Ceyx rufidorsa</i>	Dilindungi
21	Burung Daun	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	
22	Burung Daun	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	
23	Layang-layang	<i>Collocalia esculenta</i>	
24	Layang-layang	<i>Collocalia vulchanurum</i>	
25	Murai batu	<i>Copsychus malabaricus</i>	
26	Murai	<i>Copsychus saularis</i>	
27	-	<i>Copsychus canorus</i>	
28	-	<i>Cymbirhynchus macrorhynchus</i>	
29	-	<i>Dicaeum concolor</i>	
30	-	<i>Dicaeum cruentatum</i>	



SAMBUNGAN TABEL 3.9

1	2	3	4
31	-	Dicaeum trigonostigma	
32	Srigunting	Dicrurus annectans	
33	Srigunting	Dicrurus remifer	
34	Srigunting	Dicrurus sumatranus	
35	-	Eumyas thalassina	
36	-	Eurilaimus ochromalus	
37	Poksai	Garulax mitratus	Dilindungi
38	-	Hemipus hirundinaceus	
39	Layang-layang	Hydrochous gigas	
40	-	Hypogramma hypogrammicum	Dilindungi
41	Alang	Ictinaetus malayanus	Dilindungi
42	-	Indicator archipelagicus	
43	Barabah rimbo	Ixos malaccense	
44	-	Lanius tigrinus	
45	Pipik Bondo	Lonchura maja	
46	Pipik Pinang	Lonchura punctuata	
47	Salindik	Loriculus galgulus	
48	Alang	Machaeramphus alcinus	Dilindungi
49	-	Macronous gularis	
50	Punai Rimbo	Macropygia unchall	
51	Punai Rimbo	Macropygia ruficeps	
52	Tagun-tagun	Megalaima haemacephala	
53	Tagun-tagun	Megalaima chrysopogon	
54	Tagun-tagun	Megalaima australis	
55	Takua-takua	Megliptes tristis	
56	-	Microhierax fringilarius	Dilindungi
57	-	Motacila cinerea	
58	-	Orthotomus atrogularis	
59	-	Orthotomus ruficeps	

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten/ Sub BKSDA – 2007



1	2	3	4
60	-	<i>Passer montanus</i>	
61	-	<i>Pericrocotus flammeus</i>	
62	-	<i>Pericrocotus miniatus</i>	
63	-	<i>Pericrocotus solaris</i>	
64	-	<i>Phaenicophaeus chlorophaeus</i>	
65	-	<i>Phaenicophaeus javanicus</i>	
66	Takua-takua	<i>Picus canus</i>	
67	Takua-takua	<i>Picus puniceus</i>	
68	Tampuo	<i>Ploceus philiphinus</i>	
69	Latiak-latiak	<i>Prinia flaviventris</i>	
70	-	<i>Prionochilus percusus</i>	
71	Barabah	<i>Pycnonotus atriceps</i>	
72	Kutilang	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	
73	Barabah rimbo	<i>Pycnonotus brunneus</i>	
74	Barabah	<i>Pycnonotus cyanoventris</i>	
75	Barabah	<i>Pycnonotus goiavier</i>	
76	Barabah	<i>Pycnonotus melanicteris</i>	
77	Barabah sisiak	<i>Pycnonotus squamosus</i>	
78	-	<i>Sitta frontalis</i>	
79	Alang	<i>Spilomis cheela</i>	Dilindungi
80	-	<i>Zosterops atricapilla</i>	
81	-	<i>Zosterops palpebrosus</i>	

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten/ Sub BKSDA – 2007

**TABEL SDA 3.10 : MAMALIA DI KABUPATEN PASAMAN**

No.	Fauna	Nama Latin	Keterangan
1	2	3	4
1	Rusa	Cervus unicolor	
2	Kucing Lalang	Felis viverrineus	
3	Beruang Madu	Helarctos malayanus	
4	Siamang	Hylobates syndactylus	
5	Karo	Macaca fascicularis	
6	Baruak	Macaca Namestrina	
7	Kelelawar	Microchiroptera	
8	Kijang	Muntiacus muntjak	
9	Pukang	Nyctycebus coucang	
10	Harimau	Panthere tigris	
11	Kubuang	Petaurista elegans	
12	Simpai	Presbytis cristata	
13	Kaluang	Pteropus vampirus	
14	Tikus Hutan	Rattus sabanus	
15	Tupai janjang	Ratufa bicolor	
16	Tupai	Sciurus notatus	
17	Babi Hutan	Sus Vitatus	
18	Kancil	Tragulus javanicus	

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan/ Dinas Kehutanan Kabupaten/ sub BKSDA - 2007



TABEL SDA 3.11 REPTILIA DI KABUPATEN PASAMAN

No.	Fauna	Nama Latin	Keterangan
1	2	3	4
1	Kalalaso	Calotes cristatellus	
2	Ula maniak	Cyindrophis sp.	
3	Ular-ular	Colubridae	
4	Ula lidih	Dendrelaphis pictus	
5	Ula dakuak	Draco volans	
6	Bingkaruang	Malabuya multifasciata	
7	Biawak	Varanus salvator	
8	Labi-labi	Tryonix cartilagineus	

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan / Dinas Kehutanan Kabupaten/ Sub BKSDA – 2007



**TABEL SDA 3.12 : LUAS AREAL HUTAN KESEPAKATAN BERDASARKAN PETA
TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN DI KAB. PASAMAN
TAHUN 2005**

No	Jenis Hut an	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan suaka alam dan wisata (HSAW)	18.945	4,72
2.	Hutan Lindung (HL)	226.563	56,50
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	7.400	1,84
4.	Hutan Produksi (HP)	0	0
5.	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	6.200	1,54
6.	Penggunaan yang lain	142.000	35,40
	KABUPATEN PASA MAN	401.108	100,00

Sumber : Dinas Kehutanan Tahun 2007



**TABEL SDA 3.13 : LUAS AREAL HUTAN KESEPAKATAN BERDASARKAN PETA
TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN DI KAB. PASAMAN
TAHUN 2006/2007**

No	Jenis Hut an	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan suaka alam dan wisata (HSAW)	18.945	4,8
2.	Hutan Lindung (HL)	226.563	57,39
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	7.400	1,87
4.	Hutan Produksi (HP)	0	0
5.	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	6.200	1,57
6.	Penggunaan yang lain	135.655	34,36
	KABUPATEN PASAMA N	3.947.763	100

Sumber : Dinas Kehutanan Tahun 2007



**TABEL 3.14 : PERINCIAN LUAS LAHAN MENURUT PENGGUNAANNYA DI
KABUPATEN PASAMAN**

No	Keterangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Perkampungan	7.190	1,80
2.	Kawasan Industri	300	0,01
3.	Sawah :		
	a. Irigasi	16.460	4,10
	b. Tadah Hujan	10.073	2,51
4.	Tegalan/Ladang	8.211	2,05
5.	Perkebunan		
	a. Besar	212	0,05
	b. Rakyat	26.026	6,49
	c. Campuran	6.929	1,73
6.	Hutan	190.453	47,48
7.	Tanah belukar/alang-alang	37.341	9,31
8.	Tanah rusak	7.992	1,99
9.	Pengairan	5.893	1,47
10.	Padang rumput	436	0,11
11.	Hutan sejenis	81.622	20,35
12.	Lain-lain	2.240	0,55
	KABUPATEN PASAMAN	401.108	100,00

Sumber : Analisa Data Pokok Pembangunan Kab.Pasaman BAPPEDA 2006



TABEL SDA . 3.15. PERINCIAN KETERSEDIAAN TANAH DI KABUPATEN PASAMAN

No	KECAMATAN	Lokasi/Nagari	LUAS (Ha)	Status Tanah	Penggunaan Tanah	Lereng (%)	Ketinggian Dpl (m)	Jenis Tanah	Kedalaman Efektif Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	TIGO NAGARI	1. Malampah 2. Ladang Panjang 3. Binjai	2200 1200 800 700 900 1100 <u>600</u> 7500	Uayat Uayat Uayat Uayat Uayat Uayat	Hutan Belukar Hutan Belukar Hutan Belukar Kebun Belukar Hutan belukar Semak belukar	25-40 % 15-25 % 8-15 % 25-40 % 25-40 % 15-25 % 8-15 %	100-500 100-500 25-100 	Tanah - -	> 90 cm > 90 cm > 90 cm
2.	DUO KOTO	1. Simp. Torang 2. Cubadak	3200 1700 1700 1800 <u>1100</u> 9500	Uayat Uayat Uayat Uayat Uayat	Hutan Belukar Hutan Belukar Hutan Belukar Belukar, karet, Alang-alang Belukar, 	25-40 % 15-25 % 8-15 % 25-40 % 15-25 %	500-1000 500-1000 	- -	> 90 cm > 90 cm
3.	MT. SELATAN	Silayang	600 900 1500	Uayat Uayat	Tegalan, karet ladang, Karet,	25-40 % 15-25 %	500-1000	- Komple tanah podoslik	> 90 cm
4.	RAO	1. Languang 2. Koto Rajo 3. Koto Nopan	300 200 1000 400 <u>1400</u> 3300	Uayat Uayat Uayat Uayat Uayat	Alang-alang Alang-alang Alang-alang, Alang-alang Alang-alang, Alang-alang	25-40 % 15-25 % 25-40 % 15-25 % 25-40 %	500-1000 500-1000 500-1000 500-1000	- - - - -	> 90 cm > 90 cm 60-90 cm
	Jumlah		21800						

**TABEL.3.16. JENIS KERUSAKAN HUTAN DI KEC. TIGO NAGARI**

No.	Kenagarian/ Jorong	Jenis Kerusakan Hutan (Ha)				Ket
		Penebangan Liar	Lahan Kritis	Ladang Berpindah	Kebun	
1.	Binjai					
	1. Binjai	0	800	12	0	
	2. Padang Kubu	0	400	10	0	
	3. Padang Sawah	0	15	0	0	
	4. Tarantang Tunggang	25	10	20	0	
	<i>Jumlah</i>	<i>25</i>	<i>1.225</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	
2.	Malampah					
	1. Siparayo	0	50	50	0	
	2. Bungo Tanjung	15	0	50	0	
	3. Kampung Tabek	0	15	0	0	
	4. Kampung Lintang	0	20	0	0	
	<i>Jumlah</i>	<i>15</i>	<i>85</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	
3.	Ladang Panjang					
	1. Kampung Kajai	0	0	0	0	
	2. Parit Lubang	0	0	0	0	
	3. Parit Batu	0	0	0	0	
	4. Pasar Ladang Panjang	30	50	0	0	
	<i>Jumlah</i>	<i>30</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Jumlah Kecamatan		70	1.360	142	0	

**Tabel.3.17. JENIS KERUSAKAN HUTAN DI KECAMATAN BONJOL**

No.	Kenagarian/ Jorong	Jenis Kerusakan Hutan (Ha)				Ket
		Penebangan Liar	Lahan Kritis	Ladang Berpindah	Kebun	
1.	Ganggo M udik					
	1. Koto Tengah	0	0	50	20	
	2. Biduk	0	0	350	0	
	3. Kampung Belimbing	0	0	30	0	
	4. Kampung Baru	0	0	0	0	
	5. Kampung Alai	0	0	0	0	
	6. Kampung Tampang	0	0	0	0	
	7. Lubuk Ambacang	0	0	0	0	
	<i>Jumlah</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>20</i>	
2.	Ganggo Hilia					
	1. Musus	0	0	30	0	
	2. Padang La weh	0	0	0	0	
	3. Padang Baru	0	0	20	0	
	4. Tanjung Balai	0	0	0	0	
	5. Kampung Jambak	0	0	0	0	
	6. Kampung Koto	0	0	0	0	
	7. Pasar Bonjol	0	0	0	0	
	8. Caniago	0	0	35	0	
	9. Kampung Talang	0	0	0	0	
	10. Tanjung Bungo	0	0	35	0	
	11. Padang Bubus	0	0	20	0	



	12. Sianok	0	0	0	0	
	<i>Jumlah</i>	0	0	140	0	
3.	Limo Koto Kumpulan					
	1. BB Utara	0	0	0	0	
	2. Air Abu	0	0	0	0	
	3. Pandam	0	0	0	0	
	4. BB Selatan	0	20	0	0	
	5. Melayu	0	0	0	0	
	<i>Jumlah</i>	0	20	0	0	
4.	Koto Kaciak					
	1. Tabing	0	0	0	0	
	2. Koto Tuo	0	0	0	0	
	3. Parik Gadang	0	500	0	0	
	4. Lungguak Batu	0	200	0	0	
	5. Kampung Angus	0	50	0	0	
	<i>Jumlah</i>	0	750	0	0	
5.	Koto Alahan Mati					
	1. Bukik Malintang	0	0	75	0	
	2. Pasar	0	0	0	0	
	3. Guguk Silareh Aiah	0	0	25	0	
	4. Pinang Batupang	0	0	30	0	
	<i>Jumlah</i>	0	0	130	0	
6.	Simpang					
	1. Simpang Hilia	0	0	50	0	
	2. Sawah Laweh	0	0	50	0	



	3. Simpang Tigo	0	0	15	10	
	4. Mudik Simpang	0	0	250	55	
	<i>Jumlah</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>365</i>	<i>65</i>	
	Jumlah Kecamatan	0	750	1.095	85	

**Tabel. 3.18. JENIS KERUSAKAN HUTAN DI KECAMATAN PANTI**

No.	Kenagarian/ Jorong	Jenis Kerusakan Hutan (Ha)				Ket
		Penebangan Liar	Lahan Kritis	Ladang Berpindah	Kebun	
1.	Panti					
	1. Murni Panti	0	0	0	0	
	2. Petok	150	0	0	0	
	3. Ampang Gadang	0	350	0	0	
	4. Sentosa Panti	0	0	0	0	
	5. Bahagia Panti	0	0	35	0	
	6. Kuamang	100	0	0	0	
	7. Lundar	0	0	50	0	
	<i>Jumlah</i>	<i>250</i>	<i>350</i>	<i>85</i>	<i>0</i>	
2.	Padang Gelugur					
	1. Bahagia	75	50	0	0	
	2. Makmur	0	0	0	0	
	3. Sentosa	50	0	0	0	
	4. Selamat	0	0	150	0	
	<i>Jumlah</i>	<i>125</i>	<i>50</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	
Jumlah Kecamatan		375	400	235	0	

**TABEL.3.19. JENIS KERUSAKAN HUTAN DI KECAMATAN RAO**

No.	Kenagarian/ Jorong	Jenis Kerusakan Hutan (Ha)				Ket
		Penebangan Liar	Lahan Kritis	Ladang Berpindah	Kebun	
1.	Koto Nopan					
	1. Kn. Lembah	10	0	0	50	
	2. Kn. Pasar	5	0	0	100	
	3. Kn. Bukit	5	0	0	50	
	4. Pasar Kamis	15	0	0	100	
	5. Botung	5	0	0	100	
	6. Janji Saroha	5	0	0	50	
	7. Gunung Manahan	9	0	0	150	
	8. Pagaran Tj. Botung	0	500	0	200	
	<i>Jumlah</i>	<i>54</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	
2.	Tarung-tarung					
	1. Pacuan Tampang	200	500	0	0	
	2. Ps. Rao Heler	0	0	0	0	
	3. Huta Nauli-Kp.Kering	0	0	0	0	
	4. Kampung Tongah	0	0	0	0	
	5. Pulau-Kb. Catu	0	0	0	0	
	6. Petani-Sorik	0	0	0	0	
	7. Simpang-Kp. Baru	0	0	0	0	
	8. S. Manih-Tingkarang	125	0	35	0	
9. Panchahan-M orokan Pertemuan	275	0	0	0		
	<i>Jumlah</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
3.	Padang Mantinggi					
	1. Sei. Raya	0	0	0	0	
	2. Padang M antinggi	0	0	0	0	
	3. Pertanian	0	0	100	0	
	4. Sumpadang	0	0	130	0	
	5. Sumpadang Baru	0	0	125	0	
	6. Lubuak Aro	0	0	50	150	
	7. Polongan Duo	0	0	0	345	
	8. Penyenggerahan	0	1.500	0	175	
9. M uaro Cubadak	0	350	75	115		
	<i>Jumlah</i>	<i>0</i>	<i>1.850</i>	<i>480</i>	<i>0</i>	



4.	Koto Rajo				
	1. Koto Rajo I	0	10	0	25
	2. Koto Rajo II	0	0	0	35
	3. Koto Rajo Baruah	0	10	0	10
	4. Koto Baru	0	25	0	25
	5. Muaro Mago	0	0	0	25
	6. Rumbio	0	6	0	30
	7. Batu Tinggi	0	510	0	40
	8. Simamonen Hilir	0	1.500	0	15
	<i>Jumlah</i>	<i>0</i>	<i>2.061</i>	<i>0</i>	<i>205</i>
5.	Lansek Kadok				
	1. Lansek Kadok	0	0	0	0
	2. Koto Panjang	0	1.500	0	0
	3. Rambah	0	0	0	0
	4. Beringin	150	0	0	0
	5. Koto Nopan Setia	150	0	0	0
	<i>Jumlah</i>	<i>300</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	Lubuak Layang				
	1. Lubuk Layang I	0	0	0	0
	2. Lubuk Layang II	0	0	0	0
	3. Padang Nunang	0	0	0	0
	4. Kubu	225	0	375	0
	5. Curanting	0	0	75	0
	6. Tanjung Air	0	0	50	0
	7. Kampung Tuan	0	0	125	0
	8. Simpang Empat	0	0	35	0
	9. Abam	0	2.000	125	0
7.	Languang				
	1. Languang I	10	15	0	0
	2. Languang II	5	5	0	0
	3. Lubuk Hijau	2	1.100	0	0
	4. Sungai Ranyah Mudik	0	800	0	0
	5. Sungai Ranyah Hilir	0	500	0	0
	6. Simamonen Mudik	0	5.000	0	0
	7. Muaro Sitabu	10	20	0	0
	8. Gantiang	0	325	0	0
	<i>Jumlah</i>	<i>27</i>	<i>10.525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Jumlah Kecamatan		1.206	18.436	1.269	1.005

**TABEL.3.20 : JENIS KERUSAKAN HUTAN DI KEC. MAPAT TUNGGUL**

No.	Kenagarian/ Jorong	Jenis Kerusakan Hutan (Ha)				Ket
		Penebangan Liar	Lahan Kritis	Ladang Berpindah	Kebun	
1.	Muara Tais					
	1. Rumbai	0	10	0	150	
	2. Sungai Belut	190	0	0	215	
	3. Muara Tais	40	20	0	175	
	4. Kampung Tengah	20	500	0	265	
	5. Benai	300	500	0	310	
	6. Botung Busuk	10	2.500	0	215	
	7. Sibantaian	10	16.200	0	175	
	8. Kubu Baru	10	12.000	0	187	
	9. Soma	75	10	0	425	
	<i>Jumlah</i>	<i>650</i>	<i>31.740</i>	<i>0</i>	<i>2.027</i>	
2.	Lubuk Gadang					
	1. Lubuk Gadang	0	19.000	200	400	
	2. Marapan	0	10.000	150	300	
	3. Guo Siayung	0	10.000	100	200	
	<i>Jumlah</i>	<i>650</i>	<i>39.000</i>	<i>450</i>	<i>900</i>	
	Jumlah Kecamatan	650	70.740	450	2.927	

**TABEL 3.21 : JENIS KERUSAKAN HUTAN DI KEC. MPT. TUNGGUL SEL**

No.	Kenagarian/ Jorong	Jenis Kerusakan Hutan (Ha)				Ket
		Penebangan Liar	Lahan Kritis	Ladang Berpindah	Kebun	
1.	Sungai Lolo					
	1. Muaro	0	300	50	250	
	2. Sungai Lolo	0	50	25	100	
	3. Pangian	0	75	50	200	
	4. Rotan Getah	0	2.500	100	350	
	5. Pertemuan	0	3.000	125	300	
	6. Sopan	0	3.500	50	150	
	<i>Jumlah</i>	<i>0</i>	<i>9.425</i>	<i>400</i>	<i>1.350</i>	
2.	Silayang					
	1. Titian Batu	0	25	15	300	
	2. Aur Kuning	0	15	20	250	
	3. Batang Silayang	0	15	25	500	
	4. Tigo Koto	0	60	40	200	
	5. Bangkok	0	25	30	215	
	<i>Jumlah</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>130</i>	<i>1.465</i>	
Jumlah Kecamatan		0	9.565	530	2.815	

**TABEL.3.22 : LUAS DAN PENYEBARAN KELAS LERENG**

No.	Kemiringan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Datar (0 – 2%)	141.178	35.20
2.	Bergelombang (3 – 15%)	16.104	4.04
3.	Curam (16 – 40%)	49.828	12.42
4.	Sangat Curam (> 40%)	194.088	48.34
	Jumlah	401.108	100.00

Sumber : BPN Kab.Pasaman-2007

**TABEL.3.23 : LUAS DAN JENIS TANAH**

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Ket
1	2	3	4
1.	Tanah Andosol dari batuan beku pada pegunungan Vulkanis	26.732	
2.	Tanah Podsolik Coklat dari bahan alluvial pada pegunungan patahan yang tinggi	72.354	
3.	Tanah Podsolik Merah Kuning dan Latosol dari batuan pada pegunungan Vulkanis	3.261	
4.	Tanah Alluvial dari bahan alluvial	31.458	
5.	Komplek tanah organosol dan glei humus dari bahan alluvial	16.865	
6.	Tanah Litosol dan Regosol dari batuan beku	33.187	
7.	Tanah Litosol dari bahan alluvial dari batuan beku pegunungan vulkanik	108.332	
8.	Komplek tanah Podsolik Merah Kuning – Latosol dan Litosol dari batuan beku endapan metamorf pada pegunungan patahan yang rendah	105.658	
9.	Tanah Andosol dari batuan beku	3.261	
	Jumlah	401.108	

Sumber : BPN Kab.Pasaman-2006

**Tabel.3.24. LUAS LAHAN KERING MENU RUT PENGGUNAANNYA**

No.	Kecamatan	Pekarangan (Ha)	Tegal/ Kebun (Ha)	Ladang/ Huma (Ha)	Pengembalaan/ Pdg.rumput (Ha)	Sementara Tdk diusahakan (Ha)	Ditanami Pohon/ hutan rakyat (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tigo Nagari	630	1.518	0	53	6.321	11.406
2.	Bonjol	427	350	400	22	4.390	1.160
3.	Lubuk Sikaping	772	4.025	0	42	172	14.818
4.	Panti	328	480	175	0	1.111	1.203
5.	Padang Gelugur	278	2.098	50	0	0	0
6.	Simpang A lahan Mati	203	208	93	7	1.692	328
7.	Rao	132	4.723	0	0	0	6.838
8.	Rao Utara	79	571	4.848	480	0	5.260
9.	Rao Selatan	105	667	4.130	100	0	7.208
10.	Duo Koto	1.340	2.156	0	0	0	0
11.	Mapat Tunggul	45	1.825	489	0	150	0
8.	M pt.Tgl Selatan	44	2.300	267	0	142	0
	Jumlah	4.383	20.921	10.452	704	13.978	48.221

Sumber :Kecamatan Dalam Angka – 2006

**TABEL SDA 3.25. NAMA – NAMA SUNGAI DAN WILAYAH YANG DILALUI DI KAB. PASAMAN**

No.	SUNGAI	KECAMATAN
1	2	3
1	Batang Patimah	Tigo Nagari – Kabupaten Pasaman Barat
2	Batang Panso	Tigo Nagari
3	Batang Maringging	Tigo Nagari
4	Batang Landu	Tigo Nagari
5	Batang Bindalik	Tigo Nagari
6	Batang Talo	Tigo Nagari
7	Batang Pagadih	Tigo Nagari
8	Air Tawar	Tigo Nagari
9	Batang Likek	Tigo Nagari
10	Air Angek	Tigo Nagari
11	Air Lundang	Tigo Nagari
12	Batang Kularian	Tigo Nagari
13	Batang Kilangan	Tigo Nagari
14	Air Talang	Tigo Nagari
15	Batang Langkok	Tigo Nagari
16	Batang Tapa	Tigo Nagari
17	Batang Bangan	Tigo Nagari
18	Batang Malindai	Tigo Nagari
19	Batang Manggio	Tigo Nagari
20	Batang Kasok	Tigo Nagari
21	Batang Bindalik Kaciak	Tigo Nagari
22	Batang Likek Mati	Tigo Nagari
23	Batang Kumpulan	Simpat – Bonjol
24	A. Air Lima u Karetan	Simpat – Bonjol
25	A. Air Timaram	Simpat – Bonjol
26	Batang Al. Panjang	Bonjol
27	Batang Manggani	Bonjol
28	Batang Silasung	Bonjol
29	Batang Musus	Bonjol
30	Batang Air Dareh	Bonjol
31	Batang Bubus	Bonjol
32	A. Air Sungai Lima u	Bonjol

Sumber : Dinas PU dan PSDA Tahun 2007



SAMBUNGAN TABEL SDA 3.25

No.	SUNGA I	KECAMATAN
1	2	3
33	A. Air Angek	Bonjol
34	A. Air Landu	Bonjol
35	A. Air Bisø	Bonjol
36	A. Air Talang	Bonjol
37	A. Air Lasi	Bonjol
38	A. Air Parigi	Bonjol
39	A. Air Simpai	Bonjol
40	A. Air buluh	Bonjol
41	A. Air Karambo	Bonjol
42	A. Air Langkuh	Bonjol
43	A. Air Marumuk	Bonjol
44	A. Air Sungai Hitam	Bonjol
45	Batang Sumpur	Lb. Sikaping – Panti – Pd. Gelugur – Rao Selatan– Mapat Tunggul
46	Batang Panningalan	Lb. Sikaping
47	Batang Pakau	Lb. Sikaping
48	Batang Anang	Lb. Sikaping
49	Batang Mauh	Lb. Sikaping
50	Batang Pamikin	Lb. Sikaping
51	Batang Salibawan	Lb. Sikaping
52	Air Terung	Lb. Sikaping
53	Batang Dalik	Lb. Sikaping
54	Batang Paraman	Lb. Sikaping
55	Batang Sibangka	Lb. Sikaping
56	Batang Mapun	Lb. Sikaping
57	Air Langsek	Lb. Sikaping
58	Batang Sopan	Lb. Sikaping
59	Air Tabek	Lb. Sikaping
60	Batang Tikalak	Lb. Sikaping
61	Batang Pegang	Lb. Sikaping
62	Batang Panjagoan	Lb. Sikaping
63	Air Mandul	Lb. Sikaping
64	Batang Pamenan	Lb. Sikaping
65	Sungai Durian	Lb. Sikaping
66	Air Kampung Padang	Lb. Sikaping
67	Batang Pagariang	Lb. Sikaping



SAMBUNGAN TABEL SDA 3.25

1	2	3
68	Batang Air Sarik	Panti
69	Batang Mapun	Panti
70	Batang Sianik	Panti
71	Batang Pagadih	Panti
72	Batang Kenari	Panti
73	Batang Lambak	Panti
74	Batang Tambangan	Panti
75	Batang Petok	Panti
76	Batang Rambah	Panti
77	Batang Botan	Panti
78	Batang Panti	Panti
79	Batang Kuamang	Panti
80	Batang Sontang	Panti
81	Batang Lundar	Panti
82	Sei. Beliung	Panti
83	Batang Air Malau	Panti
84	Sei. Gelogah	Panti
85	Batang Piagan	Panti
86	Batang Subaling	Panti
87	Batang Padang Beriang	Panti
88	Batang Pasaman	Duo Koto – Kabupaten Pasaman Barat
89	Batang Barilas	Duo Koto
90	Batang Bahanon	Duo Koto
91	Batang Batu Ranai	Duo Koto
92	Batang Sialang	Duo Koto
93	Batang Garingging	Duo Koto
94	Batang Mangkuman	Duo Koto
95	Batang Andilan	Duo Koto
96	Batang Karanok	Duo Koto
97	Batang Tuhur	Duo Koto
98	Air Simpang Torang	Duo Koto
99	Batang Pagaran	Duo Koto
100	Batang Paraman	Duo Koto
101	Batang Lanai	Duo Koto
102	Batang Tambang	Duo Koto



SAMBUNGAN TABEL SDA 3.25

1	2	3
103	Batang Sinabuan	Duo Koto
104	Sei. Deras	Rao
105	Batang Asik	Rao
106	Batang Sibina il	Rao
107	Air Pandak	Rao
108	Batang Simisuah	Rao
109	Batang Tingkarang	Rao
110	Batang Beringin	Rao
111	Sei. Nyiur	Rao
112	Sungai Lolo	Mapat Tunggul Selatan
113	A. Air Kijang	Mapat Tunggul Selatan
114	Air Baluang	Mapat Tunggul Selatan
115	Air Parik	Mapat Tunggul Selatan
116	Batang Silayang	Mapat Tunggul Selatan
117	Batang matundak	Mapat Tunggul Selatan
118	Sungai Taeh	Mapat Tunggul
119	Air Sialang	Mapat Tunggul
120	A. Air Rambai	Mapat Tunggul
121	Sungai Baluik	Mapat Tunggul
122	Sungai Sirah	Mapat Tunggul
123	A. Gud	Mapat Tunggul
124	Sungai cacak	Mapat Tunggul
125	Air Ampalu	Mapat Tunggul

**TABEL SDA 3.27. a: SUMBER AIR BAKU DAN PRODUKSI AIR BERSIH PDAM**

Kabupaten : Pasaman
 Propinsi : Sumatera Barat
 Tahun Data : Juni 2006 s/d 2007

No.	Sumber dan Produksi	Kapasitas Terpasang Liter/ Detik
1.	Sungai	74
2.	Air Tanah	0
3.	Mata Air	52,5
4.	Lain-lain	0
Total Produksi Air bersih PDAM		126,5

Sumber : PDAM tahun 2007

TABEL SDA . 3.27. b : DISTRIBUSI AIR BERSIH PDAM MENURUT JENIS PELANGGAN

Kabupaten : Pasaman
 Propinsi : Sumatera Barat
 Tahun Data : Juni 2006 s/d 2007

No.	Uraian	Jumlah	Volume (m ³ /Tahun)
1.	Kelompok I	159	71.112
2.	Kelompok II	669	153.567
3.	Kelompok III	6.327	2.255.085
4.	Kelompok IV	1.682	266.031
5.	Lain-lain	-	-
	Jumlah	8.837	2.745.795

Sumber : PDAM tahun 2007

TABEL SDA . 3.27. c : MANFAAT AIR TANAH BERDASARKAN JENIS KEGIATAN

Kapupaten : Pasaman
 Propinsi : Sumatera Barat
 Tahun Data : Juni 2006 s/d 2007

No.	Pelanggan	Jumlah	Volume (m ³ /Tahun)
1.	Industri	-	-
2.	Rumah sakit	-	-
3.	Hotel	-	-
4.	Rumah tangga	-	-
5.	Lain-lain	-	-

Sumber : PDAM tahun 2007

**Tabel. 3.28 : DATA HUJAN HARIAN TAHUN 2006**

Lokasi : Pos Hujan Bonjol
 Kabupaten : Pasaman
 Propinsi : Sumatera Barat
 Tahun Data : 2006

Bulan/ Tanggal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	0	0	0	3	11	70	0	13	21	10	2	23
2.	0	0	0	6	0	0	0	4	2	11	1	0
3.	0	0	0	19	0	0	0	0	40	0	14	0
4.	0	31	13	36	1	6	0	6	1	17	7	0
5.	0	10	45	30	0	0	0	0	43	5	26	0
6.	0	11	8	33	29	53	0	0	5	14	1	0
7.	0	74	11	0	46	10	0	0	24	0	8	0
8.	0	6	21	2	48	0	0	21	0	1	3	0
9.	5	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	35
10.	4	2	0	28	28	0	0	0	0	5	0	0
11.	2	0	0	9	0	0	0	0	7	0	2	35
12.	2	0	0	31	0	0	0	0	11	0	100	94
13.	0	0	0	2	0	13	0	0	0	0	0	0
14.	35	0	0	30	0	2	0	0	0	0	0	0
15.	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	4	0	0	68	25	0	13	5	3	3	0	0
17.	13	44	0	7	0	0	2	0	22	0	0	0
18.	13	3	0	32	4	0	5	0	0	9	0	125
19.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45
20.	0	2	73	34	17	0	5	0	0	28	0	0
21.	0	0	1	3	0	0	18	7	13	17	0	6
22.	1	0	25	54	51	0	0	3	65	10	14	0
23.	43	1	3	27	0	0	5	0	0	35	1	0
24.	2	13	0	0	0	0	15	0	20	0	0	49
25.	5	22	9	83	0	0	0	16	3	14	26	54
26.	45	0	1	3	7	11	2	4	4	10	0	33
27.	9	38	0	27	6	58	0	4	3	23	1	22
28.	9	0	0	39	11	59	0	0	33	64	10	3
29.	9	0	0	9	0	8	43	17	3	22	0	7
30.	4	0	23	5	0	0	0	0	56	0	17	0
31.	10	0	3	0	11	0	11	0	0	0	0	20
Jumlah	215	263	250	251	296	290	119	100	379	298	233	551

Keterangan : 0 : Tidak ada hujan
 Hujan dalam satuan milimeter

Sumber : Klimatologi Kelas II Sicinán.

**TABEL SDA 3.18 : MAMALIA DI KABUPATEN PASAMAN**

No.	Fauna	Nama Latin	Keterangan
1	2	3	4
1	Rusa	Cervus unicolor	
2	Kucing Lalang	Felis viverrineus	
3	Beruang Madu	Helarctos malayanus	
4	Siamang	Hylobates syndactylus	
5	Karo	Macaca fascicularis	
6	Baruak	Macaca Namestrina	
7	Kelelawar	Microchiroptera	
8	Kijang	Muntiacus muntjak	
9	Pukang	Nyctycebus coucang	
10	Harimau	Panthere tigris	
11	Kubuang	Petaurista elegans	
12	Simpai	Presbytis cristata	
13	Kaluang	Pteropus vampirus	
14	Tikus Hutan	Rattus sabanus	
15	Tupai janjang	Ratufa bicolor	
16	Tupai	Sciurus notatus	
17	Babi Hutan	Sus Vitatus	
18	Kancil	Tragulus javanicus	

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan / Dinas Kehutanan Kabupaten/ sub BKSDA - 2007

**TABEL SDA 3.19 : REPTILIA DI KABUPATEN PASAMAN**

No.	Fauna	Nama Latin	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kalalaso	Calotes cristatellus	
2	Ula maniak	Cylindrophis sp.	
3	Ular-ular	Colubridae	
4	Ula lidih	Dendrelaphis pictus	
5	Ula dakuak	Draco volans	
6	Bingkaruang	Malabuya multifasciata	
7	Biawak	Varanus salvator	
8	Labi-labi	Tryonix cartilagineus	

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan / Dinas Kehutanan Kabupaten/ sub BKSDA - 2007

**TABEL.3.20 : LOKASI RAWAN BENCANA PADA TAHUN 2007**

NO	KECAMATAN	NA G A R I	JORONG/DESA
1.	Rao Utara	Koto Nopan	1. Pakan Kamis 2. Jorong Koto Nopan 1 3. Jorong Koto Nopan 2
		Koto Rajo	1. Batu Tinggi 2. Rumisio 3. Koto Rajo 1 4. Koto Rajo 2 5. Koto Bonu 6. Muao Bungo
		Languang	1. Muaro Sitebu 2. Muaro Languang 3. Ganting
2.	Rao Selatan	Lubuak Layang	1. Lubuak Layang 2. Pasar Baru 3. Padang Nunang 4. Tikarang 5. Rambah
3.	Rao	Lansek Kadap	1. Kampung Baru 2. Sip. Lansak Kadap Pulau 3. Simp. Empat Tarung-tarung 4. Koje
4.	Panti	Panti	1. Petok 2. Padang Petok 3. Kampung Petok



Sambungan Tabel 3.20

5.	Lubuk Sikaping	Air Manggis Durian Tinggi	1. Sungai Pandahan 2. Pilubang 1. Tampang 2. Panapa
6.	Tigo Nagari	Malampah	1. Padang Tinggi 2. Gugung 3. Pandan
7.	Simpang Alahan Mati	Alahan Mati	1. Limpato 2. Parit Rontang 3. Sungai Timbatan 4. Alahan Mati 5. Bukit Melintang 6. Batu Kangkung
8.	Padang Gelugur	Padang Gelugur	1. Suka Ramai 2. Aek Bargot 3. Binibabaru 4. Durian Kadap 5. Tanjung Aro 6. Pegangan Baru 7. Sungai jantan 8. Suka Damai 9. Kampaung Sum ur 10. Kampung Tinggal 11. Maninjau 12. Jorong VI Soriak



Sambungan Tabel 3.20

9.	Bonjol	Gangga Mudiak	1. Lubuak Lianggo 2. Belimbing 3. Pulau Pinang Sungai Limau 4. Pandan
		Ganggo Hilia	1. Lubuak Ambacang 2. Ungguk

Sumber : Kantor Kesbang Pol Kab.Pasaman tahun 2007



**TABEL 3.21 : TABEL NAMA SUNGAI RAWAN BANJIR PADA TAHUN 2007
DI KABUPATEN PASAMAN**

No	KECAMATAN	NAMA SUNGAI
1.	Rao Selatan	Air Sabinah
2.	Rao	Sungai Tikarang
3.	Panti	Batang Sumpur
4.	Padang Gelugur	1. Air banca Ulang 2. Batang Pegang
5.	Lubuk Sikaping	Batang Sumpur
6.	Rao Utara	1. Batang Asih 2. Batang Patah 3. Batang Air Mati
7.	Tigo Nagari	1. Batang Boamah 2. Batang Patimah
8.	Simpang Alahan Mati	1. Air Taran 2. Batang Simpat
9.	Bonjol	Batang Alahan Panjang

Sumber : Kantor Kesbang Pol Kab. Pasaman tahun 2007

**TABEL3.22 : LOKASI RAWAN BENCANA LONGSOR/GERAKAN TANAH DI KABUPATEN PASAMAN**

No	KECAMATAN	NA GARI	JORONG/DESA
1.	Tigo Nagari	Malampah	1. Geregeh 2. Batung 3. Maringging
2.	Panti	Panti	1. Batu Amapar
3.	Mapat Tunggul	Pintu Padang	1. Bukit Surangan

Sumber : kantor kesbang Politik Tahun 2007



sebagai sumber benih yang dibutuhkan. Pengembangan ini disertai dengan upaya untuk memproduksi pakan dengan menggunakan bahan baku yang tersedia di sekitar lokasi budidaya. Komoditas yang dikembangkan adalah ikan yang mudah hidup dan secara umum disenangi oleh masyarakat seperti lele, nila, tawes dan ikan emas.

Secara lebih rinci program pembangunan perikanan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat nelayan, petani/ pembudidaya ikan dalam peningkatan produksi dan pendapatan
- b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan
- c. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya perikanan dan ekosistemnya
- d. Pengembangan Teknologi Dan Sistem Informasi
- e. Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur dan Penguatan Kelembagaan
- f. Penyerasian Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sehubungan dengan Otonomi Daerah
- g. Pengembangan Kerjasama antar wilayah

Sektor Kehutanan

Sesuai dengan undang-undang Nomor 38 tahun 2003, tentang pemekaran beberapa Kabupaten di propinsi Sumatera Barat, maka Kabupaten Pasaman memulai pembangunan disegala bidang. Hal ini didukung oleh wilayahnya yang



luas mencapai 9,48 % dari luas Sumatera Barat serta kaya dengan berbagai sumber daya alam.

Bedasarkan Undang - undang Nomor 41 tentang kehutanan dimana pembangunan kehutanan pada dasarnya bertujuan membangunkan kawasan hutan untuk meningkatkan daya produksi dengan tetap menjaga kelestariannya. Seperti kita ketahui, hutan mempunyai fungsi yang sangat penting dimuka bumi ini, diantaranya fungsi ekonomi, dalam perlindungan tanah, perlindungan kawasan tadahan air, perlindungan *biodiversity*, dan kestabilan iklim/cuaca. Disamping itu, hutan juga berfungsi sebagai tempat rekreasi dan pendidikan (**Ismail Ahmad dan Yaakob Mohd Jani, 1994**). Mengingat fungsi hutan yang begitu penting maka dalam proses pembangunan kehutanan, hutan tidak hanya dipandang dari sudut ekonomis bagi mendatangkan keuntungan tapi fungsinya jangka panjang menyelamatkan kehidupan umat manusia, kerana itu pembangunan kehutanan mestilah mempertimbangkan aspek kelestariannya. Kenyataan sudah terlihat, bahwa pengelolaan hutan yang tidak mempertimbangkan aspek kelestariannya telah menimbulkan berbagai dampak bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, longsor.

Ancaman Kerusakan Hutan

Hutan sebagai sumber daya alam yang tak ternilai harganya, disamping sebagai sumber ekonomi namun yang tak kalah pentingnya ia bertindak sebagai menjaga keseimbangan ekologi. Pengelolaan hutan tanpa mempertimbangkan aspek konservasi dan kelestariannya tentunya akan mengancam keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup



(**Surtahman Kastin Hasan, 1997**). Sehubungan dengan itu, Kabupaten Pasaman yang kaya dengan keberadaan sumber daya alam tidak terlepas dari ancaman kerusakan hutan, seandainya pengelolaan sumber daya alamnya tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Beberapa permasalahan yang akan timbul akibat kerusakan hutan, misalnya penebangan hutan illegal, eksploitasi hutan secara sewenang-wenang. sehingga meningkatkan keluasan lahan kritis, rusaknya hutan pada hulu sungai yang berdampak pada kerusakan DAS, erosi, tanah, longsor, banjir dan lain-lain.

Selain itu, beberapa alternatif solusi berkaitan upaya pemba nguna n kehutanan dan pelestariannya di Kabupate n Pasaman adalah:

- Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung, bertujuan untuk mempertahankan fungsi hidrologis DAS
- Reboisasi hutan lindung bertujuan untuk meningkatkan mutu hutan lindung dan meningkatkan daya pulih fungsi ekosistem hutan lindung.
- Monitoring dan pengawasan perusahaan yang mendapat HPH dan IPK, pemantauan dan pengawasan penebangan kayu illegal.
- Penerapan peraturan yang ketat dan sanksi hukum yang tegas bagi setiap pelanggaran pengrusakan hutan, terutama hutan lindung dan cagar alam
- Mengembangkan hutan rakyat untuk melindungi ekosistem hutan dan manfaat penguasaan hutan secara lestari.
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat menjaga kelestarian hutan melalui penyuluhan, termasuk penyuluhan tentang bencana alam.



Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan Hutan di Kabupaten Pasaman dapat dilihat dibawah ini :

No	Komponen Pelayanan	Arah dan Kebijakan	Strategi dan Prioritas
1.	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan b. Mendorong peran serta masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan
		Peningkatan kualitas aparatur kehutanan	a. Meningkatkan prasarana penunjang pengelolaan sektor kehutanan b. Meningkatkan SDM aparat pengelola hutan
2.	Reboisasi dan konservasi lahan, tanah dan air	Rehabilitasi hutan, reboisasi, Pemanfaatan lahan kritis,	a. Mencegah meluasnya lahan kritis dan lahan tidur. b. Melaksanakan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah c. Mengembangkan hutan rakyat d. Mengembangkan agroforestry
3	Moratorium Hutan	Kajian konservasi hutan	a. Mengembangkan kajian pengelolaan dan pembangunan hutan berkelanjutan



Sektor Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Pasaman yang merupakan sub sektor pertanian sangat produktif dengan areal penggunaan lahannya seluas 33.167 Ha atau 8,4 % dari luas penggunaan lahan seluruhnya dapat berfungsi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan, sawah dan tegalan seluas 34.744 Ha atau 8,7 % sebagai ketahanan bahan pangan daerah. Namun, perkembangan areal perkebunan di daerah ini masih memungkinkan dengan adanya konservasi lahan terhadap tanah belukar dan tanah rusak yang mencapai luasnya 45.333 Ha, disusul dengan hutan konversi yang merupakan alternatif dalam pengembangan investasi perkebunan secara besar-besaran di daerah ini.

Melirik untuk daerah pengembangan perkebunan di Pasaman terdapat di beberapa kecamatan yang potensial dan memiliki lahan produktif yaitu di kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Rao, Rao Utara, Dua Koto, Tigo Nagari, Mapat Tunggul, Lubuk Sikaping, Bonjol dan Rao Selatan.

Sasaran Dan Target

1. Tersedianya identifikasi permasalahan perkebunan rakyat dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan 10 komoditi utama perkebunan
2. Tersedianya dokumen pembangunan perkebunan daerah ini berupa profil investasi 10 komoditi utama (karet, coklat, sawit, gambir, kulit manis, kopi, minyak nilam, kelapa, enau dan gardamunggu) yang memuat luas lahan yang tersedia, kondisi topografi lahan, agroklimat, tingkat kesuburan tanah, peruntukkan lahan, waktu, kemudahan-kemudahan, jaminan keamanan, infrastruktur penunjang yang tersedia pembiayaan, hak dan kewajiban investor, pola usaha inti & plasma dan sebagainya.



3. Siap pakainya 60 orang aparat teknis (fungsional) yang mempunyai kompetensi inti (10 komoditi utama) yang telah mengikuti diklat teknis komoditi tersebut secara terpadu untuk pembinaan langsung kepada petani-petani yang mengusahakan perkebunan 10 komoditi utama tersebut
4. Terjalannya kerjasama (kesepakatan bersama) antara Pemda dengan pihak-pihak PT Perkebunan Nasional dalam rangka pembinaan aparat teknis dan petani-petani handal dengan melakukan praktek kerja/ magang sekaligus sebagai pemasok bibit yang bermutu/ berlabel, teknologi budi daya, teknologi panen/ pasca panen serta jaminan pemasaran bagi produk yang dipersyaratkan
5. Meningkatnya produktifitas 10 komoditi utama perkebunan rakyat sesuai dengan bimbingan teknis budi daya dan teknik pengolahan hasil/ pasca panen yang dilakukan oleh aparat fungsional kepada petani
6. Pembuatan kebun-kebun percontohan (*pilot projek*) 10 komoditi utama oleh pemda atau perusahaan daerah atau koperasi perkebunan setempat sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat tani serta pembuatan kebun-kebun bibit yang memenuhi syarat teknis pembibitan serta dapat menampung dan memasarkan produk-produk petani tersebut yang memenuhi persyaratan mutu yang pada gilirannya sebagai sumber pendapatan asli daerah yang potensial
7. Memfasilitasi aparat-aparat pemerintahan daerah untuk turut berkebun pada dua hari libur kerja dalam rangka memanfaatkan lahan-lahan tidur dan atau yang disediakan khusus peruntukannya. Dalam hal ini, *Kampanye Gerakan "Ayo Berkebun"* merupakan propaganda dalam membangun Pasaman sebagai penghasil komoditi perkebunan.



Strategi dan Kebijakan

Strategi

1. Mengidentifikasi permasalahan perkebunan dan aspirasi masyarakat
2. Menetapkan dan mengkaji 10 komoditi utama perkebunan sebagai keunggulan daerah dan penunjukkan konsultan ahli dalam pengembangannya
3. Pembuatan dokumen pembangunan perkebunan yang berkelanjutan
4. Penempatan aparat fungsional dibidang pembinaan teknis 10 komoditi utama perkebunan
5. Terealisimya kerjasama teknis dan pemasaran dengan mitra kerja PT Perkebunan besar/ swasta yang saling mendukung & menguntungkan
6. Pembinaan teknis dan monitoring peningkatan produktivitas dan mutu 10 komoditi utama perkebunan
7. Pembuatan kebun-kebun percontohan dan kebun-kebun bibit 10 komoditi utama perkebunan
8. Mengkampanyekan Gerakan "Ayo Berkebun" kepada seluruh lapisan masyarakat
9. Pelaksanaan diklat dan magang/ praktek kerja bagi aparat fungsional dan petani handal

Kebijakan

1. Melakukan analisis kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan
2. Merumuskan penetapan 10 komoditi utama perkebunan dan pembinaan berkelanjutan serta penunjukkan konsultan ahli



3. Merumuskan dokumen pembangunan perkebunan secara komprehensif untuk kepentingan investor
4. Menyusun penempatan aparat fungsional secara proporsional menurut keahliannya untuk 10 komoditi utama perkebunan
5. Mengidentifikasi dan melakukan pendekatan untuk terwujudnya kerjasama teknis dan pemasaran 10 komoditi utama perkebunan dengan PT Perkebunan Nasional/ Swasta dan pihak-pihak terkait lainnya
6. Melakukan monitoring dan pembinaan teknis peningkatan produktifitas dan mutu 10 komoditi utama perkebunan
7. Menyusun dan melaksanakan pembuatan kebun-kebun percontohan dan kebun-kebun pembibitan serta manajemen operasionalnya
8. Mendorong masyarakat dan *Kampanye Gerakan "Ayo Berkebun"* keseluruhan masyarakat Pasaman termasuk aparat pemerintahan
9. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pembinaan 10 komoditi utama perkebunan kepada aparat fungsional dan petani handal
10. Memfasilitasi peningkatan mutu 10 komoditi utama perkebunan serta pemasaran dalam negeri dan ekspor

Program Pembangunan

Program kerja pembangunan yang berkelanjutan di daerah ini akan dapat mewujudkan Kabupaten Pasaman sebagai penghasil komoditi perkebunan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Program penyusunan dan analisis kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan
 1. Menginventarisasi permasalahan perkebunan dan aspirasi masyarakat



2. Analisis dan prospek pembangunan perkebunan berkelanjutan suatu kajian komprehensif
 3. Penyusunan dan penetapan 10 komoditi utama perkebunan
 4. Penyusunan profil investasi 10 komoditi utama perkebunan untuk pedoman bagi investor
 5. Promosi pengembangan 10 komoditi utama perkebunan
 6. Merekrut konsultan ahli pengembangan 10 komoditi utama perkebunan
- b. Program penyusunan organisasi serta tugas pokok dan fungsi aparat fungsional menurut keahliannya dalam pembinaan 10 komoditi utama perkebunan:
1. Menyeleksi dan menetapkan aparat fungsional sesuai dengan kompetensi inti dan penempatannya
 2. Pengadaan fasilitas dan penetapan besarnya insentif aparat fungsional di daerah kerjanya (kecamatan)
 3. Koordinasi dan tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program kegiatan aparat fungsional
 4. Analisa perhitungan produktivitas dan pengujian mutu 10 komoditi utama perkebunan sebagai indikator kinerja keberhasilan dan kegagalan fungsional
 5. Pemantapan pembinaan teknis berkelanjutan 10 komoditi utama perkebunan
 6. Pengembangan teknologi informasi dan pasar 10 komoditi utama perkebunan



- c. Koordinasi dan kesepakatan bersama dengan PT Perkebunan nasional/ swasta dalam rangka peningkatan kompetensi aparat fungsional dan petani handal
 - 1. Pendekatan dan penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT perkebunan nasional/ swasta dalam kegiatan peningkatan mutu SDM aparat fungsional dan petani handal
 - 2. Pelatihan teknis dan magang dan praktek kerja aparat fungsional dan petani handal

- d. Pembangunan kebun-kebun percontohan dan kebun-kebun bibit 10 komoditi utama perkebunan yang dikelola perusahaan daerah/ koperasi perkebunan
 - 1. Menetapkan SOTK dan manajemen koperasi/ perusahaan daerah untuk mengelola kebun percontohan dan kebun pembibitan 10 komoditi utama perkebunan termasuk anggaran dan sumber dananya
 - 2. Penyusunan renstra manajemen perusahaan/ koperasi perkebunan dalam pengelolaan kebun percontohan dan kebun pembibitan serta studi kelayakannya
 - 3. Penetapan lokasi peruntukkan pengelolaan kebun percontohan dan kebun pembibitan 10 komoditi utama perkebunan

- e. Pelaksanaan pemasyarakatan dan *Kampanye Gerakan "Ayo Berkebun"* ke seluruh lapisan masyarakat termasuk aparat pemerintahan
 - 1. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan *Kampanye Gerakan "Ayo Berkebun"*



2. Penyusunan pedoman/ buku praktis usaha pengelolaan 10 komoditi utama perkebunan secara komersil
 3. Pengaturan dan penetapan kebijakan bagi aparat daerah dalam *Gerakan "Ayo Berkebun"* dalam rangka pemanfaatan dua hari libur seminggu
- f. Peningkatan produktifitas dan mutu produk serta pengembangan pasar dalam negeri dan ekspor 10 komoditi utama perkebunan
1. Bimbingan teknis peningkatan produktivitas, mutu dan pengujian mutu
 2. Promosi 10 komoditi utama perkebunan dan kontak/ misi dagang ke pasar luar negeri
 3. Bimbingan teknis pengembangan ekspor dan calon eksportir 10 komoditi utama perkebunan
 4. Memfasilitasi pendirian trading house 10 komoditi utama perkebunan dalam upaya peningkatan nilai tambah produk dan nilai jualnya

Sektor Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sektor koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Pasaman merupakan komponen yang terbesar dan paling berpotensi memberi warna ekonomi daerah. Justru itu pemerintah Kabupaten Pasaman bersama instansi terkait yang dipertanggungjawabkan untuk membangun sektor UKM sejalan dengan tujuan nasional potensi sektor UKM yang dapat dibina supaya mereka tampil di barisan depan mengambil bagian dalam semua bidang khususnya dalam bidang sosial-ekonomi. Sebagai strategi meninggikan daerah Kabupaten Pasaman, kekuatan ekonomi rakyat harus dimantapkan secara berkesinambungan dan stabil supaya



dapat dijadikan landasan untuk mengatasi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja baru. Elemen perubahan yang kritikal ialah kualitas UKM dan wirausahawan yang terlibat supaya dapat bersaing menghadapi tantangan apakah tantangan dalam daerah, nasional maupun tantangan global khususnya dalam menangani isu ekonomi.

Pengembangan sektor koperasi dan UKM berkaitan erat dengan wirausahawan karena ia menjadi *flatfarm* untuk wirausahawan mengembangkan aktivitasnya. Berdasarkan ciri utama tujuan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah untuk meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas berperanan sebagai *owner operator* atau terlibat secara langsung dalam mengelola bisnis. Sedangkan ciri lain adalah organisasi atau perusahaan yang hendak diwujudkan dan ditingkatkan, perlu beroperasi dalam sektor strategis ekonomi daerah dan mampu berdaya tahan dan berdaya saing bukan saja di pasaran lokal, nasional maupun pasaran dunia.

Permasalahan Pembangunan UKM

Konsep pengembangan dan pembinaan sektor UKM oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman untuk membangun sektor ekonomi sejak tahun 1997 telah digalakkan seperti konsep *one village one product* karena konsep ini dinilai sangat akomodatif untuk dikembangkan terutama menghadapi globalisasi dan diberlakukannya AFTA 2005.

Beberapa permasalahan pengembangan koperasi, usaha mikro dan UKM di Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :



- a. Belum berperannya koperasi sebagai sentra ekonomi rakyat secara optimal. Upaya pemerintah untuk memberdayakan sektor koperasi seperti tak pernah surut, bahkan dapat dinilai 'memanjakan'. Berbagai paket bantuan pemerintah seperti kredit program yaitu Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke koperasi, skim program KUK dari bank, Kredit Ketahanan Pangan (KKP), paket program dari Permodalan Nasional Madani (PNM), terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi kerakyatan ini, namun hasilnya tidak sebanding dengan yang diharapkan, kontribusi koperasi terhadap GDP (*Gross Domestic Product*) baru sekitar 1 sampai 2 persen.
- b. Sektor usaha koperasi, usaha mikro dan UKM belum berkembang. Hal ini banyak disebabkan selain lingkungan usaha yang belum kondusif juga banyak disebabkan berbagai faktor kelemahan terutama:
1. Permodalan yang kecil
 2. Kurang akses dengan lembaga keuangan
 3. Pengetahuan pengelola masih rendah
 4. Kurang informasi pasar
 5. Penguasaan teknologi yang masih tradisional
- c. Kurang atau belum memiliki budaya dan jiwa *entrepreneurship* kalangan yang terlibat dalam koperasi, usaha mikro dan UKM.

Strategi dan Kebijakan Pembangunan



Program pembangunan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang direncanakan ini memerlukan pelibatan yang padu dari berbagai sektor, pemerintah, swasta, badan sukarela dan orang perseorangan yang berminat untuk melaksanakannya serta memerlukan suatu perencanaan yang menyeluruh dan berterusan. Tujuan akhir adalah untuk mewujudkan satu masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berlandaskan budaya wirausahawan yang sehat, berdaya tahan, berdaya saing dan berdaya maju.

Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui instansi terkait dapat menggandeng pihak terkait terhadap penciptaan wirausahawan baru lulusan perguruan tinggi selama 5 tahun kedepan. Sasarannya bisa berupa pencetakan *agripreneurs* (bidang pertanian, perkebunan), *aquapreneurs* (bidang perikanan) maupun *techpreneurs* (wirausahawan bidang teknologi). Dalam mendorong minat wirausaha mahasiswa di perguruan tinggi, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Depdiknas/perguruan tinggi maupun lembaga/konsultan *entrepreneurship* dalam mendesain kurikulum pelatihan wirausaha dan membuat pilot proyek usaha yang kreatif yang dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomis (**Sinar Harapan Yohanes**).

Yang perlu perhatian pemerintah dan perlu terus dikembangkan adalah koperasi yang mampu memberikan dorongan dan fungsi dengan baik bagi para anggotanya seperti koperasi produsen dan koperasi konsumen. Koperasi memerlukan keberpihakan pemerintah melalui komitmen yang telah disepakati untuk memperoleh kesempatan dan iklim usaha yang kondusif. Diharapkan peran dan posisi pemerintah agar secara efektif dan berdampak positif dalam upaya



pemberdayaan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi yang modern, efisien dan berdaya saing tinggi.

Strategi program adalah memberi kesadaran dan meningkatkan jumlah wira usaha di kalangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Lima komponen utama program ini ialah:

- a. Pendidikan dan latihan kewirausahaan.
- b. Pinjaman dan permodalan wira usahawan.
- c. Infrastruktur bisnis.
- d. Jaringan usaha antara organisasi.
- e. Penelitian pembangunan kewirausahaan.

Sektor Kepariwisata

Kabupaten Pasaman memiliki banyak daerah-daerah/tempat-tempat tujuan wisata yang potensial dan menarik untuk dikunjungi. Objek-objek wisata tersebut selain keindahan alam yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Pasaman juga terdapat peninggalan-peninggalan sejarah yang cukup banyak. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Pasaman tak terlepas dari kunjungan kepariwisataan di Sumatera Barat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Pasaman berada pada jalur Lintas Barat Sumatera yang merupakan daerah tujuan kunjungan wisata.

Pada tahun 2006 kunjungan wisata ke Kabupaten Pasaman berjumlah 13.804 orang yang terdiri dari 9.670 wisatawan nusantara dan 4.134 wisatawan mancanegara. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya khususnya selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tak begitu besar. Ketersediaan wisma/penginapan yang terdapat



di Kabupaten Pasaman berjumlah pada tahun 2006 sekitar 13 penginapan dengan jumlah kamar 145 kamar untuk tahun 2007 tidak terjadi peningkatan pembangunan penginapan/wisma dengan jumlah yang sama dengan tahun 2006. Dari sekian banyak objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman yang telah dikenal masyarakat Sumatera Barat dan sudah mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan domestik adalah "Tugu Khatulistiwa Bonjol dan sumber air panas di Rimbo Panti" yang terletak di perlintasan jalan lintas Sumatera jurusan Bukittinggi menuju Medan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai yakni :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kegiatan kepariwisataan daerah.
2. Menjadikan Kabupaten Pasaman sebagai Kota Pariwisata mengingat banyaknya jumlah objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pasaman.

Sasaran yang ingin dicapai yakni :

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan produk dan usaha kepariwisataan pada objek wisata
2. Meningkatkan kemampuan pembinaan kegiatan jasa pariwisata melalui peningkatan kemampuan pengaturan kegiatan jasa pariwisata serta peningkatan promosi.
3. Meningkatnya investasi swasta di sektor pariwisata

Arah Kebijakan dan Strategi



Arah kebijakan :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan produk dan usaha kepariwisataan.
2. Mengembangkan produk unggulan dan usaha pariwisata Kabupaten Pasaman sebagai kota wisata wilayah Sumatera Barat.
3. Meningkatkan kemampuan pembinaan usaha kepariwisataan.

Strategi :

1. Strategi internal pengembangan pariwisata yaitu : pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur, serta strategis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
2. Strategi eksternal pengembangan kepariwisataan yaitu : pembuatan produk hukum daerah tentang pengelolaan kegiatan kepariwisataan daerah, evaluasi, dan penyusunan rencana pengembangan kepariwisataan daerah, pengembangan produk dan usaha kepariwisataan.

Program dan Kegiatan

1. Program Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Program ini mencakup kegiatan antara lain:

- a. Peningkatan penelitian yang mampu mendukung pencapaian sasaran yang berkaitan dengan usaha pemasaran dan pengembangan produk wisata.



- b. Penelitian dan penggalian terhadap nilai-nilai budaya yang telah langka demi mengembangkan kembali dan dikemas sebagai produk wisata.
- c. Pembuatan rencana untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Pasaman dan rencana pembangunan kawasan wisata secara terpadu.

2. Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Tujuan program ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia di bidang pariwisata dengan kemampuan yang memadai yang meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun non formal serta melaksanakan penyuluhan kepada aparat pelaksana dan pengelola kepariwisataan serta masyarakat luas.

3. Program Pengembangan Produk Wisata

Tujuan program ini adalah dalam rangka peningkatan ragam, daya tampung serta mutu objek dan daya tarik wisata serta sarana pendukungnya agar menarik untuk dikunjungi dengan kegiatan antara lain:

- a. Merealisasikan pembuatan dan mengaplikasikan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pasaman dan rencana pengembangan kawasan wisata secara terpadu.
- b. Pengembangan objek dan daya tarik wisata yang terdiri dari wisata alam seperti cagar alam/air panas rimbo panti, wisata alam arung jeram di Kecamatan Mapat Tunggul, Wisata Sejarah Museum Tuanku Imam Bonjol dan Candi Sangka Bulan di Petok Kecamatan Panti.
- c. Pembangunan taman rekreasi dan tempat hiburan yang tersebar.



d. Mengembangkan usaha biro perjalanan.

4. Program Pembangunan Prasarana Pariwisata

Adapun tujuan program ini merupakan sebagai faktor pendukung dalam rangka meningkatkan kegiatan pariwisata meliputi pembangunan transportasi, telekomunikasi, listrik dan air bersih. Pada intinya program ini memberikan masukan bagi sektor terkait mengenai jenis kebutuhan, kapasitas sarana serta mendorong partisipasi pihak swasta dalam pembangunan prasarana penunjang.

5. Program Pemasaran Pariwisata

Tujuan program ini adalah dalam rangka meningkatkan pemasaran pariwisata dan arus wisatawan ke daerah ini yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. Peningkatan mutu pelayanan kepariwisataan.
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan biro perjalanan.
- c. Penyelenggaraan berbagai acara wisata secara teratur.
- d. Koordinasi dengan berbagai sektor terkait.
- e. Penyusunan sistem Informasi yang tepat dan memuat berbagai indikator perkembangan kepariwisataan.

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan serta Kesenian

Program ini meliputi kegiatan pembinaan dan pengembangan kelompok-kelompok budaya dan seni masyarakat, pengiriman misi seni dan budaya baik dalam propinsi maupun luar propinsi dalam kegiatan promosi dan pameran, penyelenggaraan lomba budaya dan kesenian, serta pemberian penghargaan



kepada perorangan maupun kelompok yang berhasil membina dan melestarikan budaya serta kesenian daerah.

Sektor Tenaga Kerja

Persoalan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang perlu diarahkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Karena berkaitan secara langsung dengan perekonomian dan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan ketenagakerjaan yang dapat memicu perluasan kesempatan kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran.

Persoalan kependudukan diarahkan dalam analisis model pertumbuhan penduduk, dimana ini akan berkaitan dengan persoalan kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan (migrasi). Munculnya tiga persoalan tersebut akan mempengaruhi struktur kependudukan dan model ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah karena penduduk merupakan bagian pembangunan.

Secara struktur komposisi kependudukan Kabupaten Pasaman masih di dominasi oleh penduduk usia muda. Ini terjadi akibat dari tingginya angka kelahiran pada tahun 1980-an dan 1990-an. Model komposisi penduduk di Kabupaten Pasaman juga hampir mirip di seluruh daerah di Sumatera Barat. Diperkirakan tekanan ini akan mempengaruhi persoalan ketenagakerjaan karena terjadi peningkatan usia kerja sehingga meningkatkan angka penawaran tenaga kerja. Bila tidak diantisipasi dengan permintaan tenaga kerja akan terjadi tekanan pada pengangguran.



Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pasaman adalah agar permasalahan ketenagakerjaan dapat diatasi dan mengurangi pengangguran :

- Mengurangi ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja maupun dari penawaran tenaga kerja .
- Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia aparatur dan kelembagaan.

Sasaran adalah peningkatan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan berusaha, serta mendapat kehidupan yang layak di Kabupaten Pasaman. Beberapa sasaran utama yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah terutama yang berkaitan terhadap persoalan ketenagakerjaan yaitu :

- Mengurangi angka pengangguran terbuka secara bertahap dari tahun ketahun.
- Mempersiapkan angkatan kerja dengan keterampilan yang mampu di respon oleh pasar kerja. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan keterampilan baik secara formal atau informal.
- Meningkatkan iklim usaha yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi perluasan lapangan pekerjaan.



Strategi Kebijakan

Tersusunnya arah kebijakan dari program ketenagakerjaan dengan arah yang jelas sesuai dengan karakteristik dari pembangunan daerah Kabupaten Pasaman dan dapat diimplementasikan dalam bentuk program yang mengakomodasi setiap komponen pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Dua faktor strategis yang perlu diperhatikan dalam kebijakan ketenagakerjaan yaitu faktor eksternal berupa kondisi makro dari perekonomian dan faktor internal yaitu persiapan angkatan kerja daerah melalui penguasaan keterampilan dan teknologi.

Program Pembangunan

Untuk mencapai sasaran dan mengimplementasikan kebijakan dari program ketenagakerjaan diperlukan strategi program yang mampu mencapai target dari pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasaman.

1. Program peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja yang diarahkan pada kelompok usia di atas 30 tahun yang memiliki proporsi pengangguran terbesar dengan keterampilan rendah melalui program-program:
 - Penguasaan teknologi tepat guna terhadap komoditi unggulan di Kabupaten Pasaman.
 - Implementasi usaha strategis yang dibantu oleh pemerintah daerah dalam model bapak angkat dan manajemen pendamping.
2. Program identifikasi dan pemetaan dunia usaha yang diarahkan pada program magang bagi para pengangguran usia muda melalui insentif pemerintah daerah sehingga akan muncul usahawan muda di daerah.



3. Program penyediaan informasi ketenagakerjaan daerah yang akan membantu angkatan kerja untuk mendapat informasi peluang kerja dan usaha.
4. Program pendidikan keterampilan wirausaha (*entrepreneurship*) yang didukung oleh pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya usahawan muda daerah yang mampu memperluas lapangan kerja.

Sektor Perhubungan

Sektor transportasi sebagai sarana perhubungan sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas jaringan jalan. Saat ini rasio antara panjang jalan dan luas wilayah di Kabupaten Pasaman masih rendah yaitu 0,15. Rasio ini menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas di Kabupaten Pasaman masih rendah. Jalan nasional dan jalan propinsi yang menghubungkan kabupaten dengan daerah sekitarnya (perbatasan dengan Sumatera Utara dan Kabupaten Agam serta Pasaman Barat) kondisinya relatif baik. Jalan negara yang menuju utara sangat strategis bukan saja menjadi akses dari dan menuju Sumatera Barat tetapi juga menjadi pilihan akses dari penduduk yang berbatasan dengan Sumatera Utara untuk pergi ke luar daerah melalui pelabuhan udara Internasional Minangkabau di Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, jalan ruas Rao – Rumbai juga merupakan jalan strategis untuk menuju Propinsi Riau, walaupun kondisinya belum sebaik jalan yang menuju Sumatera Utara.

Jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman di Kabupaten Pasaman kondisinya relatif baik di Pasaman bagian tengah dan selatan dari pada di Pasaman bagian utara. Oleh karena itu peningkatan kondisi dan mutu jalan perlu diprioritaskan terutama dalam rangka mengembangkan potensi kawasan di bagian



utara tersebut (Kecamatan Duo Koto, Rao Utara, Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul Selatan).

Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai yakni :

- Meningkatkan kapasitas lembaga dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan.
- Meningkatkan kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan

Sasaran yang ingin dicapai :

- Tertatanya sitem lalu lintas dan angkutan (antar kecamatan dan regional) di Kabupaten Lubuk Sikaping
- Berkurangnya masalah lalu lintas di Kabupaten Pasaman

Arah dan Kebijakan

Arah kebijakan :

1. Meningkatnya kapasitas lembaga dan kapabilitas aparatur dalam mengelola lalu lintas
2. Mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, lancar dan tertib di Kabupaten Pasaman
3. Meningkatkan pelayanan angkutan regional darat di Kabupaten Pasaman

Strategi :

1. Strategi secara internal yaitu dengan melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan pengembangan aparatur serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan transportasi.



2. Strategi secara eksternal yaitu dengan menjalin koordinasi antar instansi pada berbagai tingkat kewenangan seperti pemerintah propinsi atau Kota.

Sektor Pemukiman

Pembangunan perumahan dan pemukiman saat ini tidak hanya di ibu kota kabupaten dan kecamatan tetapi juga di wilayah pedesaan dan perkotaan lainnya yang ada di Kabupaten Pasaman. Untuk pengembangan perkotaan yang terdapat di setiap ibu kota kecamatan dengan memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar perkotaan serta fungsi yang diemban disetiap kawasan dalam rangka menunjang dan mendukung perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perumahan dan pemukiman pedesaan perlu dilakukan pada kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk pengembangan pertanian dan industri. Hal ini mengingat bahwa dengan bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan rumah dipedesaan yang masyarakatnya lebih banyak bermata pencarian di sektor pertanian akan bertambah pula disamping perlu dilakukan pembatasan untuk pengembangan pemukiman yang rawan bencana dan kawasan lindung. Penerapan syarat-syarat kesehatan bagi rumah dan pemukiman sebanyak 88.989 buah rumah yang ada di Kabupaten Pasaman sangat berpengaruh pada penghuni dan lingkungan. Ini diperlukan karena hanya 46,23 % rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari 18.656 yang telah diteliti di Kabupaten Pasaman.

Tujuan dan sasaran

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan kawasan pemukiman yang dapat mendukung fungsi dan fungsi ekonomi Kabupaten Pasaman.

Sasaran yang ingin dicapai :



1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pemukiman dan kawasan berdasarkan spesifikasi.
2. Mewujudkan pemukiman dan kawasan Kabupaten Pasaman yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Arah Kebijakan dan Perumahan dan Pemukiman

Arah Kebijakan :

- a. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat, tertib dan teratur.
- b. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam memelihara, rehabilitasi dan membangun prasarana lingkungan pemukiman.

Secara umum strategi pengembangan Kabupaten Pasaman pada bidang pemukiman adalah meningkatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Pasaman pada masyarakat secara efisien dan efektif, dan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemeliharaan rehabilitasi dan pembangunan.

Program

1. Pembangunan perumahan dan pemukiman yang sehat dengan prasarana pendukungnya seperti air, listrik, telepon, dan fasilitas umum lainnya.
2. Mengembangkan sistem pembiayaan pembangunan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat miskin.
3. Peningkatan penataan lingkungan pada kawasan kumuh.
4. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan dan pemukiman swadaya yang berbasis masyarakat (*community development*).
5. Peningkatan sanitasi dan perbaikan lingkungan kumuh.



6. Pembentukan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah perumahan dan pemukiman.

Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah faktor penting yang menentukan perubahan dan peningkatan daya saing Kabupaten dengan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan iptek di Kabupaten Pasaman perlu diarahkan untuk pemanfaatan iptek yang dapat meningkatkan produktifitas dan pengembangan usaha masyarakat.

Dengan lambatnya proses difusi teknologi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pasaman antara lain disebabkan oleh letak geografis kota ini yang relatif jauh dari ibukota provinsi, kurang memadainya infrastruktur ekonomi dan sosial serta kurangnya aktivitas-aktivitas riset dan pengembangan di daerah ini. Oleh karena itu berbagai upaya peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) di daerah adalah sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing komoditi-komoditi unggulan lokal, mengurangi angka kemiskinan. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa basis kekuatan internal pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian, khususnya sub-sektor tanaman pangan, sub-sektor perkebunan dan sub-sektor perikanan serta pertambangan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan :



Tujuan pokok peningkatan kemampuan IPTEKS adalah untuk meningkatkan dan menciptakan nilai tambah (*value-added*) dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Pasaman yang makmur dan sejahtera. Dalam konteks ini sasaran dan peningkatan kemampuan IPTEK Kabupaten Pasaman adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang mantap.

Sasaran :

Sasaran umum dari peningkatan Kemampuan IPTEK di Kabupaten Pasaman adalah untuk mempercepat kemajuan teknologi baik di kalangan dunia usaha swasta maupun pemerintah sehingga peralatan modal yang dimiliki lebih produktif (*capital augmented*) dari tahun ke tahun. Baik karena pengenalan mesin-mesin dan peralatan-peralatan baru maupun melalui penciptaan input-input baru (*raw materials*) dan angkatan kerja dapat menjadi lebih produktif setiap waktu (*labor augmenting*) melalui peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia dalam berbagai bidang teknologi dan manajerial.

Arah Kebijakan dan Startegi

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan produktifitas usaha berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh informasi yang akurat, *up to date* dan *valid*.
2. Mendorong peningkatan kegiatan penelitian dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.
3. Memfasilitasi kegiatan penelitian aplikasi inovatif disektor pertanian, industri dan perdagangan.



Strategi :

Strategi IPTEK atau strategi teknologi adalah konsep baru pada sektor pemerintah di Kabupaten Pasaman. Namun demikian, strategi teknologi sebagian besar dunia usaha dilakukan dengan jalan kolaborasi dengan lembaga-lembaga *riset and development* pemerintah dan universitas dalam upaya mereka mencapai keuntungan kompetitif (*competitive advantages*) melalui kepemimpinan teknologi (*technology leadership*). Pilihan-pilihan teknologi ini mencakup komitmen sumberdaya untuk teknologi yang tepat, pemeliharaan dan penyebaran dan penghapusan kapabilitas teknologi.

Program Pembangunan :

- a. Program riset terapan (*applied research*),
- b. Program riset dasar (*basic research*)
- c. Program penelitian dan pemberdayaan UKM dalam pengembangan rancangan produk-produk pertanian, dan teknologi proses pengolahan mereka.
- d. Program penelitian dasar dalam bidang bioteknologi dan/atau kultur jaringan.
- e. Program difusi teknologi hasil-hasil kajian IPTEK
- f. Studi dan perencanaan pengembangan kota-kota kecil di Kabupaten Pasaman.

B. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup



Sektor Pertanahan

Bidang Pertanahan perlu dikelola dengan baik dalam pembangunan Kabupaten Pasaman karena pertanahan menjadi elemen penting dalam investasi pembangunan. Sering terjadi hambatan investasi pembangunan dan konflik pertanahan karena kurang jelasnya batasan dan status kepemilikan tanah. Oleh karena itu diperlukan administrasi pertanahan yang baik dengan data yang akurat dan memadai.

Tugas pengelolaan oleh pemerintah dalam bidang pertanahan menyangkut administrasi pertanahan. Fungsi yang dilakukan yaitu berupa perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang administrasi pertanahan yang baik maka investasi pembangunan Kabupaten Pasaman akan berjalan dengan baik dan konflik pertanahan dapat dikurangi.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan pertanahan
2. Meningkatkan keandalan pelayanan publik dalam administrasi pertanahan.

Strategi :

1. Strategi internal yang dilakukan adalah : konsolidasi organisasi, pembinaan, pendidikan, pelatihan, pengembangan aparatur, aliansi strategis unit kerja terkait.
2. Strategi eksternal yang dilakukan adalah : penyempurnaan sistem informasi pertanahan.



Sektor Pertambangan dan Energi

Pasaman yang terletak pada garis khatulistiwa mempunyai geologi yang sangat rumit sebab wilayahnya terletak di deretan Bukit Barisan atau punggung Bukit Barisan. Secara regional daerah Pasaman disusun oleh formasi batuan yang berumur kuartar sampai paleozoikum. Akan tetapi karena umumnya terletak pada perbukitan, maka didominasi oleh batuan berumur *mesozoikum* dan *paleozoikum*.

Dengan kondisi diatas Kabupaten Pasaman sebagai tempat terbentuknya berbagai barang tambang baik mineral logam maupun non logam terutama pada daerah sekitar terobosan batuan granit berupa urat-urat bijih *hydrothermal* maupun kontak metasomatik. Sedangkan bahan galian industri keterdapatannya umumnya berkaitan dengan batuan gunung api, sedimen dan terobosan. Pemanfaatan bahan galian yang ada sampai saat ini belum sampai pada taraf maksimal. Diharapkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dapat terus berusaha untuk mengoptimalkan pendayagunaan bahan galian yang ada dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif akan tetapi tetap berwawasan lingkungan. (Sumber RPJM Kabupaten Pasaman 2006-2010)

Selain Kabupaten Pasaman kaya dengan bahan galian tambang, Kabupaten Pasaman yang dikelilingi oleh rentetan bukit barisan dan terdapat berbagai sumberdaya alam baik berupa mineral maupun panas bumi. Selain



dari pada itu pada daerah perbukitan banyak dijumpai aliran air yang deras akibat perbedaan ketinggian morfologi, dimana tentunya sangat cocok untuk di pergunakan sebagai tenaga pembangkit listrik mini Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH).

Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk pengembangan sektor Pertambangan dan Energi adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan dan eksploitasi sumberdaya alam dan sumberdaya air secara efektif dan efisien berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten Pasaman dan rekomendasi dari pengelolaan lingkungan.
2. Pengembangan kemampuan sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi pertambangan, guna mendukung peningkatan efisien, produktifitas usaha pertambangan dan melibatkan peran serta masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan pertambangan.

Strategi dalam pembangunan sektor pertambangan dan energi sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat dalam sektor pertambangan dan energi.



2. Pemanfaatan sumberdaya lokal dengan berdasarkan ketentuan pemanfaatan yang jelas serta pengawasan yang ketat.
3. Pengajuan produk hukum untuk pengendalian pemanfaatan sumberdaya pertambangan
4. Penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan sumberdaya pertambangan dan energi.
5. Menaptakan iklim investasi yang aman, nyaman dan tetram kepada investor.

Program dan Kegiatan

1. Survey investigasi potensi bahan galian golongan C
 - a. Melakukan survey dan inventarisasi bahan galian golongan C
 - b. Melakukan penyelidikan umum terhadap beberapa bahan galain yang berpotensi
 - c. Menyiapkan peta lokasi potensi bahan galain golongan C
2. Investarisasi Mineral dan Energi
 - a. Promosi potensi sumberdaya mineral dan potensi energi
 - b. Inventarisasi potensi pertambangan dan energi
 - c. Mendata kebutuhan energi
 - d. Menyiapkan peta geologi skala 1 : 50.000

3. Pengembangan produksi pertambangan



- a. Penyediaan potensi sumberdaya mineral dengan produk baru
 - b. Pembinaan tambang rakyat
 - c. Peningkatan produktifitas untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat
 - d. Tersedianya alih teknologi kepada masyarakat dengan pembuatan ornamen.
4. Promosi produksi pertambangan
- a. Menginventarisir pemanfaatan air bawah tanah
 - b. Menyusun ketentuan pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah
 - c. Melaksanakan dan pemanfaatan air bawah tanah
5. Program Pengembangan energi
- a. Menginventarisir depot lokal, pangkalan, dan penimbunan BBM
 - b. Mengembangkan wilayah atau nagari yang belum masuk listrik
 - c. Penelitian dan survey hasil dari minyak dan gas maupun sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan energi.

C. Bidang Agama

Salah satu aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pembangunan suatu daerah adalah kualitas hidup beragama masyarakat. Sebab, dalam setiap era pembangunan dimanapun, sangat diperlukan akhlak atau moral para pelaku dan sasaran pembangunan itu sendiri. Jika akhlak atau moral pelaku dan sasaran



pembangunan itu tidak/belum baik maka terjadilah apa yang disebut korupsi dan berbagai skandal pembangunan, kriminal, anarkisme dan lain sebagainya. Kabupaten Pasaman mengharap kemungkinan peranan ajaran Islam secara lebih besar dan kuat. Selain timbul dari kesadaran keimanan seseorang yang beragama Islam, harapan kepada peranan Islam itu juga berdasarkan kenyataan, yaitu bahwa hampir 100 persen penduduk Pasaman sesungguhnya muslim. Maka wajar jika Islam dipandang mempunyai pengaruh paling besar dan kuat dalam wawasan etis dan moral masyarakat Pasaman.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Pendekatan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup beragama di Kabupaten Pasaman.

1. Melakukan pendataan dan pemetaan penduduk usia sekolah yang buta baca tulis Al-Qur'an. Untuk efisiensi pendataan ini bisa bekerja sama dengan pihak sekolah SD dan SLTP. Sebab hingga saat ini belum ada data yang valid, berapa sesungguhnya penduduk Pasaman yang buta baca tulis Al-Qur'an.
2. Revitalisasi fungsi masjid dalam kehidupan bermasyarakat, yakni menjadikan masjid sebagai pusat budaya atau peradaban di Kabupaten Pasaman, berkonsekuensi logis pada perlunya fasilitas pendukung yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

Program

Program – program yang diterapkan oleh kabupaten Pasaman dalam bidang keagamaan antara lain :



- Mengoptimalkan peran dan fungsi masjid dalam melakukan pembinaan kehidupan beragama masyarakat.
- Mendorong terbentuknya Remaja Islam/ Masjid, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), perpustakaan masjid dan seterusnya.
- Memfasilitasi kelengkapan sarana dan parasarana masjid sesuai kebutuhan dengan skala prioritas dan secara bertahap.
- Memanfaatkan da'i nagari dalam melakukan pembinaan pada masjid di nagarinya secara bertahap.
- Mendorong pelaksanaan PERDA Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kewajiban bagi pelajar untuk berpakaian muslim dan Perda Nomor 21 Tahun 2003 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an dengan perangkat teknis yang lebih operasional dan menyediakan perangkat-perangkat pendukung dari kebijakan tersebut.
- Melakukan pendataan terhadap buta tulis Al-Qur'an dan perkembangan melek huruf Al-Qur'an.
- Menyusun program pembelajaran TPA/TPSA yang tepat untuk dipedomani dalam proses belajar-mengajar di seluruh TPA/TPSA se Kabupaten Pasaman.
- Memperkenalkan dan menumbuh kembangkan kaligrafi dan seni Al-Qur'an baik di madrasah, TPA/TPSA maupun di bangku sekolah SD dan SLTP.
- Memberdayakan kelompok-kelompok wirid Yassin yang tersebar pada setiap kecamatan di Kabupaten Pasaman.

D. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu proses investasi untuk manusia. Melalui peningkatan akses dan pemerataan pendidikan diyakini Pasaman akan memperoleh manfaat.



Baik manfaat langsung kepada warganya dalam bentuk semakin siap masyarakat untuk kegiatan ekonomi, maupun manfaat sosial dari pendidikan. Sekaligus, melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan akan dapat mengurangi beban pembangunan.

Pendidikan formal untuk seluruh jenjang adalah sangat penting. Karena akan mempermudah masyarakat dalam penetapan pilihan yang rasional. Namun selain pendidikan formal, pendidikan non formal juga diperlukan mengingat pendidikan formal sendiri juga akan terbatas dapat disediakan oleh pemerintah dalam bentuk dan jenis, mengingat pelayanan pendidikan membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga dalam jangka panjang persodan pendidikan diharapkan dapat dipahami manfaatnya oleh berbagai pihak, pemerintah, rumah tangga, maupun masyarakat secara luas. Sehingga dalam jangka panjang melalui pendidikan yang berkesinambungan dengan pemerataan kualitas akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (sumber RPJM Kabupaten Pasaman 2006-1010)

Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan

1. Mengupayakan terciptanya pemerataan pendidikan melalui peningkatan akses jangkauan pendidikan bagi masyarakat.



2. Mengupayakan terciptanya pendidikan berkualitas dengan melakukan penataan kurikulum dan manajemen pendidikan.
3. Mengupayakan terciptanya peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik lainnya.
4. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan yang mempunyai daya saing tinggi tanpa mengabaikan kualitas yang ada.
5. Menumbuhkan sifat kreatif dan inovatif dikalangan masyarakat maupun generasi muda.

E. Bidang Sosial Budaya

Sektor Kesehatan dan KB

Pembangunan kesehatan dan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kualitasnya, sehingga dapat diwujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata akan tetapi dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari berbagai sektor.

Upaya untuk menjadikan pembangunan nasional berwawasan kesehatan sebagai salah satu misi yang strategis harus menjadi komitmen semua pihak. Sehubungan dengan semakin dekatnya waktu untuk menjadikan Kabupaten Pasaman sehat 2010, maka dalam rencana pembangunan kesehatan lima tahun kedepan diarahkan untuk menjadikan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber



daya manusia. Bentuk program diwujudkan untuk meningkatkan usia harapan hidup serta menurunkan angka kematian bayi dan ibu hamil.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan :

Sebagaimana komitmen menuju pembangunan manusia, maka sasaran dari sub sektor kesehatan adalah mengurangi angka kematian bayi menjadi separuh dari kondisi tahun 2000. Diharapkan kematian bayi akan dapat dicapai berkurang menjadi 40 per 1000 pada tahun 2010. Sehingga arah kebijakan adalah untuk mengatasi faktor yang menyebabkan angka kematian bayi di Kabupaten Pasaman. Akar masalah yang dijumpai adalah masih besarnya kontribusi berbagai penyakit utama seperti ISPA, kurang gizi makro dan mikro, termasuk tingkah laku masyarakat yang kurang kondusif terhadap reproduksi kelahiran dan sanitasi lingkungan permukiman (Sumber RPJM kabupaten Pasaman 2006-2010)

Strategi :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
2. Meningkatkan Pelayanan Preventif dan Kuratif
3. Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan.
4. Peningkatan Kesadaran Rumah Tangga
5. Peningkatan Fasilitas Kesehatan dan Penujang
6. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis

Program Kesehatan

Program yang terkait dengan bidang kesehatan adalah:



1. **Program perluasan jangkauan pelayanan kesehatan dasar**, melalui pemantapan pelayanan pada tingkat nagari, pengembangan bidan desa dan fungsi puskesmas masih diperlukan
2. **Program imunisasi** lengkap terhadap seluruh anak usia balita. Program ini dilengkapi dengan program promosi pemanfaatan ASI dan makanan tambahan di Posyandu.
3. **Program perluasan pemanfaatan garam beryodium** agar dapat mengurangi dampak dari Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).
4. **Program kesehatan lingkungan** melalui penyediaan fasilitas drainase dan penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
5. **Program perluasan fungsi Posyandu**. Untuk merealisasikan hal ini diperlukan program rekrutmen dan *refreshing* tenaga kader.
6. **Program pemberantasan penyakit menular**. Program ini dilengkapi dengan meningkatkan kapasitas tenaga medis dan para medis di seluruh kecamatan.
7. **Program Pengawasan Obat Makanan Minuman Kosmetik dan Alat Kesehatan serta zat aditif lainnya**. Program ini dilengkapi dengan peningkatan profesionalisme aparatur, penyuluhan dan koordinasi.
8. **Program jangkauan pelayanan perumahan** pada daerah-daerah yang masih terpencil. Hal ini dilengkapi dengan program penyediaan fasilitas kesehatan minimum dan pengadaan obat-obatan.
9. **Program pengangkatan tenaga medis dan paramedis**. Disertai dengan program peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dengan segala jenis pelayanan yang akan diberikan.



Sektor Kebudayaan

Pembangunan dan penerapan budaya di Kabupaten Pasaman lebih diarahkan untuk menemukan dan mengukuhkan identitas daerah, yang tidak kering dari nilai-nilai kultural Minangkabau. Sementara adat bersandikan syarak dan syarak bersandikan Kitabullah, menjadi sebuah tali pegangan dalam mengembangkan kebudayaan dan penerapannya. Untuk menemukan dan mengukuhkan identitas sosial di Kabupaten Pasaman, diperlukan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Perencanaan ini didahului dengan mengakomodasi dan memilah usulan-usulan seluruh komponen masyarakat yang nantinya dicocokkan dengan telaahan akademik untuk dijadikan keputusan bersama.

Sasaran Pengembangan Budaya

Dilihat dari kondisi kehidupan masyarakat di Kabupaten Pasaman dan pola pengembangan budaya yang terjadi maka sasaran dari pengembangan budaya daerah diarahkan pada:

1. Budaya sebagai pondasi dasar pembangunan daerah.
2. Memperkuat integrasi antar penduduk dan proses asimiliasi antara budaya asli dengan budaya penduduk pendatang dan dijadikan sebagai kekuatan dalam penyatuan kehidupan sosial ekonomi bermasyarakat.
3. Mengintegrasikan perkembangan budaya dalam proses pendidikan di sektor formal melalui paket pembelajaran di sekolah.

Arah dan Strategi Kebijakan



Desentralisasi sebagai peluang dalam pengembangan budaya daerah yang terintegrasi ke dalam lima elemen budaya, penduduk, wilayah, pendidikan, ekonomi dan sosial yang dapat digali sebagai aset dan potensi dalam pembangunan daerah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur dari budaya asli Minangkabau "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Arah pembangunan kebudayaan yakni mengikuti kaidah yang berkembang serta saran dan masukan "tungku tigo sajarangan" yang memenuhi masukan unsur ninik mamak dan tokoh masyarakat serta bundo kanduang. Sehingga kepentingan semua pihak terakomodasi dalam memperkaya khasanah dan warna pembangunan.

Strategi

Pembangunan kebudayaan adalah dengan mengembangkan cita dan karsa penduduk serta mempertahankan nilai luhur yang tidak bertentangan dengan syariat agama yang dianut. Untuk itu strategi dalam pengembangan dan penerapan kebudayaan daerah adalah:

1. Mengembangkan setiap nilai-nilai kebersamaan dan kegotongroyongan agar tercipta kehidupan yang harmonis.
2. Mengembangkan pola kehidupan yang dapat membantu memecahkan masalah secara bersama. Saatnya strategi ini dilengkapi dengan pengembangan piranti pilantropi sosial.
3. Strategi kebudayaan Pasaman perlu menghasilkan ciri yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat. Saat bersamaan perlu dihindari



tekanan negatif yang berasal dari dampak globalisasi. Sehingga nilai budaya yang positif menjadi modal masyarakat untuk dapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik lagi.

4. Integrasi kesukuan perlu diupayakan menjadi suatu kekuatan baru dalam proses pembangunan. Ini mengingat Pasaman berada pada lintas budaya dan agama yang berbeda. Sehingga ini dapat memicu konflik, sekaligus dapat merupakan kekuatan untuk membangun secara bersama pembangunan pada masa yang akan datang.

Program Kebudayaan Pasaman

Mengingat kayanya nilai budaya yang ada di tengah masyarakat, maka program kebudayaan adalah ditujukan untuk memperkaya dan mengembalikan potensi budaya yang ada. Untuk itu proram yang terkait dengan kebudayaan adalah:

a. Kajian eksistensi kebudayaan Masyarakat Pasaman

Tujuan kegiatan ini adalah dengan mengkaji dan mensosialisasikan kembali tradisi yang berakar pada budaya dengan mengembangkan peranan (aktifitas, status dan kharisma) ninik mamak dan mensinergikannya dengan alim ulama serta cerdik pandai dalam ikatan "tungku tigo sajarangan tali tigo sapilin".



b. Program pemberdayaan

Program pemberdayaan lebih kompleks dan komprehensif dengan mengacu kepada pentahapan pemberdayaan. Baik program pemberdayaan untuk keluarga miskin, wanita, pemuda, maupun tokoh masyarakat.

c. Sosialisasi Kewenangan

Mensosialisasikan kewenangan lembaga-lembaga pemerintahan nagari dan lembaga adat serta lembaga sosial yang ada dalam pengembangan kehidupan bernagari.

d. Dukungan Musyawarah Pembangunan Nagari

Mengingat nilai-nilai sosial dianggap sebagai modal sosial serta kelembagaan nagari adalah institusi yang berpotensi mensukseskan proses pembangunan, maka pemerintah daerah dapat mendorong agar setiap tahun kegiatan musyawarah di nagari mampu mengidentifikasi dan mendokumentasikan persoalan utama yang dihadapi.

Sektor Pemuda dan Olah Raga

Salah satu komponen utama dalam penciptaan pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah menggali potensi dari sumberdaya manusia terutama pada kelompok usia muda sebagai pelopor pembangunan daerah. Sehingga orientasi dari arah kebijakan pembangunan berkolaborasi dalam wujud penciptaan pemuda pembangunan yang tangguh dan mampu berkompetisi dengan baik dalam persaingan.



Terlepas dari strategi tersebut, salah satu komponen yang berkaitan langsung dalam pembinaan kelompok usia muda adalah aspek olah raga. Kekuatan kepemudaan akan muncul dengan terintegrasinya pengembangan manusia melalui strategi keolahragaan. Dengan olah raga secara ilmiah akan muncul ketahanan jasmani melalui kekuatan stamina dan ketahanan rohani melalui kekuatan emosional yang semuanya akan mengarah pada pola kreativitas dan produktivitas pemuda sehingga target pembangunan dan ketahanan bangsa dapat berjalan dengan baik dalam kebijakan pembangunan daerah.

Strategi inilah kedepan yang akan dikembangkan dalam pola pembangunan daerah Kabupaten Pasaman yang dapat menggali potensi dan kreativitas pemuda dalam wujud pembangunan baik dari prestasi olahraga, ketahanan daerah dan produktivitas dalam pembangunan. Sehingga perubahan dari struktur usia penduduk yang mengarah pada pertumbuhan kelompok usia muda yang relatif tinggi dapat dijadikan manfaat pembangunan dan bukan sebagai persoalan dalam pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Kepemudaan dan Olah Raga

Mengingat potensi dari olah raga dan kepemudaan dapat mengembangkan unsur emosional, peningkatan kesehatan dan kecerdasan emosional pemuda, maka Pasaman perlu menggalakkan keolahragaan pada prioritas keolahragaan yang spesifik. Untuk mewujudkan hal itu, maka strategy yang dilakukan adalah:

- a. **Menumbuhkan kegiatan** keolahragaan dengan rangsangan kompetisi kegiatan keolahragaan secara regular antar nagari dan kecamatan. Prioritas



pilihan keolahragaan adalah yang terkait dengan olah raga berkelompok seperti bola voli dan bola kaki.

- b. **Mengembangkan kegiatan karangtaruna** per nagari yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran berorganisasi dan dilengkapi dengan pengembangan *life skill*. Sehingga program kepemudaan diharapkan dapat memenuhi dua arah yang jelas.

Program Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Program peningkatan olahraga dan paradigma hidup sehat masyarakat kabupaten Pasaman
- b. Program peningkatan olahraga untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia kabupaten pasaman
- c. Program pemberdayaan olahraga bagi generasi muda dan peningkatan generasi muda untuk berolahraga
- d. Program pemberdayaan olahraga untuk mendukung peningkatan olahraga prestasi kabupaten Pasaman.
- e. Program pembangunan sumberdaya manusia yang mendukung peningkatan olahraga prestasi kabupaten pasaman
- f. Program pengembangan prasarana dan sarana olahraga untuk mendukung peningkatan olahraga kabupaten pasaman
- g. Program peningkatan olahraga sebagai industri dan bisnis
- h. Program dukungan karang taruna terhadap *life skill* dan keorganisasian
- i. Program event yang rutin dan kompetisi antar nagari serta kecamatan, dilanjutkan dengan program partisipasi terhadap event regional maupun nasional (prioritas kepada olahraga yang dikuasai oleh masyarakat pasaman.



- j. Program peningkatan perencanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga dan ketersediaan data yang akurat.
- k. Program pengembangan organisasi kepemudaan dan olahraga
- l. Program pemberian kesempatan dan dukungan untuk mengikuti pelatihan/penataran/dan mengikuti lomba di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- m. Program peningkatan pembinaan prestasipelatih di bidang kepemudaan dan keolahragaan
- n. Program pelayanan data dan informasi

F. Bidang Ketertiban Umum

Ketertiban umum merupakan prasyarat bagi terwujudnya lingkungan yang kondusif sebagai landasan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu peran serta seluruh masyarakat untuk memelihara ketertiban umum amat menentukan bagi terciptanya iklim yang sehat dan kondusif.

Pada dasarnya ada jika ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada tersebut dijalankan maka problem ketertiban umum dalam penertiban-penertiban umum tidak akan muncul. Berbagai peraturan-peraturan yang pada umumnya berguna untuk ketertiban umum yang ditujukan untuk mendapatkan rasa keamanan bersama. Akan tetapi pada bahagian ketertiban umum selalu muncul masalah yang biasanya menjurus ke persoalan konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau sebaliknya.



Ketertiban hukum dan ketertiban umum sangat penting artinya dalam membentuk perilaku yang bertanggungjawab baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah sendiri sebagai aparat penegak hukum dan penatalaksana kehidupan bernegara pada tingkat daerah. Ketertiban umum dan ketertiban hukum perlu diwujudkan guna pencapaian stabilitas yang mantap dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah dan Strategi Kebijakan

Kedepan arah dan strategi kebijakan yang perlu disusun oleh pemerintah Kabupaten Pasaman adalah perlu menyusun serangkaian prosedur ketetapan yang baku bagi pelaksanaan ketertiban di berbagai bidang sehingga ada kepastian perlindungan terhadap pelaksana ketertiban di lapangan dan serta berbagai jaminan untuk kedua belah pihak antara penertib dan yang dितertibkan sehingga ada jaminan kepastian hukum.

Program

Mengingat masalah ketertiban umum ini adalah masalah yang selalu memunculkan ketidakpuasan maka program yang perlu didesain adalah program kegiatan yang lebih jelas dan konkrit untuk mengembalikan kesadaran hukum bagi lapisan masyarakat dan bagi aparat sendiri sebagai pengekses dari kegiatan ketertiban umum dan ketertiban hukum yang mulai luntur. Serta menegakkan ketertiban hukum berdasarkan tata aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak legislatif bersama pemerintahan kabupaten serta menyeimbangkan antara pemberian



reward dan *punishment* bagi pelanggar dan juga bagi yang tertib mentaati hukum. Maka selain penyuluhan yang paling penting adalah pendampingan berupa advokasi bagi mereka-mereka yang kurang paham terhadap tata aturan.

Dan juga yang perlu menjadi perhatian adalah program pengembangan kapasitas kemampuan teknis dan kemampuan penanganan psikologi massa dari polisi pamong praja dan polisi kehutanan sehingga kualitas penanganan ketertiban umum bisa maksimal dan memberikan efek pendidikan bagi masyarakat umum dan dengan polisi pamong praja akan lebih profesional dalam menangani berbagai kasus ketertiban umum.

BAB II

ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

2.1. Pengelolaan dan Isu Lingkungan

Laporan SLHD tahun 2007 berusaha lebih tertib menggunakan pendekatan analisis SPR (*State, Preesure dan Response*) namun belum seluruh bab bisa tersusun sesuai dengan urutan logika SPR. Keterbatasan data menjadi hambatan penggunaan SPR. Sebagian kebijakan dan kegiatan yang bukan merupakan respon dari kondisi atau tekanan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari kegiatan pembangunan Nasional, seperti ditetapkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-



undang Dasar 1945 Amandemen ke-2 menyatakan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan" serta pasal 33 ayat (4) menyatakan "perkonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesien, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Seiring dengan hal itu, pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan azas tanggung jawab negara, berkelanjutan, dan manfaat mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pola pembangunan tersebut mengandung makna mengusahakan hasil yang sebaik-baiknya dari sumber alam yang tersedia seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan, dengan cara memelihara kualitas dan potensi sumberdaya alam sepanjang masa. Oleh sebab itu degradasi lingkungan yang terus terjadi di Kabupaten Pasaman pada dasarnya timbul dari berbagai kegiatan manusia yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup itu sendiri dan akibatnya berbagai bencana lingkungan muncul dan mengganggu kehidupan manusia.

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan aspek yang penting dibicarakan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) tidak hanya menyangkut lingkungan alam saja, namun juga meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Ketiga komponen ini saling berkaitan satu



sama lainnya. Untuk menghindari dan mengatasi terjadinya ancaman degradasi lingkungan itu tidak hanya tugas pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga setiap kita sebagai *stakeholder* mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga sumberdaya alam dan lingkungan untuk diwariskan kepada anak cucu kita.

Prinsip pembangunan berkelanjutan menghendaki agar kegiatan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial, karena berdasarkan pengalaman pada beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin besar dan dikhawatirkan akan melebihi daya dukungnya.

Menurut Jamaluddin Jalil (1992) munculnya isu-isu lingkungan seperti pencemaran air, udara, sampah yang dapat mengancam keseluruhan ekosistem memerlukan penanganan melalui langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup dan menurut Mubarig Ahmad (2004) pembangunan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan jika ada partisipasi masyarakat secara aktif dan transparansi dalam kebijakan publik dan didukung oleh Otto Soemarwoto (1992) salah satu metode untuk dapat menghindari terjadinya masalah sosial budaya dan lingkungan dari suatu rencana usaha dan / atau kegiatan adalah dengan melakukan analisis dampak lingkungan. Namun metode ini hanya efektif bila Analisis Dampak Lingkungan diintegrasikan dengan telaah kelayakan teknis dan ekonomi. Biasanya analisis dampak lingkungan dilaksanakan setelah telaah kelayakan teknis dan ekonomi selesai dan setelah diambil keputusan untuk melaksanakan proyek yang



direncanakan itu. Sehingga Sering terjadi gejolak sosial dan pencemaran sebagai dampak proyek.

Secara umum Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mengakomodasi aspek pelestarian lingkungan. Pendekatan yang dilakukan masih bersifat sektoral, sehingga tidak ada korelasi dan keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan pembangunan yang lain sehingga menimbulkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Dampak dari kegiatan pembangunan dapat meluas menjadi isu lingkungan yang bersifat kompleks dan global.

Di lihat dari kondisi saat ini seringkali ditemukan bahwa persoalan lingkungan hidup masih belum menjadi salah satu dasar pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah daerah. Kegagalan pendekatan kebijakan *command and control* adalah ketidak mampuan pemerintah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan dimana aturan cenderung berlebihan jumlahnya dan menjadi alat penyimpangan sehingga masalah lingkungan hidup yang akan muncul antara lain pencemaran air, udara, tanah, dan kerusakan hutan dan lahan, kerusakan DAS, serta masalah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3.

Lemahnya kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan masalah krusial yang menyebabkan hak - hak masyarakat untuk menikmatinya menjadi terbatas dan justru menimbulkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Seringkali setiap kegiatan dilakukan tanpa Pelaksanaan pembangunan juga diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang tidak terlepas dengan sumberdaya alam dan sumber daya manusia sebagai pelaksana. Sedangkan sumberdaya buatan terwujud dari



Seiring perkembangan Kabupaten Pasaman sesuai dengan visi misi dari Kabupaten Pasaman yakni “terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik” Kabupaten Pasaman mulai mengeliat di bidang Pertambangan dan energi dan perkebunan telah banyaknya masuk calon investor ke Kabupaten Pasaman dalam rangka menggali potensi sumber daya alam yang ada, antara lain : **emas, Timah Hitam, Bijih Besi, Batu Bara, Pasir Kuarsa**, dll. Kegiatan penambangan tersebut yang terealisasi baru satu (1) yaitu kegiatan penambangan bijih besi yang dilakukan oleh perusahaan **PT. Mranti Mas Pratama** yang berlokasi di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara sedang untuk kegiatan tambang lainnya masih terkendala karena berada dalam kasawan lindung. Selain itu usaha pemerintah Kabupten Pasaman telah merivisi RTRW Kabupaten Pasaman sehingga nantinya diharapkan sebagian hutan lindung dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tambang dan lain sebagainya. Selain itu Kabupaten Pasaman sedang mewujudkan kemajuan di segala bidang, sangat didukung oleh keberadaan sumberdaya alamnya. Namun apabila tidak dilakukan secara bijaksana akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Secara garis besar, beberapa permasalahan lingkungan hidup yang menonjol di Kabupaten Pasaman adalah:

A. Kualitas Air

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung, bertujuan untuk mempertahankan fungsi hidrologis DAS.

Reboisasi hutan lindung bertujuan untuk meningkatkan mutu hutan lindung dan

Masalah kualitas air di Kabupaten Pasaman yang perlu mendapat perhatian

adalah kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) mengingat kabupaten ini dilalui



oleh 200 sungai. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya lahan kritis/ lahan tidak produktif sepanjang DAS akibat penebangan yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu pencemaran air disebabkan juga oleh aktivitas harian penduduk yang dilakukan disungai serta diperburuk perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai.

B. Kualitas Udara

Kualitas udara di Kabupaten Pasaman adalah masih terkawal. Pencemaran udara bersumber dari emisi kendaraan bermotor dan perusahaan AMP dimana kegiatan tersebut tidak terlalu berpengaruh karena disebabkan operasional dari AMP tersebut tidak melakukan kegiatan tiap hari, sedangkan industri tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas udara karena kebanyakan merupakan industri berskala kecil.

C. Ancaman Kerusakan Hutan

Hutan sebagai sumberdaya alam yang tak ternilai harganya, disamping sebagai sumber ekonomi namun yang tak kalah pentingnya ia bertindak sebagai menjaga keseimbangan ekologi. Hutan menyimpan air sewaktu terjadinya hujan, sebagai *catchment* area dan juga melambatkan larian air permukaan (*run off*) ke sungai, menjaga kestabilan iklim mikro, sumber keanekaragaman hayati. Pengelolaan hutan tanpa mempertimbangkan aspek konservasi dan kelestariannya tentunya akan mengancam keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (**Surtahman Kastin Hasan, 1997**). Sehubungan dengan itu, Kabupaten Pasaman yang kaya dengan keberadaan sumberdaya alam tidak terlepas dari ancaman kerusakan hutan, seandainya pengelolaan sumberdaya



alamnya tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Beberapa permasalahan yang akan timbul akibat kerusakan hutan, misalnya penebangan hutan ilegal, eksploitasi hutan secara sewenang-wenang. sehingga meningkatkan keluasan lahan kritis, rusaknya hutan pada hulu sungai yang berdampak pada kerusakan DAS, erosi, tanah lonsor, banjir dan lain-lain.

Maka pengelolaan lingkungan menjadi salah satu kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah Informasi tentang lingkungan hidup Kabupaten Pasaman perlu disusun sebagai akutanbilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan bagi publik serta sarana keterlibatan publik untuk ikut berperan menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan diperhatikan daya dukung nya.

Di Kabupaten Pasaman, kendala dalam pengendalian lingkungan ini masih saja terjadi. Berbagai isu lingkungan yang diungkapkan di dalam Laporan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup (NKLD) Kabupaten Pasaman, Laporan Kualitas Sumber Daya Alam dan Pemukiman (LKSDA-P) Kabupaten Pasaman Tahun 2003, Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pasaman Tahun 2004, Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD) Tahun 2005, Laporan Kualitas Sumber Daya Alam dan Pemukiman (LKSDA-P) Kabupaten Pasaman Tahun 2007 serta Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD) Tahun 2006 masih menjadi isu utama yang mengemuka.

Diantara isu lingkungan yang menjadi sorotan dalam tahun 2007 selain dari permasalahan lingkungan diatas (kualitas air, kualitas udara dan ancaman perusakan hutan) adalah sebagai berikut :

1. Alih Fungsi Lahan dan Lahan Kritis



Kebutuhan lahan untuk pembangunan makin meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Namun dilain pihak ketersediaan tersebut relatif tetap. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan secara cepat dan besar tanpa memperhatikan aspek tata ruang, konservasi tanah dan lingkungan, sehingga akan menimbulkan dampak terhadap penurunan produktifitas lahan dengan cepat. Permasalahan lingkungan yang terus dan semakin menjadi perhatian serius yang dapat kita cermati secara bersama adalah pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah sehingga mempercepat degradasi tingkat kesuburan tanah, dan ini akan menambah lahan kritis di Kabupaten Pasaman.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kabupaten Pasaman lahan untuk pembangunan makin meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi lahan di Kabupaten Pasaman secara umum sudah banyak yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagai media pengatur tata air, perlindungan tanah dan unsur produksi pertanian. Program konservasi tanah terhadap lahan kritis dalam bentuk semak belukar, alang-alang, lahan gundul dan pertanian lahan kering belum optimal

Berdasarkan data dari Analisa Pokok Pembangunan Bappeda Kabupaten Pasaman luas lahan menurut penggunaanya sebesar 401.108 ha. Dari luas tersebut berdasarkan data yang terhimpun untuk 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman misalnya Kecamatan Bonjol luas lahan kritis berjumlah 11.029,95 ha atau sekitar 4,12 % dari luas kawasan hutan berada dalam kondisi kritis, diperkirakan dalam tahun 2007/2008, akan terjadi perubahan



pemanfaatan lahan yang cukup berarti atau signifikan, karena mulai dilirikny beberapa daerah di Kabupaten Pasaman sebagai kawasan pertambangan umum, pertanian dan perkebunan yang menjanjikan. Perubahan pemanfaatan lahan merupakan fenomena yang mengindikasikan telah terjadinya penekanan sumber daya lahan. Perubahan itu menggambarkan tingginya kebutuhan akan lahan dari waktu ke waktu. Sesuatu yang dikhawatirkan di masa yang akan datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan lahan pada kawasan lindung yang tak terkendali. Upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi areal budidaya juga semakin meningkat. Adanya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan kawasan lindung yang cenderung bertambah di Kabupaten Pasaman sudah sepiantasnya diwaspadai oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Pada kawasan – kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan, jasa dan keperluan kegiatan lainnya seperti halnya pada kawasan – kawasan di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman.

Salah satu permasalahan lingkungan di Kabupaten Pasaman yang akan timbul secara berantai adalah perubahan lahan seiring dengan dibukanya Jalan Rao – Rokan Hulu yang menghubungkan Kecamatan Rao dengan Kabupaten Rokan Hulu. Dengan terbukanya jalan alternatif ini maka sudah banyak penebangan kayu di kanan dan kiri jalan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Penebangan kayu serta pemanfaatan sumber daya hutan lainnya yang tidak terkendali akan sangat besar pengaruhnya dan akan berimplikasi besar terhadap fungsi kawasan hutan sebagai catchment area



bagi irigasi Panti – Rao yang merupakan penyuplai air irigasi bagi sebagian besar kawasan pertanian di daerah tersebut.

2. Banjir

Di Kabupaten Pasaman terdapat beberapa lokasi yang rawan banjir karena dialiri oleh 10 buah sungai besar. Sungai – sungai tersebut adalah Batang Masang, Batang Fatimah, Batang Sumpur, Batang Alahan Panjang, Batang Tingkarang, Batang Sontang, Batang Sibinail, Batang Asik, Batang Pasaman, dan Batang Tibawan. Bencana banjir hampir selalu terjadi pada tiap tahunnya di Kabupaten Pasaman, terutama pada saat curah hujan tinggi. Permasalahan banjir ternyata masih belum mampu untuk dikendalikan sebagaimana mestinya, walaupun telah dibenahi berbagai sarana untuk pengendaliannya.

Penyebab dari permasalahan banjir di Kabupaten Pasaman ini tak lepas dari berbagai faktor curah hujan dan pembukaan lahan pada hulu sungai yang menyebabkan erosi cukup tinggi sehingga terjadi sedimentasi dari erosi permukaan sungai, dengan demikian akan terjadi pendakalan dan penyempitan pada badan sungai serta merusak alur sungai. Selain itu banjir sering terjadi pada daerah rentang aliran sungai, banjir disebabkan oleh hujan yang tinggi serta penutupan lahan yang sudah banyak terbuka atau rusak dalam bentuk lahan tandus, semak belukar dan padang alang – alang yang tidak dapat menahan dan menyimpan air hujan dalam waktu yang lama sehingga debit air permukaan menjadi tinggi.



Aliran air terdiri atas dua bagian, yaitu aliran dasar dan aliran langsung yang berasal dari air larian. Aliran dasar berasal dari air simpanan yang mengalir ke sungai dari mata air. Resiko banjir pada DAS yang memiliki hutan dengan baik adalah kecil. Karena itu sudah sewajarnya hutan dimanfaatkan secara baik sehingga nilai koefisien air larian tidak meningkat sehingga pemanfaatannya tidak menyebabkan kenaikan resiko banjir. Misalnya padang berpindah – pindah yang mempunyai daur yang panjang, pembabatan dengan sistem tebang pilih yang tidak banyak merusak tumbuhan bawah dan seresah. Apabila di suatu DAS banyak dilakukan konversi hutan menjadi tata guna lahan air-pertanian, maka akan terjadi peningkatan koefisien air larian. Jika ini dilakukan di DAS bagian hulu yang bercurah hujan tinggi maka resiko terjadinya banjir besar, terutama banjir bandang.

Beberapa lokasi rawan banjir di Kabupaten Pasaman antara lain Kecamatan Rao Utara Nagari Koto Nopan yang dilalui aliran Batang Asik, Batang Patah dan Batang Air Mati, Kecamatan Tigo Nagari Nagari Malampah yang dilalui oleh Batang Boamah dan Batang Patimah, Kecamatan Bonjol Nagari Ganggo Mudisk dan Ganggo Hilia yang dilalui oleh Batang batang alahan panjang, Kecamatan Panti Nagari panti yang dilalui oleh Batang Batang Sumpur, Rao dan Rao nSelatan Nagari Lansek Kadap dan Nagari Lubuak Layang yang dilalui Sungai Tikarang dan Air Sibinah, Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Lubuk Sikaping Nagari Alahan mati dan Nagari air manggis dan Sundatar yang dilalui oleh Air Taran, Batang Simpat dan Batang Sumpur.



3. Longsor

Adanya kecenderungan masyarakat untuk menempati dan memanfaatkan kawasan yang rawan longsor sebagai tempat hunian menyebabkan meningkatnya kebutuhan lokasi pemukiman yang sejalan dengan perkembangan penduduk. Disamping susunan geologi dan curah hujan, hutan mempunyai peranan dalam terjadinya tanah longsor, karena pengaruh penebangan hutan dan pembuatan jalan dalam hutan juga sebagai penyebab terjadinya longsor. Peristiwa longsor dapat diartikan sebagai proses gerakan massa tanah yang terjadi akibat adanya proses geologi. Faktor utama penyebab terjadinya gerakan massa tanah atau longsor di suatu lokasi antara lain :

1. Kemiringan atau kelerengan tanah yang tergolong terjal dengan sudut lereng lebih besar dari 90 % seperti yang terdapat di Kecamatan Panti
2. Adanya sesar (patahan) dalam bentuk sesar naik, sesar turun dan sesar geser yang merupakan hasil dari proses tektogenesis.
3. Adanya singkapan batuan (rock outcrop) dalam ukuran besar yang terletak pada lereng-lereng yang terjal. Sementara itu pada beberapa lokasi juga ditemukan tebing terjal menggantung (hanging cliff) di beberapa Kecamatan yang ada di kabupaten Pasaman.
4. Perubahan fungsi kawasan.

4. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



Pencemaran air di Kabupaten Pasaman pada tahun 2007 masih didominasi oleh pencemaran akibat kegiatan pertambangan rakyat, pertambangan liar, lingkungan pembukaan lahan perkebunan, dan pembukaan lahan tambang, pasar dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah, kemudian masih terdapat pertambangan rakyat dan pertambangan liar pada beberapa ruas sungai yang dapat mengakibatkan pencemaran, karena mereka menggunakan bahan – bahan kimia dalam proses pengolahan hasil tambang tersebut. Keadaan ini terungkap dari beberapa kali pemeriksaan mendadak (sidak) yang dilakukan oleh instansi teknis terkait. Disadari atau tidak, problem lingkungan telah menjadi salah satu momok yang sangat menakutkan bagi sebagian manusia. Disatu sisi manusia sibuk mengurus masalah pencemaran lingkungan tapi di lain pihak sebagian yang lainnya sibuk pula meningkatkan problem pencemaran lingkungan di muka bumi.

Isu pencemaran didominasi oleh pencemaran akibat kegiatan industri seperti AMP (Asphalt Mixing Plant) dan Stone Crusher, industri-industri pakan ternak, industri – industri rumah tangga seperti pembuatan jerat babi, operasional rumah makan atau restoran, usaha servis kendaraan dan lain-lain. Kegiatannya cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Pasaman yang penyebaran pencemarannya tidak mengenal batas administratif sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan disebabkan daya dukung lingkungan itu sendiri tidak mencukupi.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan hasil monitoring Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman dan Bapedalda Propinsi Sumatera Barat, tingkat pencemaran Sungai yang paling utama terjadi di Kecamatan Bonjol dan Kecamatan Bonjol dan Kecamatan



Duo Koto yaitu meningkatnya kadar Hg (air raksa) yang merupakan limbah dari kegiatan pengolahan emas, dan limbah B3. Hasil analisis laboratorium menunjukkan, bahwa dari beberapa parameter seperti Coliform, BO D, CO D, minyak/lemak, serta beberapa jenis logam berat terutama oleh Zn dan Cu. Nilai parameter di atas diatas hal ini disebabkan karena belum adanya TPA yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) kemudian terbatasnya sarana dan dana pendukung operasional penanggulangan sampah. Dalam kenyataannya masyarakat masih banyak membuang sampah kesungai, riol dan parit sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Disamping itu sampah yang berasal dari rumah tangga, rumah makan, pertokoan dan pasar dan lain sebagainya rata – rata mencapai 100 M³/hari, sedangkan yang dapat diangkut saat ini sekitar 75 M³/hari, berarti hanya sekitar 75 % per hari. Hingga saat ini jumlah penduduk yang telah terlayani oleh Dinas lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan baru mencapai 75 % dari total penduduk yang berada di kota Lubuk Sikaping.

5. Masalah Sosial

a. Pemukiman

Pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Pasaman pada berbagai sektor, otomatis juga akan berimbas kepada perkembangan kawasan pemukiman (perumnas) dengan memanfaatkan lahan yang ada tanpa memperhatikan lingkungan sekitar seperti pembabatan hutan. Hal ini jika tidak ditata secara teknis dan terpadu, mengakibatkan akan timbul berbagai masalah seperti pembukaan lahan baru, pencemaran



dan perusakan hutan, yang nantinya menurunkan kualitas sumberdaya lingkungan.

b. Tenaga Kesehatan

Berdasarkan data yang ada kondisi kesehatan masyarakat cenderung membaik dan mengalami peningkatan dari tahun – tahun, keberhasilan itu tidak lepas dari peran serta pemerintah melalui instansi terkait yang semakin meningkatkan pelayanannya serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Permasalahan yang sering terjadi di bidang kesehatan adalah munculnya beberapa jenis penyakit yang menyerang masyarakat secara mendadak seperti demam berdarah, malaria dan diare. Untuk mengatasi masalah tersebut diatas perlu pemerataan penempatan tenaga medis seperti tenaga dokter, bidan dan para medis yang ada di masing masing puskesmas.

2.2. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Dalam menjaga kualitas lingkungan agar tetap dalam kondisi yang baik dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pasaman, namun pada saat ini kesadaran masyarakat tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Tingginya tuntutan hidup dan tekanan ekonomi, telah memicu masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhitungkan dampak terhadap lingkungan. Peluang ini semakin dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari jangkauan pengawasan aparat penegak hukum. Usaha pengrusakan kawasan lindung terlihat semakin bertambah, seiring dengan



lemahnya penegakan hukum terhadap oknum dan masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan.

Kompleknya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pasaman menuntut solusi secara multi dimensi dan komprehensif. Salah satu faktor penentu berhasil tidaknya upaya pemecahan masalah adalah peran serta seluruh lapisan masyarakat. Namun pada kenyataannya hal ini masih menghadapi persoalan yang cukup rumit dan sensitif, sehingga keterlibatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemantauan relatif kecil, sehingga upaya-upaya penanganan yang dilakukan tidak tepat waktu dan sasaran. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang dan kaidah pemanfaatan yang berkelanjutan dalam proses pembangunan.
- b. Belum memadainya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keterkaitan antara kependudukan dan lingkungan hidup.
- c. Masih lemahnya penerapan hukum lingkungan yang terlihat dari penyelesaian kasus-kasus lingkungan yang terjadi, sehingga masyarakat apatis terhadap terjadinya pelanggaran hukum lingkungan.

Pemerintah telah cukup banyak melakukan upaya dan kegiatan yang dapat mendorong timbulnya motivasi masyarakat untuk menjaga lingkungan, namun kebijakan tersebut dirasakan belum memadai, disebabkan adanya keterbatasan dana yang dialokasikan pemerintah serta belum terpadunya mekanisme pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam masalah lingkungan pada umumnya



ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengaduan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap pelanggaran hukum lingkungan serta keterlibatan / peran serta aktif unsur pers/media massa dalam memberikan informasi pencemaran dan pengrusakan lingkungan akibat berbagai kegiatan penambangan.

3.3. Aktifitas Menjaga Lingkungan

Aktifitas menjaga lingkungan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh semua pihak secara konsekwen sebagaimana yang dinyatakan dalam undang undang no. 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun kegiatan menjaga lingkungan yang dilakukan di kabupaten Pasaman selalu diimbangi oleh kegiatan yang dapat merusak dan mencemari lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang intensitasnya lebih kuat dari menjaga lingkungan. Akibat tidak seimbang nya upaya menjaga lingkungan dengan tindakan pengrusakan lingkungan berdampak pada semakin meningkatnya degradasi lingkungan yang memerlukan pemulihan secepatnya.

Upaya untuk menjaga kualitas lingkungan agar senantiasa terpelihara dengan baik, sesungguhnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pasaman selaku pengambil kebijakan di daerah ini, seyogyanya aktifitas menjaga lingkungan menja di tanggung jawab semua komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Berdasarkan kenyataannya, aktivitas menjaga lingkungan dari kalangan swasta dan masyarakat di Kabupaten Pasaman masih sangat minim. Beberapa contoh konsorsium yang bergerak di bidang lingkungan di Kabupaten Pasaman seperti LSM Peduli Lingkungan, dan LSM lingkungan hidup yang lain. Aktivitas pengelolaan lingkungan yang sangat perlu diperhatikan setidaknya dalam waktu dekat adalah pengelolaan sampah, aliran sungai beserta daerah alirannya serta



pengelelolaan hutan. Saat ini masih terjadi pemanfaatan hutan tanpa mempertimbangkan prinsip ekologi, keragaman hayati dan kelestariannya.

Untuk menjaga lingkungan dunia usaha dan industri di Kabupaten Pasaman juga masih belum seperti yang diharapkan. Beberapa sungai yang ada di Kabupaten Pasaman – Batang Pasaman di Kecamatan Duo Koto, Batang Asik di Kecamatan Rao Utara, Batang Alahan Panjang di Kecamatan Bonjol dan batang Sumpur di Kecamatan Lubuk Sikaping telah dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan penambangan emas yang langsung diolah dibadan air. Disamping itu laporan masyarakat tentang pencemaran Batang Alahan Panjang, dan batang Pasaman akibat dari penambangan emas secara liar. Oleh sebab itu ancaman degradasi lingkungan harus diwaspadai, tidak hanya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan di Kabupaten Pasaman, akan tetapi setiap warga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan sumber daya alam dan lingkungan untuk di wa riskan kepada generasi berikutnya.



BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Analisis lingkungan hidup Kabupaten Pasaman tahun 2007, merupakan gambaran lingkungan dalam rangkaian yang utuh meliputi :

- a. Kondisi atau Status (*state*) lingkungan alam, lingkungan buatan maupun lingkungan konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan secara transparan.
- b. Tekanan (*Pressure*) yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup beserta analisisnya.
- c. Dampak (*imfact*) yang terjadi akibat adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- d. Langkah – langkah penanggulangan (*response*) yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun segenap lapisan masyarakat, keberhasilan dan kegagalan yang dialami, upaya penataan dan penegakan hukum, tantangan, kendala, dan hambatan dalam upaya melakukan restorasi atau pemulihan lingkungan.



Dengan pendekatan ini telah dilakukan analisis secara kausatif yang menjadi penyebab tekanan, sehingga terjadi perubahan terhadap lingkungan, baik dalam bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan alami, maupun buatan perubahan lingkungan sosial ekonomi dan budaya. Hasil analisis terhadap perubahan kondisi lingkungan baik lingkungan alami maupun lingkungan sebagai akibat adanya tekanan akan menjadi dasar dalam pengambilan tindakan (respon) oleh pemerintah Kabupaten psaman maupun segenap lapisan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan atau tindakan pemulihan lingkungan. Sementara itu tingkat kesadaran masyarakat serta aktifitas masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup akan melengkapi hasil terhadap perubahan lingkungan.

3.1. Sumber Daya Alam

Lingkungan alam merupakan lingkungan yang terdiri dari sumber : Lahan dan Hutan, Sungai, Air, Udara dan Atmosfer, keanekaragaman hayati, Pertambangan dan Energi dan daerah rawan dampak. Lingkungan tersebut menjadi faktor pembanding dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya.

Luas dari Kabupaten Pasaman sebagian besar didominasi oleh hutan. Hutan - hutan di Kabupaten Pasaman berada pada daerah hulu dari sungai-sungai besar seperti Batang Sumpur dan Batang Masang. Kondisi morfologi daerah tersebut bergelombang dan bergunung, dengan rangkaian perbukitan yang



ditutupi oleh hutan dari utara ke selatan yang ditemui hampir di semua kecamatan.

3.1.1. Hutan

Dewasa ini laju degradasi hutan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju upaya untuk perlindungan dan pelestarian hutan.

Dari identifikasi penyebab degradasi hutan, ada 4 (empat) faktor penyebab degradasi hutan, yakni :

1. Pembakaran Hutan

Kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan merupakan masalah serius baik secara ekologi, social dan ekonomi antara lain : hilangnya tegalan, meningkatnya lahan kritis, pencemaran udara, penurunan keanekaragaman hayati, kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, erosi, banjir, dan lain - lain.

2. Illegal Logging

Praktek illegal logging hampir seluruhnya terjadi pada kawasan hutan, termasuk pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Hal tersebut dikarenakan provokasi manusia yang memanfaatkan situasi reformasi sekarang ini.

3. Pencurian Kayu

Pencurian kayu umumnya terjadi pada skala kecil yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengatasi tekanan hidup atau pemenuhan kebutuhan sehari - hari, walaupun dalam skala kecil namun intensitasnya cukup tinggi, sehingga kerusakan yang ditimbulkan cukup nyata.



4. Perladangan Berpindah (*Shifting Cultivation*)

Praktek pertanian dengan sistem ini pada kawasan hutan berdampak terbentuknya lahan-lahan kritis yang didominasi oleh alang-alang.

Dari data Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Tahun 2007 terlihat bahwa Hutan Suaka Alam dan Wisata mencapai luas 18.945 Ha, atau sekitar 4,72 % dari luas wilayah Kabupaten Pasaman. Hutan lindung seluas 226.563 Ha atau mencapai 56,50% dari luas Kabupaten Pasaman. Hutan Produksi Terbatas hanya 7.400 Ha atau sekitar 1,84 %, sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.200 Ha atau sekitar 1,54 % dari luas Kabupaten Pasaman, sedangkan penggunaan hutan peruntukan lain-lain seluas 142.000 Ha, sekitar 35,40 %. Data tersebut diatas dapat dilihat pada kumpulan data SDA Tabel 3.12.

Penggunaan lahan di Kabupaten Pasaman pada tahun 2007 masih didominasi oleh kawasan hutan seluas 190.453 Ha atau sebesar 47,48 % dari luas Kabupaten, menyusul hutan sejenis 81.622 Ha atau 20,35 % dan tanah/hutan belukar 37.341 Ha atau 9,31 %. (SDA Tabel 3.14)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa lahan yang telah diusahakan hanya mencapai 30,58 % dari luas wilayah Kabupaten Pasaman yang terdiri dari perkampungan seluas 7.190 Ha (1,80 %), sawah irigasi dan tadah hujan seluas 26.533 Ha (6,61%) tegalan / ladang 8.211 Ha (2,05%) perkebunan seluas 33.167 Ha (8,17%), sedangkan lahan yang belum dan tidak dimanfaatkan sebesar 33,79 % dari luas wilayah keseluruhan yang terdiri dari perairan, padang rumput, hutan/tanah belukar dan lain-lain. (SDA Tabel 3.14)



Luas kerusakan hutan di Kabupaten Pasaman yang ada 7 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada adalah : 65.763 Ha yang terdiri dari kerusakan akibat : Penebangan liar : 12.548,5Ha, Lahan Kritis : 39.882,5 Ha, Lahan yang sudah Dibakar : 5.511 Ha, dan Pembukaan Lahan untuk Perkebunan : 7.821 Ha. (SDA tabel 3.3). Data detail perincian ketersediaan tanah di Kabupaten Pasaman terlihat SDA Tabel 3.15, selain itu luas lahan kritis di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman berjumlah 189.890,17 Ha (SDA tabel 3.5). selain itu Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Kehutan telah melakukan antisipasi mengenai masalah hutan melalui kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Lahan (GNRHL) dari tahun ketahun yang terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman yakni untuk tahun anggaran 2004/2005 kegiatan dilakukan tahun 2005 kegiatan terdapat pada Rao Utara dan Kecamatan Duo Koto dengan luas masing-masing 100 s/d 200 Ha dengan jenis kegiatan Hutan rakyat dan Reboisasi, pada tahun anggaran 2005/2006 kegiatan dilakukan pada tahun 2006 berada di Kecamatan mapat Tunggul Selatan dengan luas 50 s/d 250 Ha dimana kegiatan masing-masingnya berupa Hutan Rakyat, Reboisasi, dan Hutan Rakyat Pengkayang. Untuk tahun 2006/2007 yang pelaksanaanya dilakukan pada tahun 2007 nluasan berkisar 50 s/d 150 Ha di Kecamatan Rao Selatan, Lubuk Sikaping dan Duo Koto dengan jenis kegiatannya Hutan Rakyat untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan Data SDA tabel 3.6.



Untuk data kerusakan hutan yang terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman adalah :

A. Kecamatan Tigo Nagari

Kecamatan Tigo Nagari terdiri dari 3 kenagarian yaitu Kenagarian Binjai, Kenagarian Ladang Panjang dan Kenagarian Malampah. Kerusakan hutan terjadi hampir terdapat pada semua kenagarian, tetapi yang cukup menonjol adalah di Kenagarian Binjai dan Kenagarian Ladang Panjang. Bentuk kerusakan hutan yang terjadi adalah lahan kritis, akibat penebangan liar dan perladangan berpindah.

Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan liar adalah seluas 70 Ha dan akibat perladangan berpindah adalah seluas 142 Ha. Sedangkan jumlah lahan kritis yang terdapat di Kecamatan Tigo Nagari adalah seluas 1.360 Ha. Selengkapnyanya data lokasi kerusakan hutan di Kecamatan Tigo Nagari. Untuk lebih jelas lihat kumpulan data SDA Tabel 3.16.

B. Kecamatan Bonjol

Kecamatan Bonjol terdiri dari 6 Kenagarian yaitu kenagarian Gango Mudik, Kenagarian Ganggo Hilir, Kenagarian Limo Koto Kumpulan, Kenagarian Koto Kadak, Kenagarian Alahan Mati dan Kenagarian Simpang.

Kerusakan hutan terjadi hampir terdapat pada semua Kenagarian, tetapi yang cukup menonjol adalah terjadinya perladangan berpindah pada 4 (empat) Kenagarian yaitu Kenagarian Ganggo Mudik, Kenagarian



Ganggo Hilia, Kenagarian Alahan Mati, Kenagarian Simpang. Sedangkan pada 2 (dua) Kenagarian lainnya yaitu Kenagarian Limo Koto Kumpulan dan Kenagarian Koto Kadiak terdapat lahan kritis.

Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perladangan berpindah adalah seluas 1.095 Ha dan yang merupakan lahan kritis adalah seluas 750 Ha serta akibat pembuatan kebun seluas 85 Ha. Sedangkan kerusakan hutan akibat penebangan liar tidak ada. Selengkapnya data lokasi kerusakan hutan di Kecamatan Bonjol. Untuk lebih jelas lihat Kumpulan Data SDA Tabel 3.17.

C. Kecamatan Panti

Kecamatan Panti terdiri dari 2 (dua) Kenagarian yaitu Kenagarian Panti dan Kenagarian Padang Gelugur. Kerusakan hutan hampir terdapat pada semua Kenagarian. Kerusakan yang terjadi cukup menonjol adalah terjadinya penebangan liar di ke 2 (dua) Kenagarian tersebut.

Demikian pula pada 2 (dua) Kenagarian tersebut terdapat lahan kritis dan terjadinya perladangan berpindah. Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan liar adalah seluas 375 Ha. Sedangkan kerusakan hutan berupa lahan kritis adalah seluas 400 Ha. Selengkapnya data lokasi kerusakan hutan di Kecamatan Panti. Untuk lebih jelas lihat Kumpulan Data SDA Tabel 3.18.

D. Kecamatan Rao



Kecamatan Rao terdiri dari 7 (tujuh) Kenagarian yaitu Kenagarian Koto Nopan, Kenagarian Tarung-tarung, Kenagarian Padang Matinggi, Kenagarian Koto Rajo, Kenagarian Lansek Kadok, Kenagarian Lubuk Layang dan Kenagarian Languang.

Kerusakan hutan terjadi hampir terdapat pada semua Kenagarian. Penebangan liar terjadi di 5 (lima) Kenagarian yaitu Kenagarian Koto Nopan, Kenagarian Tarung-tarung, Kenagarian Lansek Kadok, Kenagarian Lubuk Layang dan Kenagarian Languang. Perladangan berpindah terdapat di 2 (dua) Kenagarian yaitu Kenagarian Padang Matinggi dan Kenagarian Lubuk Layang. Sedangkan lahan kritis terdapat di semua Kenagarian di Kecamatan Rao.

Kerusakan hutan akibat penebangan liar adalah seluas 1.206 Ha dan yang diakibatkan oleh perladangan berpindah adalah seluas 1.269 Ha, akibat pembuatan kebun seluas 1.005 Ha serta yang merupakan lahan kritis adalah seluas 18.436 Ha. Selengkapnya data lokasi kerusakan hutan di Kecamatan Rao. Untuk lebih jelas lihat Kumpulan Data SDA Tabel 3.19.

E. Kecamatan Mapat Tunggul

Kecamatan Mapat Tunggul terdiri dari 2 (dua) Kenagarian yaitu Kenagarian Muara Tais dan Kenagarian Lubuk Gadang. Kerusakan hutan terjadi hampir terdapat pada semua Kenagarian. Kerusakan yang diakibatkan oleh penebangan liar terjadi di Kenagarian Muara Tais dan



perladangan berpindah terdapat di Kenagarian Lubuk Gadang. Sedangkan lahan kritis terdapat di kedua Kenagarian di Kecamatan Mapat Tunggul tersebut.

Kerusakan hutan akibat penebangan liar adalah seluas 650 Ha dan yang diakibatkan oleh perladangan berpindah adalah seluas 450 Ha. Sedangkan kerusakan hutan berupa lahan kritis diperkirakan seluas 70.740 Ha. Selain terdapat kerusakan hutan akibat pembuatan kebun seluas 2.927 Ha. Selengkapnya data lokasi kerusakan hutan di Kecamatan Mapat Tunggul. Untuk lebih jelas lihat Kumpulan Data SDA Tabel 3.20.

F. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

Kecamatan Mapat Tunggul Selatan terdiri dari 2 (dua) Kenagarian yaitu Kenagarian Sungai Lolo dan Kenagarian Silayang. Kerusakan hutan terjadi pada kedua kenagarian. Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perladangan berpindah dan lahan kritis terdapat di kedua kenagarian. Selain itu terdapat kerusakan hutan akibat adanya pembuatan perkebunan. Sedangkan kerusakan hutan akibat penebangan liar tidak ada.

Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perladangan berpindah adalah seluas 530 Ha. Sedangkan kerusakan hutan berupa lahan kritis diperkirakan seluas 9.565 Ha. Selain itu terdapat kerusakan hutan akibat pembuatan kebun seluas 2.815 Ha. Selengkapnya data lokasi kerusakan hutan di



Kecamatan Mapat Tenggara Selatan. Untuk lebih jelas lihat Kumpulan Data SDA Tabel 3.21.

3.1.2. Lahan

Penyebabkan kerusakan lahan lain yang menonjol yaitu penambangan tanpa ijin bahan galian golongan C. Kegiatan tersebut pada umumnya berada pada lokasi daerah aliran sungai, contohnya pada beberapa lokasi DAS di Lubuk Sikaping, Rao Selatan dan Bonjol. Dimana luas dan perkiraan dari produksi bahan galian golongan C yang mempunyai izin dapat dilihat pada kumpulan data SDA tabel 3.4.

Kondisi lahan berdasarkan bentuk lapangan (kemiringan lahan) pada umumnya didominasi oleh daerah curam, sangat curam dan terjal. Daerah yang tandus yang cukup luas hanya terhampar di Kecamatan Panti dan Rao yang umumnya merupakan kawasan pemukiman dan pertanian. Berdasarkan tipe bentang alam (Geo-morfologi), Kabupaten Pasaman memiliki lereng terjal yang cukup luas. Luas wilayah dengan kemiringan lebih dari 40 % mencapai 48,39 % dari luas Kabupaten. Hal ini berarti bahwa 48,39% dari luas Kabupaten Pasaman perlu diamankan dan dilindungi demi kelestarian sumber daya lahan. Berdasarkan pada distribusi kemiringan lahan, Kabupaten Pasaman mempunyai 4 (empat) kelas kemiringan lahan yaitu : datar (35,19%) bergelombang (4,02%) curam (12,40%) dan sisanya adalah sangat curam. Perincian kemiringan. Dapat dilihat pada kumpulan data SDA tabel. 3.22.



Penetapan regionalisasi ketinggian di Kabupaten Pasaman digunakan klasifikasi menurut wilayah tanah usaha.

- Ketinggian 100 s/d 500 meter dpl. Wilayah dengan ketinggian ini terdapat diseluruh kecamatan, dengan topografi bergelombang dan berbukit di sepanjang lembah Sumpur di Kecamatan Panti, Rao dan Lubuk Sikaping serta sebagian di sekitar Bonjol dan Kumpulan yang digunakan secara insentif sebagai areal pertanian.
- Ketinggian 500 s/d 1.000 meter dpl. Kawasan ini memiliki iklim peralihan kearah iklim gunung yang mendekati iklim sub-tropis. Secara umum daerah ini mempunyai kelerengan lebih 25%. Untuk kawasan ini sebaiknya dibudidayakan tanaman keras. Untuk Kabupaten Pasaman kondisi ini terdapat di seluruh kecamatan.
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter dpl. Kawasan ini biasanya bertopografi terjal dan bergunung. Di Kabupaten Pasaman terdapat diseluruh kecamatan dengan lereng dominan pada kelerengan lebih dari 40%. Kawasan seperti ini disarankan menjadi kawasan perlindungan dan kawasan hutan.

Berdasarkan kelas tanah paling kurang terdapat 9 (sembilan) jenis tanah. Jenis tanah yang dominan adalah Tanah Litosol. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data SDA tabel 3.23, yang terbentuk dari bahan alluvial dari batuan beku pegunungan vulkanik. Tanah ini tergolong peka terhadap erosi.



a. Kondisi Lingkungan

Pada lahan kering dimanfaatkan untuk lahan pertanian yang terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain pemanfaatan lahan untuk pertanian terdapat pula penggunaan lain yaitu untuk pekarangan, Ladang, dan pengembalaan.

Usaha pertanian pada lahan datar terdapat sawah dengan jenis sistem irigasi seluas 22.540 Ha. Luas tanah sawah yang dialiri oleh pengairan teknis terdapat di Kecamatan Panti (880 Ha) Lahan dengan irigasi setengah teknis paling luas di Kecamatan Borjoi (1.328 Ha), Lubuk Sikaping (1.546 Ha) dan Tigo Nagari (2.638 Ha). Irigasi sederhana terluas di Kecamatan Duo Koto (1.039 Ha). Sedangkan irigasi desa non PU terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping (1.108 Ha). Sawah tadah hujan yang cukup luas berada di Kecamatan Padang Gelugur (1.100 Ha) dan lainnya Kecamatan Padang gelugur (290 Ha).

b. Tekanan dan Dampak

Perubahan pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Pasaman sebagai daerah yang sedang berkembang merupakan fenomena yang umum terjadi. Dengan perubahan pemanfaatan lahan tersebut mengindikasikan telah terjadi tekanan terhadap sumberdaya lahan dan hutan pada kawasan-kawasan tertentu (lindung). Perubahan tersebut menggambarkan bahwa tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan dari



waktu ke waktu seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat nagari. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Pasaman, diantaranya perubahan kebijakan tata ruang lahan disamping perubahan kecenderungan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri seperti pada Kecamatan Lubuk Sikaping, Panti dan Rao.

Penyebab kerusakan lahan lain yang menonjol yaitu penambangan bahan galian golongan C yang dikelola oleh masyarakat, kegiatan tersebut pada umumnya terdapat di lokasi yang berdekatan dengan aliran sungai seperti di Lubuk Sikaping (Batang Pakau), Rao dan Kecamatan Bonjol. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan pertanian lahan kering menjadi miring sehingga terjadi degradasi lahan yang menyebabkan erosi. Hal ini dapat dilihat dengan tingginya endapan sedimen didalam sungai dan endapan pada muara-muara sungai.

c. Respon Pemerintah dan Masyarakat

Kebijakan pemerintah terhadap lahan dan Sumber Daya Alam terutama berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sehubungan dengan RUTRK, telah dilakukan revisi RTRW Kabupaten Pasaman Tahun 1998/1999 dan telah di Perda-kan Tahun 2001. Alasan perubahan ini diatarbelakangi terjadinya perkembangan kota. Aktifitas penambangan antara lain bahan galian golongan C yang dilakukan oleh masyarakat dan



swasta telah dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak negatif dengan perizinan, pengawasan dan kajian pengendalian kuasa pertambangan dan kelayakan lingkungan.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman sangat besar sehingga mengharuskan Pemerintah untuk merevisi RTRW yang telah ada sebagai salah satu alternatif untuk sumber pendapatan baru.

3.1.3. Sungai

Kabupaten Pasaman merupakan daerah hulu dari beberapa sungai besar yang mengalir di Propinsi Riau, seperti Sungai Siak dan Sungai Kampar dan sungai Rokan. Sungai yang melalui wilayah Kabupaten Pasaman sebanyak 125 sungai (SDA Tabel 3.25 Kumpulan Data). Disamping itu Kabupaten Pasaman juga memiliki banyak sungai besar yang menjamin ketersediaan tata air bagi kawasan ini, seperti Batang Sumpur hulunya di Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping menuju Propinsi Riau, Batang Fatimah hulunya di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman menuju Kabupaten Pasaman Barat dan Batang Masang hulunya di Kecamatan Bonjol dan Kecamatan Lubuk Sikaping menuju Kabupaten Agam. Berdasarkan data debit air aliran sungai pada Batang Sumpur, dan Batang Sontang (Tabel SDA 3.26) secara statistik angka tersebut menampakkan perbedaan yang signifikan antara tingkat debit air sungai maksimum dan tingkat debit air sungai minimum. Debit air sungai maksimum selalu terjadi setiap bulan bukan sepanjang bulan,



namun apabila terjadi tidak turun hujan dalam waktu diatas tiga hari debit air sungai langsung turun secara drastis.

Dengan perbedaan tersebut dapat memberi gambaran bahwa kerusakan lahan yang terjadi cukup tinggi, sehingga daya tampung media vegetasi sebagai pengatur tata air serta menampung dan menyimpan air sudah tidak seimbang dengan curah hujan yang cukup tinggi pada saat tertentu, akibatnya air hujan langsung ke sungai dan bahkan tidak mampu menahan dan menyalurkannya ke sungai induk, maka terjadilah luapan air sungai dan bencana banjir serta tanah longsor.

a. Kondisi Lingkungan

Dengan bentuk dan aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai (DAS) sangat menunjang berbagai bentuk aktivitas manusia secara langsung seperti pemukiman, pertanian, perikanan, industri, pertambangan galian C, PDAM dan transportasi air dan secara tidak langsung digunakan juga sebagai tempat menampung limbah dari berbagai bentuk aktivitas manusia baik melalui drainase yang bermuara dan atau langsung ke sungai seperti aktivitas pemukiman, pasar, bengkel (workshop), rumah sakit dan perhotelan yang mengakibatkan sungai-sungai diatas mengalami pencemaran.

Kerusakan dan pencemaran daerah aliran sungai (DAS) sebagai akibat dari aktivitas manusia berupa pembukaan lahan untuk perkebunan tanpa "land covering" sehingga pada musim hujan menghanyutkan banyak



massa tanah dan menyebabkan pendangkalan sungai. Disamping keragaman penggunaan lahan khususnya di daerah hulu sungai dan wilayah DAS pada umumnya akan sangat mempengaruhi kuantitas air baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Intensitas hujan yang tinggi, pengelolaan yang kurang baik serta kepekaan tanah terhadap erosi sangat mempengaruhi kadar Lumpur, koloid tanah liat dan humus yang tersuspensi dalam air. Erosi tanah secara alami diperlukan untuk kesuburan tanah, akan tetapi erosi yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kualitas air maupun terhadap areal pertanian.

Kondisi sungai-sungai di Kabupaten Pasaman menunjukkan kecenderungan perubahan yang memprihatinkan, dimana air sungai keruh kekuning-kuningan dikarenakan erosi dari hulu sungai. Musim hujan yang tinggi menyebabkan banjir dimana tebing sepanjang DAS mengalami longsor serta terjadinya pemindahan aliran sungai dan meander. Keadaan tersebut disebabkan meningkatnya penebangan hutan untuk berbagai kepentingan (perkebunan, pertanian, perladangan, dan lain-lain) yang kurang memperhatikan aturan/tata cara penebangan hutan dan konservasi lahan, baik pada areal dataran rendah maupun perbukitan sehingga menyebabkan semakin meningkatnya luas lahan kritis.

b. Tekanan dan Dampak



Berdasarkan parameter fisika-kimia, air sungai pada beberapa sungai besar di Kabupaten Pasaman mengalami penurunan kualitas yang signifikan, yang disebabkan oleh :

1. Limbah domestik / rumah tangga dan pasar

Hampir sebagian besar sepanjang bantaran sungai dan anak sungai utama terdapat daerah pemukiman yang masyarakatnya memanfaatkan sungai sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Rendahnya motivasi masyarakat untuk menjaga kebersihan sepanjang DAS berpengaruh terhadap kondisi aliran sungai. Selain itu belum optimalnya penataan drainase membawa akibat yang cukup signifikan pada pemukiman penduduk.

Hal tersebut berdampak pada lingkungan sekitar dampak juga terjadi di Kecamatan Lubuk Sikaping telah mengakibatkan genangan air di sekitar Pasar Benteng Kenagarian Tanjung Beringin. Drainase tidak berfungsi optimal di sekitar M. Zein Khatib Kenagarian Pauh karena dipenuhi kerikil dan batu yang terbawa saat hujan deras. Di Kampung Paraweh drainase terputus tidak sampai ke drainase jalan raya. Pada jalan-jalan utama di Kenagarian Pauh juga terjadi genangan akibat drainase yang belum berfungsi optimal. Selain itu banyaknya usaha-usaha rumah makan, workshop/bengkel, dan industri rumah tangga yang belum melakukan pengdahan limbahnya dan membuang begitu saja ke saluran drainase menyebabkan menurunnya kualitas air sungai.

2. Limbah Pertanian / Perikanan



Sebagian besar daerah aliran sungai dijadikan daerah pertanian, ladang dan keramba. Menurut Durum (1981) bahwa kurang lebih 10% N dan 5% P terdapat dalam limbah cair dari daerah pertanian yang masuk ke sungai melalui badan air terdekat atau air salurannya. Secara umum seorang petani setiap kali tanam minimal membutuhkan 50 kg N/Ha dan 25 kg P/Ha dengan masa tanam dua kali pertahun. Jika areal tersebut dalam pengolahannya menggunakan pupuk kimia organik dan anorganik serta pestisida tidak dikelola dengan baik maka air buangan dari lahan pertanian tersebut akan memicu turunnya kualitas air.

Selain dari pupuk, air yang keluar dari areal pertanian juga tersuspensi lumpur yang dapat m engaruhkan air sungai utama.

Kondisi ini secara langsung atau tidak akan meningkatkan nilai Nitrogen, Fosfat dan bahan Padatan Tersuspensi (TDS dan TSS). Begitu juga dengan Cu yang terdapat dalam jumlah banyak termasuk senyawa aktif dalam berbagai merek pestisida.

3. Kerusakan daerah cathcment, sempadan sungai dan badan sungai

Keberadaan dan kondisi daerah catcment menentukan ketersediaan air sungai secara kuantitas dan kualitas baik pada sungai utama maupun anak sungai. Kondisi daerah tersebut diatas saat ini sudah mulai terganggu oleh berbagai aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembukaan hutan untuk ladang dan pengambilan galian C. dan penambangan liar oleh masyarakat. Yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada badan sungai baik pada palung dan tebing sungai serta tebing sungai rusak terkikis secara alamiah karena banjir di daerah hulu dan daerah tengahnya .



Secara umum pola perladangan berpindah-pindah masih dilakukan di Kecamatan Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul Selatan. Di Kenagarian Pintu Padang misalnya, perladangan dengan cara ini telah merusak lahan seluas 35 Ha dan tahun sebelumnya 50 Ha.

Adanya kerusakan tersebut akan ikut memberi kontribusi meningkatnya nilai TTS pada daerah Hilir. Kontribusi bahan tersuspensi tersebut lebih banyak terjadi pada musim hujan karena adanya erosi permukaan dari daerah catchment yang rusak. Pada musim kemarau bahan tersuspensi diperkirakan hanya berasal dari proses pengambilan sirtukil pada tebing dan palung sungai. Akibat dari kerusakan tersebut jumlah air pada musim kemarau ke arah hilirnya tampak makin berkurang atau kadang-kadang dapat mengering. Pada tempat tertentu sungai akan menjadi dangkal karena akumulasi lumpur/sedimentasi. Pengambilan galian C oleh masyarakat dapat menyebabkan terjadinya pelebaran badan sungai yang tidak beraturan serta menjadi dalam pada bagian tertentu.

Pengaruh langsung menurunnya kualitas dan kuantitas air sungai adalah terjadi juga pada intake PDAM. Distribusi air bersih PDAM menurut jenis pelanggan untuk wilayah Kabupaten Pasaman saat ini sekitar 2.745.795 yang terdiri dari kelompok I s/d IV kelompok. Untuk lebih jelas lihat kumpulan data SDA tabel 3.27b. sedangkan untuk air baku dan produksi air bersih PDAM dengan kapasitas terpasang 126,5



liter/detik dari sumber yang ada yakni sungai, dan mata air (SDA tabel 3.27.a)

Untuk nama sungai di Kabupaten Pasaman yang rawan banjir adalah: Kecamatan Rao Selatan (Air Sibinah), Rao (Sungai Tikarang), Lubuk Sikaping (Batang Sumpur) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kumpulan data SDA tabel 3.36. untuk lokasi daerah kecamatan nagari dan jorong rawan bencana dapat dilihat pada kumpulan data SDA tabel 3.35.

Untuk data lokasi rawan longsor dapat dilihat pada kumpulan data SDA tabel 3.37 dimana pada umumnya longsor yang terjadi disebabkan oleh faktor sayatan lereng yang terjal pada lokasi "road cut", semakin besar kelerengan menyebabkan daya pendorong semakin besar, dengan sudut lereng > 50%. Disamping kondisi struktur batuan lepas (*unconsolidated rock*) dan kondisi curah hujan tinggi mempercepat terjadinya longsor.

Hasil pengamatan terdapat beberapa lokasi yang berpotensi longsor, yaitu : Malampah di Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Panti, dan, Mapat Tunggul.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pengawasan pengelolaan dari kegiatan penambangan dan pengolahan bahan galian C terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang berlokasi di Rao, Rao Utara, Rao Selatan, Lubuk Sikaping dan Bonjol, disamping



izin dilakukan pengawasan secara insentif baik pola dan metode pengambilan material yang ada di sepanjang daerah aliran sungai, dengan melakukan normalisasi aliran sungai sehingga mengembalikan kualitas dan kuantitas air sungai. Untuk pengelolaan sampah di sepanjang daerah aliran sungai dilakukan sosialisasi dan program pendidikan lingkungan serta pembinaan dan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida oleh petani dan penggunaan pelet secara ekonomis dan efisien oleh petanikan.

C. Respon Pemerintah dan Masyarakat

Selama ini upaya pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran air oleh pihak pemerintah Kabupaten Pasaman tetap diupayakan. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah keharusan pembuatan dokumen UKL/UPL atau AMDAL dan SPPL kepada setiap kegiatan usaha yang diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan. Upaya lain adalah melakukan monitoring terhadap implementasi kepedulian pengelolaan lingkungan dari setiap usaha atau kegiatan baik Rumah Sakit, Industri Rumah tangga, Tambang yang dilakukan oleh perusahaan, Tambang Rakyat, perusahaan AMP dan kegiatan lainnya.

Upaya diatas masih bersifat persuasif (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2007), masih perlu peningkatan dan dilakukan secara



intensif. Kegiatan usaha yang telah melebihi nilai baku mutu lingkungan masih belum diberlakukan sanksi yang tegas.

Begitu juga terhadap masyarakat penambang emas, sirtukil pada palung sungai maupun bukit yang sebagian tidak memiliki izin namun masih belum dilakukan tindakan tegas, walaupun pada tempat tersebut telah dipasang papan larangan pengambilan material.usaha preventif dan kuratif perlu diberlakukan dengan tegas, untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan pada badan sungai yang ada.

Sementara kepedulian individu masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dalam hal pengendalian pencemaran air masih perlu ditingkatkan. Kepedulian yang relatif tinggi hanya terjadi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Kota Kabupaten.

3.1.4. Air

Untuk Kabupaten Pasaman konsumsi air semakin lama semakin meningkat secara eksponensial, sedangkan persediaan air bersih semakin menurun disebabkan kerusakan alam (hutan) dan pencemaran. Untuk Kabupaten Pasaman yang berpenduduk 256.060 dengan luas daerah 3.947,63 Ha kebutuhan air bersih telah menjadi hal yang mendasar. Potensi air di kabupaten Pasaman cukup besar diindikasikan diantaranya disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi.

Berdasarkan data hujan harian tahun 2006 oleh Klimatologi kelas II Sicincin
 SLHD Kabupaten Pasaman 2007 SDA III - 141



dimanan rata-rata curah hujan Harian selama 1 tahun (2006) adalah 270,4 dengan curah hujan maksimal terdapat dibulan Desember dan curah hujan minimal terdapat pada bulan Agustus untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data SDA tabel 3.28. untuk curah hujan yang tinggi, potensi sumber daya air permukaan dan air tanah yang terdapat di Kabupaten Pasaman juga besar. Potensi – potensi sumber daya air tersebut mulai menunjukkan gejala penurunan yang pada batas tertentu dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas.

A. Kuantitas dan Kualitas Air Sungai

Kondisi air sungai yang terdapat di Kabupaten Pasaman sedikitnya sudah mulai menurun dikarenakan oleh aktifitas manusia seperti kegiatan, pertanian, perikanan, industri, pertambangan galian C, pasar, bengkel (workshop), rumah sakit dan perhotelan yang mengakibatkan sungai-sungai diatas mengalami pencemaran.

Kerusakan dan pencemaran daerah aliran sungai (DAS) sebagai akibat dari aktivitas manusia berupa pembukaan lahan untuk perkebunan tanpa “land covering” sehingga pada musim hujan menghanyutkan banyak massa tanah dan menyebabkan pendangkalan sungai. Disamping keragaman penggunaan lahan khususnya di daerah hulu sungai dan wilayah DAS pada umumnya akan sangat mempengaruhi kuantitas air baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Intensitas hujan yang tinggi, pengelolaan yang kurang baik serta kepekaan tanah terhadap erosi



sangat mempengaruhi kadar Lumpur, koloid tanah liat dan humus yang tersuspensi dalam air.

Kondisi sungai-sungai di Kabupaten Pasaman menunjukkan kecenderungan perubahan yang memprihatinkan, dimana air sungai keruh kekuning-kuningan dikarenakan erosi dari hulu sungai. Musim hujan yang tinggi menyebabkan banjir dimana tebing sepanjang DAS mengalami longsor serta terjadinya pemindahan aliran sungai dan meander.

B. Kualitas Air Tanah

Selain Kuantitasnya, kualitas air sungai sudah banyak yang menurun karena pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Untuk kualitas air tanah di Kabupaten Pasaman khususnya di Kecamatan Lubuk Sikaping tidak mengalami penurunan (pencemaran) ini dapat dilihat dari hasil analisa Pemantauan kualitas air tanah pada tiga lokasi di kecamatan Lubuk Sikaping pada tahun 2007 dapat dilihat pada kumpulan data SDB tabel 3.1.a, b dan c.

Ada 8 Parameter yang dipantau untuk kualitas air tanah :

1. Parameter Fisika terdiri dari :

a. Temperatur

Temperatur waktu hasil analisa kualitas air tanah oleh Laboratorium Unand tahun 2007 adalah 26,8

b. TSS



Parameter TSS (*Total Suspended Solid*) yang memenuhi kriteria mutu air kelas 1 berjumlah 22 % dari sampel.

c. TDS

Secara umum TDS (*Total Dissolved Solid*) masih memenuhi kriteria mutu air kelas 1 yakni dari hasil pemeriksaan analisis dengan menggunakan Gravimetri 3 sedangkan Baku Mutu PP No 82 tahun 2001 adalah 1000 (kelas 1).

d. pH

Mayoritas pH air tanah berisar dari 6,5 sampai dengan 7,5 dimana dari hasil analisa 7. dari hasil analisa tersebut memenuhi kriteria Baku Mutu PP no 82 tahun 2001 yang berkisar 6 – 9.

e. BOD

Parameter BOD dipantau dari sumber air tanah dari hasil pemeriksaan adalah 6 (50 %) memenuhi kriteria Baku Mutu PP no 82 tahun 2001 12 untuk kelas 4

f. COD

Hasil pemantauan COD air tanah tidak melampaui nilai ambang batas yang ditetapkan oleh PP No 82 tahun 2001 baku mutu air kelas 2 yakni hasil analisa 13 (52%) sedangkan di Baku Mutu 25.

g. DO

Untuk Parameter DO dari hasil analisa tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh PP No 82 tahun 2001.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di kumpulan data SDB 3.31.a.

Untuk data dua (2) lokasi lagi dapat dilihat pada kumpulan data SDB 3.1.b dan c.



C. Kualitas Air Hujan

Rata-rata hujan harian berkisar 270,4 dengan potensi hujan tinggi (maksimal) terdapat pada bulan desember dan minimal terdapat pada bulan Agustus (Tabel SDA 3.28). Kualitas air hujan dari Hasil pemantauan oleh Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang untuk pemantauan pada tahun 2006 dan 2007 (Juli, Agustus, dan September). Parameter yang dipantau antara lain: Keasaman, daya hantar, Ca, Mg, Na, K, NH₄, CL, So₄, No₃ dan Kesadahan. (Tabel SDA 3.29)

D. Air Limbah

Air limbah dapat diartikan air buangan yang disebabkan oleh suatu aktifitas manusia seperti air limbah rumah sakit, rumah makan, dan penginapan. Air limbah ini kalau tidak diolah sedemikian rupa nantinya akan mencemari lingkungan dan juga menyebabkan penyakit bagi manusia seperti air limbah rumah sakit harus dipisahkan air limbah domestik dengan air limbah infeksius.

3.1.5. Udara dan Atmosfer

Pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan kegiatan industri dan transportasi yang berkontribusi pada penurunan kualitas udara ambien dan atmosfer. Penurunan kualitas udara ambien ini terjadi karena emisi yang berasal dari industri, transportasi, domestik ataupun kebakaran hutan yang telah melampaui daya dukung lingkungan sehingga tidak dapat dinetralkan secara



alami. Di Kabupaten pasaman Kualitas udara juga dipengaruhi oleh kondisi iklim dimana kondisi iklim pada lokasi Stasiun Pemantauan Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang dengan lintang 0,2 LS dan BT 100,23 dengan ketinggian 864,5 m asl yang mana pemantauan dilakukan pada tahun 2006 dan 2007 (bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember) kondisi iklim dapat dilihat pada tabel SDA3.32.

Menurut Perkim (1974), Center (1977) dan World Bank (1980) pencemaran Udara adalah keadaan di atmosfer dimana satu atau lebih bahan-bahan pencemar, yang jumlah dan konsentrasinya mungkin dapat membahayakan kesehatan manusia, mempengaruhi kenyamanan dan hak milik, termasuk tempat-tempat rekreasi di udara luar.

Sumber pencemaran udara diklasifikasikan sebagai berikut :

i. Sumber alami

Dihasilkan oleh proses :

- Biologi di daerah rawa (CH_4 , SO_2 , NH_3 , N_2O dll)
- Geokimia di daerah pegunungan (emisi vulkanik seperti SO_4 dan H_2S)
- Erosi tanah dan abrasi terutama di daerah kering (emisi partikular) Sumber alami pencemar udara umumnya berupa sumber statis dan memberikan emisi dalam jumlah yang konstan.

ii. Sumber antropogenik (aktivitas manusia) merupakan sumber dominan pencemaran udara, peningkatan jumlah penduduk dengan peningkatan sosial



ekonomisnya meliputi pengembangan pemukiman, industri dan transportasi berarti membutuhkan energi dan bahan mentah dalam jumlah besar yang berasal dari bumi sehingga menghasilkan pencemar dalam jumlah besar.

Sumber emisi zat pencemar udara berdasarkan distribusi ruangnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Sumber titik (*point source*), dimana zat pencemar yang berasal dari cerobong pabrik.
- b. Sumber kawasan (*area source*), dimana zat pencemar yang berasal dari kawasan industri dan kelompok perumahan.
- c. Sumber garis (*line source*), dimana pencemaran ditimbulkan oleh kendaraan bermotor sepanjang jala raya.

a. Kondisi Lingkungan

Pencemaran udara berdasarkan baku mutu lingkungan PP.No.41 Tahun 1999 di beberapa lokasi pengukuran di Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada kumpulan data tabel SDA 3.30.

b. Tekanan dan Dampak

Pada kondisi lain sektor transportasi seperti kendaraan bermotor juga memberikan kontribusi yang besar. Kabupaten Pasaman sebagai pintu gerbang dari Utara bagi Sumatera Barat adalah jalur lintasan perjalanan (lintas barat Sumatera). Dari hasil pemantauan 2 (dua) tahun terakhir cenderung terjadi peningkatan jumlah kendaraan.



Usaha jaring babi di Kecamatan Duo Koto juga telah menimbulkan pencemaran air dan udara. Saat ini terdapat 40 kelompok pengrajin dengan 160 orang tenaga kerja. Jika 1 kelompok memproduksi 1 kodi jaring babi per-hari dari 10 buah ban bekas, akan dihasilkan 5 kg limbah. 40 kelompok per-bulannya akan dihasilkan sekitar 6 ton limbah karet ban bekas. Sebagian besar limbah ini dibakar begitu saja di pekarangan rumah dan bahkan ada yang dibuang ke sungai. Akibatnya aliran sungai di Kampung Tongah Kenagarian Cubadak tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan lahan pertanian di sekitarnya tercemar. Meskipun sudah ada kelompok yang menyediakan lahan khusus untuk pembakaran limbah ini dalam jumlah kecil.

Sumber pencemaran udara lainnya adalah oli bekas sisa operasional pabrik, perbengkelan dan servis kendaraan bermotor terdapat hampir di semua kecamatan dengan pusatnya di ibukota kecamatan, sedangkan pabrik-pabrik berskala besar baru terdapat di Kecamatan Rao, Lubuk Sikaping dan Bonjol. Sebagian besar oli bekas ini langsung dibuang ke badan-badan air dan dibakar. Sampai saat ini belum ada upaya nyata dalam penanganannya dan belum pernah diukur tingkat pencemaran yang ditimbulkan.

c. Respon Pemerintah dan Masyarakat



Menghadapi pertumbuhan Kabupaten Pasaman di masa mendatang yang cukup besar maka antisipasi terhadap pencemaran udara dari sektor transportasi, rumah tangga dan sektor industri perlu ditangani secara serius. Untuk itu pencemaran udara akibat buangan aktivitas harus dikendalikan atau dikurangi, walaupun secara umumnya masih berada dibawah nilai ambang batas.

Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara dengan menggalakkan penanaman pohon pelindung sebagian besar jalan utama dalam ibukota kabupaten. Walaupun kepedulian masyarakat secara umum untuk mengantisipasi pencemaran udara tampaknya juga masih kurang. Kepedulian tersebut masih terbatas pada individu masyarakat yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari segi finansial.

Penanganan limbah usaha jaring babi di Kecamatan Il Koto telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat, baik dari Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup maupun oleh dinas teknis seperti Dinas Perindagkop dan UKM serta Dinas Kimpraswil, namun hasil yang dicapai masih belum optimal.

3.1.6. Keaneka Ragaman Hayati Flora dan Fauna

Keanekaragaman hayati flora dan fauna merupakan bagian dari komponen yang secara ekologis berperan sebagai penentu keseimbangan ekosistem



yang penting bagi kehidupan, terutama dalam penyediaan kebutuhan keanekaragaman bahan hayati dan penyediaan jasa lainnya. Dengan demikian merupakan salah satu penopang utama kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

Keanekaragaman hayati adalah keadaan beragamanya ekosistem, jenis dan variabelitas genetika binatang, tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme yang hidup. Setiap individu organisme mengandung ribuan gen dengan kombinasi yang unik, sementara jenis atau spesies terdiri dari banyak organisme.

Atas dasar itu pelestarian keanekaragaman hayati menjadi penting demi termanfaatkannya keanekaragaman hayati secara benar dan berkelanjutan. Kenyataannya sekarang pelestarian keanekaragaman hayati masih belum terlaksana dengan baik, mengingat ancaman yang dihadapi sangat rumit dan sangat sulit diatasi. Ancaman yang dihadapi dalam pelestarian keanekaragaman hayati diantaranya adalah pengaruh perubahan iklim, eksploitasi yang berlebihan atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik penopang kehidupan, pencemaran, kehadiran spesies asing yang infasif, kegiatan pembudidayaan yang tidak disertai upaya yang menjamin kelestarian berbagai Varietas dari spesies yang dibudi dayakan.

Dengan iklim tropik basah dan kawasan hutan yang sangat luas pada masing-masing kecamatan dan ketinggian mencapai 2.912 dpl, Kabupaten Pasaman menyimpan keanekaragaman hayati antara lain berupa tumbuh-tumbuhan tercatat 45 jenis, mangrove tercatat 49 jenis (kumpulan data Tabel SDA 3.8)



Nama Burung/ fauna yang dilindungi tercatat 81 Jenis Burung yang dilindungi adalah berjumlah 16 jenis (Kumpulan data Tabel SDA 3.9), mamalia 18 jenis (Tabel SDA 3.10) dan reptilia (Tabel SDA. 3.11). Dari keseluruhannya terdapat banyak bernilai ekonomis dan beberapa yang perlu di konservasi / dilindungi karena habitatnya terancam.

Flora dan fauna yang menjadi maskot Kabupaten Pasaman adalah Madang Sitawa (*Gnnamum Umbelifolia*) dan Murai Batu (*Copsyscus Malabaricus*). Sedangkan maskot Sumatera Barat adalah Andaleh (*Marus Macraura*) dan fauna adalah Buruang kua (*Agrusianus Argus*).

Semua flora dan fauna tersebut sangat potensial menjadi objek penelitian biologi dalam usaha pengembangan dan pelestarian ekosistem hutan. Dengan ditetapkannya Cagar Alam Rimbo Panti seluas 2.550 Ha (sejak tanggal 8 Agustus 1932), dengan Taman Wisata seluas 570 Ha (sejak 1 Juni 1979) serta Cagar Alam Malampah – Alahan Panjang (sejak tanggal 25 Agustus 1983) dengan luas 36.919 Ha, dimanfaatkan sebagai objek wisata alam, penelitian flora dan fauna yang terkandung didalamnya serta observasi.

a. Kondisi Lingkungan

Dengan kondisi Kabupaten Pasaman yang sedang berbenah, jumlah penduduk cenderung meningkat dari tahun ke tahun (tabel SDM 3.1) untuk memenuhi peningkatan kebutuhan tersebut baik sumber daya lahan untuk pemukiman, lahan pertanian serta sumberdaya hayati. Pergeseran aktifitas penduduk kearah kawasan konservasi dalam bentuk berbagai aktivitas



seperti pembukaan lahan, pertambangan, illegal logging, penangkapan hewan menyebabkan semakin rusak dan berkurangnya kawasan tersebut. Keanekaragaman hayati yang tergolong langka dan dilindungi habitatnya di Kabupaten Pasaman seperti : Anggang Uban (*Aceros Comatus*), Kuntua (*Bubulcus Ibis*) dan Pipik Jantuang (*Aracnothera Longirosta*).

b. Tekanan dan Dampak

Berbagai kegiatan dan usaha yang potensial untuk merusak dan memusnahkan jenis-jenis tumbuhan dan hewan tersebut adalah :

- Pemanfaatan lahan, termasuk pembukaan hutan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
- Pengambilan hasil hutan, baik hasil kayu maupun non kayu.
- Penggunaan pupuk organik, obat-obatan kimia secara berlebihan dan tidak menurut aturan dosis yang tepat
- Penangkapan, pembunuhan dan perburuan berbagai jenis hewan untuk berbagai kebutuhan.

Sedangkan dampak yang akan terjadi adalah :

- Kepunahan jenis, terutama jenis-jenis tumbuhan maupun hewan yang sudah langka dan hidup dalam kondisi yang sangat kritis. Dalam kategori ini juga termasuk jenis-jenis flora dan fauna yang spesifik khas daerah tertentu.



- Terjadinya perubahan komposisi dan kepadatan vegetasi, termasuk mikroflora mengakibatkan berubahnya jumlah serta komposisi jenis-jenis hewan/fauna yang hidup dalam kawasan tersebut.
- Berkurangnya areal tempat berlindung/habitat untuk berbagai jenis satwa termasuk terganggunya dan terputusnya relung rantai makanan serta aliran energi dalam ekosistem tersebut.
- Tumbuh dan berkembangnya jenis-jenis tumbuhan pengganggu (*gulma*) dan berkembangnya hama dan penyakit tanaman serta meningkatnya gangguan binatang buas.

c. Respon Pemerintah dan Masyarakat

Untuk mendukung tercapainya pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman secara berkelanjutan diharapkan pada Pemerintah Daerah (Bupati) dan pihak terkait lainnya lebih meningkatkan upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari, pengembangan nilai manfaat pengelolaan konservasi dan meningkatkan kesadaran peranserta masyarakat.

Fenomena yang akan dihadapi pada masa mendatang oleh pihak terkait khususnya kehutanan akan lebih sulit karena semakin berkurangnya keanekaragaman hayati di Kabupaten Pasaman. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut dengan pelarangan, pengawasan dan menetapkan kawasan-kawasan yang terlarang untuk kegiatan baik pemerintah maupun swasta



dan masyarakat, konservasi/penghijauan, penataan tapal batas, serta rehabilitasi bagi kawasan adalah langkah yang tepat. Dilakukan juga sosialisasi walaupun belum memberikan hasil yang optimal dan juga kebijakan pemerintah dijadikan panduan komprehensif dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dengan berpedoman kepada Undang-undang No 5 tahun 1994.

3.1.7. Pertambangan dan Energi

Kegiatan pertambangan merupakan eksploitasi potensi bahan tambang yang ada didalam perut bumi daerah Kabupaten Pasaman. Kegiatan ini diharapkan mendapatkan devisa negara dan peningkatan pendapatan asli daerah. Tapi karena kegiatan ini berpotensi menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan, baik terhadap komponen fisik maupun sosial budaya, maka kegiatan ini harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Salah satu permasalahan sosial budaya yang sering muncul adalah masalah tanah ulayat, yang tidak mudah untuk mengkonversikannya menjadi lahan untuk pertambangan atau untuk kegiatan pembangunan lainnya.

Sampai saat ini bahan tambang yang diusahakan dalam skala besar di Kabupaten Pasaman adalah Biji Besi dalam tahap persiapan eksploitasi yang diproduksi, sebagian diekspor dan sebagian lagi dikonsumsi di daerah ini untuk menggerakkan industri. Selebihnya kegiatan pertambangan di Kabupaten Pasaman adalah penambangan galian C seperti pasir, batu, kerikil (Sirtukil).



Sementara itu, potensi lain seperti emas, Bijih Besi, Timah Hitam, batubara, calsite, batukapur, pasir besi, obsidian, dunit, toseki dan kaolin.

Untuk lebih detail dan mengeliminir dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan diperlukan kajian-kajian teknis yang meliputi desain penambangan (*Mine Plant Design*) dilengkapi dengan studi AMDAL atau UKL/UPL dan dalam hal ekonomi, perlu dipikirkan aspek penghematan, sebab bahan tambang merupakan sumberdaya yang tak terbarukan (*non renewable resources*). Yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah PETI (penambangan tanpa izin). Para penambang dalam kelompok ini harus segera diatasi, berupa pengarahan, pengawasan dan sosialisasi guna mengantisipasi permasalahan yang sering muncul seperti : kerusakan lingkungan karena para penambang tidak peduli dengan segala aturan yang menyangkut keselamatan kerja, lingkungan / ekologis, termasuk para penambang itu sendiri. Keuntungan yang didapat oleh para penambang beserta pemilik lahan tidak memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah. Harga yang dibayar oleh masyarakat dari kerusakan/pencemaran lingkungan akan sangat mahal.

3.1.8. Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Pasaman

Untuk lokasi rawan bencana pada tahun 2007 dari 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman hanya terdapat 9 kecamatan yang berpotensi menimbulkan bencana yakni : Kecamatan Rao Utara, Rao Selatan, Rao, Panti, Lubuk Sikaping Tigo Nagari, Simpang Alahan Mati, Padang Gelugur dan Borjol. Untuk data Nagari dan jorong yang rawan bencana dapat dilihat pada kumpulan data SDA tabel 3.35.



Untuk sungai yang rawan banjir yang terdapat di Kabupaten Pasaman adalah air sibinah (Rao Selatan), Sungai Tikarang (Rao), Batang Sumpur (Panti), Air Banca Ulang dan Batang Pegang (Padang Gelugur), Batang Sumpur (Lubuk Sikaping, Batang Asik, Batang Patah, dan Batang air Mati (Rao Utara), Batang Boamah dan Batang Patimah (Tigo Nagari), Air Taran dan batang simpat (Simapng Alahan Mati), dan Batang Alahan Panjang (Bonjol). (SDA tabel 3.36).
sedangkan rawan longsor dapat dilihat pada kumpulan data SDA.3.37.





Tabel. III.21. Tabel lokasi Rawan Banjir pada tahun 2006 di Kabupaten Pasaman

TANGGAL	KECAMATAN	NAGARI	JORONG/DESA
	Rao Selatan	Lansek Kadok	1. Jorong I 2. Rambah
	Rao	Tarung-tarung	Jorong VI Sorik
	Lubuk Sikaping	Durian Tinggi	Kampung Lintang
	Rao	Tarung-tarung	S.M anih Tingkarang
	Rao Selatan	Lansek Kodok	1. Lansek Kodok 2. Koto Panjang 3. Rambah



	Mapat Tunggul	Lubuak Gadang	Lubuak Gadang
	Lubuk Sikaping	A ia M anggih	Kampung nan VII

Sumber : Kantor Kesbang Linmas dan Pol Kab.Pasaman



TABEL. II.3.

PERINCIAN KETERSEDIAAN TANAH DI KABUPATEN PASAMAN

No	KECAMATAN	Lokasi/Nagari	LUAS (Ha)	Status Tanah	Penggunaan Tanah	Lereng (%)	Keti Dpl nggian (n)	Je Ta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	TIGO NAGARI	1. Malampah	2200 1200 800	Ulayat Ulayat Ulayat	Hutan Belukar Hutan Belukar Hutan Belukar	25-40 % 15-25 % 8-15 %	100-00	-
		2. Ladang Panjang	700 900	Ulayat Ulayat	Kebun Campuran Belukar	25-40 % 25-40 %	100-00 25-00	- t
		3. Binjai	1100 <u>600</u> 7500	Ulayat	Hutan belukar Semak belukar	15-25 % 8-15 %		t - t
2.	DUO KOTO	1. Simp. Tonang	3200 1700 1700	Ulayat Ulayat Ulayat	Hutan Belukar Hutan Belukar Hutan Belukar, alang-alang	25-40 % 15-25 % 8-15 %	500-000	- t t
		2. Cubadak	1800 1100 9500	Ulayat Ulayat	Belukar, karet, Alang-alang Belukar, kebun campuran	25-40 % 25-40 % 15-25 %	500-000	- t t
3.	MT. SELATAN	Silayang	600 <u>900</u> 1500	Ulayat Ulayat	Tegalan, karet Ladang, Karet, Kebun Campuran	25-40 % 15-25 %	500-000	- t t r



4.	RAO	1. Languang	300	Ulayat	Alang-alang	25-40 %	500-1000)	
			200	Ulayat	Alang-alang	15-25 %			t
		2. Koto Rajo	1000	Ulayat	Alang-alang, belukar, karet	25-40 %	500-1000		-
			400	Ulayat	Alang-alang, belukar, karet	15-25 %			500-1000
		3. Koto Nopan	1400 3300	Ulayat	Alang-alang, belukar, kebun campuran	25-40 %	500-1000		-
Jumlah		21.800					t		

Tabel : SDB 3.1. Buku II

No	Tempat/ Lokasi	Kelompok I		Kelompok II		Kelompok III	
		Banyaknya	Pemakaian (M3)	Banyaknya	Pemakaian (m3)	Banyaknya	Pemakaian (m3)
1.	Lubuk Sikaping	43	1,318	300	6,115	2,999	62,4
2.	Bonjol	25	532	18	611	641	10,6
3.	Kumpulan/	26	589	23	469	910	12,1
4.	Toboh	27	2,313	26	786	848	13,7
5.	Panti	29	1,254	124	3,317	1,330	24,1
6.	Rao Cubadak	2	12	277	3,885	8	1
	Jumlah	152	6,018	768	15,183	6,736	123,2



3.2. Sumber Daya Buatan

3.2.1. Air

Air merupakan suatu material yang tidak pernah lepas dari aktifitas kehidupan, sehingga dengan demikian aktifitas tersebut juga akan menghasilkan sisa air dalam bentuk limbah cair. Dimana untuk limbah cair sangat tergantung kepada jenis kegiatan dan jumlah bahan yang dihasilkan (produk). Sebelumnya air yang digunakan masih mengandung bahan yang terlarut yang masih alami, namun setelah digunakan akan melarutkan bahan – bahan tertentu akibatnya bahan tersebut dapat melebihi batas tertentu, sehingga akan mencemari lingkungan, bahan tersebut dapat berbentuk senyawa organik atau anorganik, untuk air dapat digunakan parameter untuk menentukan kualitas air tersebut seperti: Suhu, Padat Terlarut, Padatan Tersuspensi (TSS), PH, Oksigen terlarut (DO), Kekeruhan, Oksigen Terlarut Biologi (BOD), Kebutuhan Oksigen Kimia (COD), Anion – anion Logam, Senyawa Organik, Radio Aktif dan juga Mikro Organisme .

Beban pencemaran yang sangat potensial terdapat di Daerah Kabupaten Pasaman berasal dari aktifitas :

1. Industri

Kegiatan industri yang memberikan dampak terhadap penurunan kualitas air diantaranya adalah kegiatan Usaha Jaring Babi, Industri tahu dan Kegiatan Penambangan.

2. Perdagangan

Aktifitas perdagangan yang dapat menimbulkan limbah cair dan padat yang berasal Pasar, Pertokoan, rumah makan / restoran.

3. Domestik

Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan Domestik dapat berasal dari Pemukiman Penduduk, Perkantoran dan Tempat – tempat Umum.

4. Kesehatan.



Bidang Kesehatan juga dapat menghasilkan Limbah Cair dari aktifitas Laboratorium, Klinik, Puskesmas dan Rumah sakit.

5. Kegiatan Pertambangan

Kegiatan ini juga dapat menurunkan kualitas air permukaan khususnya terhadap Kekeruhan dan TSS

Secara umum limbah cair yang diuraikan oleh berbagai aktifitas tersebut akan memasuki lingkungan perairan (sungai), sehingga akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas permukaan sesuai dengan parameter. Akibat terjadinya penurunan kualitas air permukaan tersebut akan dapat memberikan dampak terhadap biota perairan yang secara tidak langsung dampak ini akan terjadinya pada makhluk hidup lainnya. Pengaruh terhadap parameter kualitas air tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD)

Parameter ini digunakan untuk mengetahui jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikro organisme untuk mendegradasi senyawa kimia khususnya , senyawa organik. Semakin tinggi kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam perairan, maka akan semakin tinggi pula jumlah oksigen yang dibutuhkannya , sehingga akan mengakibatkan kandungan oksigen terlarut dalam air akan semakin berkurang dan akan mengganggu keseimbangan makhluk hidup air (biota perairan) seperti Plankton, dan bentos – bentos ikan.

2. Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)

COD merupakan jumlah kebutuhan oksigen yang dapat mengoksidasi secara kimia terhadap senyawa kimia yang terdapat dalam sampel air. Tingginya kandungan COD juga akan dapat diketahui jumlah senyawa yang dapat menggunakan oksigen secara kimia untuk mengoksidasi sehingga jumlah oksigen terlarut juga akan berkurang.

3. Padatan Tersuspensi (TSS)

Bahan kimia tidak semua larut dalam air dan sangat tergantung pada sifat-sifat senyawa tersebut , sehingga akan mengakibatkan senyawa tidak terlarut



tersebut dapat tersuspensi dalam air. Proses ini menyebabkan tingkat kekeruhan semakin besar pula. Bila nilai TSS atau kekeruhan tinggi menyebabkan intensitas cahaya yang masuk ke permukaan air akan berkurang hal ini menyebabkan berkurangnya fotosintesa dan sekaligus memberikan pengaruh terhadap kehidupan biota air.

4. Minyak dan Lemak.

Minyak dan Lemak merupakan bahan kimia organik yang mempunyai masa jenis lebih kecil daripada air, sehingga minyak dan lemak akan terapung dipermukaan air. Walaupun minyak dan lemak ini dapat mengalami proses degradasi tetapi butuh waktu yang cukup lama sumber dari kedua ini berasal dari kegiatan Domestik, kegiatan Perdagangan, Kegiatan industri.

5. Senyawa Logam

Senyawa logam yang terlarut juga dapat memberikan dampak negatif, ini tergantung pada jenis logamnya. Setiap logam mempunyai sifat racun dan tingkat keracunan yang berbeda. Logam yang sangat beracun diantaranya: Timbal (Pb), Raksa (Hg), Tembaga (Cu) dan lain – lain.

Beban pencemaran limbah cair yang akan dibuang ke lingkungan harus terlebih dahulu dilakukan pengolahan seperti : beban limbah cair tersebut harus dapat memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan.

Setiap usaha / kegiatan dengan volume dan beban limbah cair ini harus dilakukan dengan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah). Dimana pengolahan ini harus dilakukan secara efektif dan berkesinambungan agar hasil pengolahan yang dibuang ke Lingkungan dapat ditekan.

3.2.2 Analisa dan Pemantauan Kualitas Air, Udara Ambien dan iklim

A. Pemantauan dan Analisa Kualitas Air Tanah



Pemantauan kualitas air tanah dan analisa sample air dilakukan pada tiga (3) lokasi titik pantau yang ketiganya berada pada kecamatan Lubuk Sikaping yakni:

1. Kampung Baru Nagari Air Manggis,
2. Jln. Perwira Nagari Pauh,
3. Jln. Puti Sangkar Bulan Nagari Tanjung Beringin.

Dimana hasil analisa yang dilakukan oleh Laboratorium Unand tahun 2007 untuk lokasi Kampung Baru Nagari Air manggis didapat hasil untuk temperatur hasil analisa 26.1, untuk TSS dan TDS bernilai 11 dan 3. dilihat dari hasil analisa TSS TDS dengan mengacu kepada Baku Mutu PP No 82 Tahun 2001 air tanah yang berada pada lokasi titik pantau kampung baru nagari air manggis masih baik digunakan begitu juga dengan BO D, COD dan DO untuk baku mutu air kelas 4 dan 2 masih layak dikonsumsi oleh masyarakat karena dari hasil analisa tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh PP no. 82 tahun 2001. untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data SDB. 3.1. a.

Untuk hasil analisa yang dilakukan oleh Laboratorium Unand tahun 2007 untuk lokasi Jln. Perwira Nagari Pauh didapat hasil untuk temperatur hasil analisa 26.8, untuk TSS dan TDS bernilai 4 dan 3. dilihat dari hasil analisa TSS TDS dengan mengacu kepada Baku Mutu PP No 82 Tahun 2001 untuk kelas air 1, air tanah yang berada pada lokasi titik pantau Jln. Perwira Nagari Pauh masih baik digunakan begitu juga dengan BOD, COD dan DO untuk baku mutu air kelas 4, 2 dan 1 masih layak dikonsumsi oleh masyarakat karena dari hasil analisa tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan



oleh PP no. 82 tahun 2001. untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data SDB. 3.1. b.

Untuk hasil analisa yang dilakukan oleh Laboratorium Unand tahun 2007 untuk lokasi Jln. Puti Sangkar Bulan Nagari Tanjung Beringin didapat hasil untuk temperatur hasil analisa 27, untuk TSS dan TDS bernilai 5 dan 3. dilihat dari hasil analisa TSS TDS dengan mengacu kepada Baku Mutu PP No 82 Tahun 2001 untuk kelas air 1, air tanah yang berada pada lokasi titik pantau Jln. Puti Sangkar Bulan masih baik digunakan begitu juga dengan BO D, COD dan DO untuk baku mutu air kelas 4, 2 dan 1 masih layak dikonsumsi oleh masyarakat karena dari hasil analisa tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh PP no. 82 tahun 2001. Dengan demikian kualitas air tanah dari ketiga lokasi yang dipantau untuk Kabupaten Pasaman masih dalam **kondisi baik**. untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data SDB. 3.1. c.

B. Pemantauan dan Analisa kualitas air limbah

Analisa kualitas air limbah yang dilakukan adalah analisa air limbah Rumah Sakit dan Wisma yang ada di Kecamatan Lubuk Sikaping yakni yang mewakili adalah wisma Pasaman Saiyo karena di Kabupaten Pasaman tidak mempunyai hotel maupun industri besar.

Hasil titik pantau dari Limbah Rumah Sakit yang berada pada Jl. Sudirman didapat hasil analisa dari Laboratorium Unand tahun 2007 dengan hasil sebagai berikut :

Untuk Parameter fisika (TSS dan TDS) didapat hasil 16 dan 8 dilihat dari Keputusan Gubernur Sumatera barat No. 6 Tahun 2001 tentang Penetapan



Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Rumah Sakit di Propinsi Sumatera Barat untuk parameter TSS, TDS tidak melebihi nilai ambang batas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data SDB. 3.2. a.

Untuk hasil analisa kualitas air limbah wisma pasaman saiyo dari hasil analisa yang diperiksa baik paramet r fisika, Kimia An Organik dan Kimia Organik semua analisa hasil analisa tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dengan demikian kondisi air limbah Rumah Sakit dan penginapan di Kabupaten Pasaman (kecamatan Lubuk Sikaping masih dalam **kondisi Baik**. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data 3.2. b.

Untuk pemantauan dan hasil analisa kualitas limbah cair hotel dikawasan industri tidak dilaksanakan karena Kabupaten Pasaman dengan adanya pemekaran tidak mempunyai laut lagi, begitu juga dengan tabel pemantauan kualitas air laut, tabel luas tutupan terumbu karang, tabel presentase kerusakan padang lamun, tabel kependudukan dilaut dan dipesisir, tabel budidaya laut dan pesisir, tabel pengelolaan sampah dikawasan wisata bahari dan tabel abrasi dan reklamasi seperti yang ditampilkan dalam kumpulan data SDB tabel. 3.35, 3.47, 3.48.a, 3.48.b. 3.48.c, 3.49, 3.50, 3.51 dan 3.52 seperti yang ditampilkan dalam kumpulan data nihil.

Untuk jumlah volume air dan data sumur pantau belum adanya data yang tersedia dari instansi terkait karena program atau kegiatan tersebut belum dianggarkan pada tahun 2007 ini berkrmungkinan besar akan dilaksanakan pada tahun 2008 nantinya.

C. Pemantauan dan Analisa Air Hujan



Analisa Kualitas Air Hujan pada tahun 2006 dimana hasil analisa dari Stasiun Pemantauan Atmosfer Global GAW Bukit Tobang Koto Tabang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam dimana parameter yang di pantau adalah: Derajt, Keasaman, Daya hantar, Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Kalium (K), Amonium (NH₄), Klorida (Cl), Sulpat (So₄), Nitrat (No₃), dan Kesadahan dimana hasil pemantauan dan analisa kualitas Air Hujan dapat dilihat pada kumpulan data SDA tabel 3.29

D. Pemantauan dan Hasil Analisa Udara Ambien

Pemantauan kualitas udara ambien dan kondisi iklim dilakukan oleh Stasiun pemantauan Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang dimana parameter yang yang di pantau adalah : O zon, Permukaan, O₃, Carbon Monoksida, CO, SO₂, NO₂, TSP, PM₁₀, PM_{2,5}.

Untuk pemantauan pada bulan Juli tahun 2006 untuk parameter Ozon rata-rata 12,45 dengan kadar maksium 29,04 dan minimum 1,70 ppb. Untuk bulan Agustus rata-rata 16,23, maksimum 40,24 Minimum 2,19. untuk tahun 2007 pemantauan pada bulan Januari rata-rata 15,08, Maksium 41,42 minimu 0,03 ppb untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel SDA 3.30. berdasarkan Keputusan Kepala Bapeda Nomor : KEP-107/Kbapedal/11/1997 tanggal 21 November 1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara dapat di ambil kesimpulan bahwa hasil pemantauan untuk parameter Ozon, Carbon Monoksida, CO, NO₂, O₃, SO₂, dan Partikulat masih jauh dibawah nilai



Ambang Batas yang ditetapkan dengan demikian kondisi udara Ambien di Kabupaten Pasaman masih dalam **kondisi baik**.

3.2.3. Lingkungan Pemukiman

Kabupaten Pasaman merupakan suatu *entity* yang memperlihatkan sejarah perkembangan Kabupaten dengan dinamika masyarakatnya yang tumbuh dan berkembang menjadi Kabupaten jasa, perdagangan dan industri.

Implementasi konsep dasar Induk Kabupaten Pasaman yang dituangkan dalam peraturan tata ruang kota tampak bahwa pemukiman/perumahan merupakan salah satu dasar membentuk struktur kota. Pemukiman/perumahan merupakan unsur pendukung/penunjang dari pusat pengembangan Kabupaten yaitu pusat pengembangan pendidikan dan industri. Tetapi pemukiman juga menjadi struktur wilayah pembangunan perumahan dan pemukiman. saat ini tidak hanya di ibu kota kabupaten dan kecamatan tetapi juga di wilayah pedesaan dan perkotaan lainnya yang ada di Kabupaten Pasaman. Pembangunan perumahan dan permukiman pedesaan perlu dilakukan pada kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk pengembangan pertanian dan industri. Hal ini mengingat bahwa dengan bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan rumah dipedesaan yang masyarakatnya lebih banyak bermata pencarian di sektor pertanian akan bertambah pula disamping perlu dilakukan pembatasan untuk pengembangan pemukiman yang rawan bencana dan kawasan lindung. Penerapan syarat-syarat kesehatan bagi rumah dan pemukiman sebanyak 88.989 buah rumah yang ada di Kabupaten Pasaman sangat berpengaruh pada penghuni dan lingkungan. Ini diperlukan karena hanya 46,23 % rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari



18.656 yang telah diteliti di Kabupaten Pasaman. (RPJM Kab. Pasaman 2006 – 2010).

Untuk data banyaknya rumah tangga bertempat tinggal dibantaran /tepi sungai data tidak tersedia karena masyarakat Kabupaten pasaman yang tinggal di tepi sungai tidak ada yang ada hanya pondok-pondok untuk peristirahatan sementara. Data dapat dilihat pada kumpulan data SDB 3.12. dan juga data jumlah kendaraan bermotor dan bahan bakar yang digunakan tidak dapat di klasifikasikan karena data untuk jumlah kendaraan bermotor dan jenis bahan bakar yang digunakan tidak adanya data yang tersedia (SDB 3.13) dan juga daftar industri penghasil limbah B3 (SDB. 3.14).

Data untuk banyaknya rumah tangga yang tanpa septik tank dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman baru yang tertata oleh Dinas Kesehatan dan KB berjumlah 9 Kecamatan Yaitu : Kecamatan Tigo Nagari, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti, Padang Gelugur, Rao Mapat Tunggul, Duo Koto dan Rao Selatan dengan jumlah KK dapat dilihat pada Kumpulan Data SDB. 3.8.

Kota Lubuk Sikaping sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman yang berperan sebagai pintu gerbang menuju ke seluruh kecamatan, tentu membutuhkan kecukupan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai untuk mendukung peran dan fungsinya sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman. Hal ini tentu membawa konsekuensi pada hasil samping dari aktifitas pemukiman berupa limbah padat baik dalam bentuk sampah organik dan an organik. Produksi sampah ini tidak hanya berasal dari pemukiman juga berasal dari katifitas pasar sebagai tempat terjadi transaksi/jasa dan keluar masuk berbagai material diatas. Produksi sampah ini tampaknya terus terjadi setiap saat/setiap hari. Jika produksi sampah dari katifitas pemukiman dan pasar ini tidak dikelola dengan baik tentu akan



menjadi masalah lingkungan yang cukup serius sehingga akan dapat mengganggu kelancaran berbagai aktivitas sektor lainnya. Dimana jumlah sampah yang dihasilkan atau banyaknya tempat pembuangan sampah dan pengelolaan sampah dapat dilihat pada kumpulan data tabel . SDB 3.15 dan SDB 3.16.

1. Kondisi Lingkungan

Salah satu isu sentral mengenai kawasan pemukiman di Kabupaten Pasaman adalah masih banyaknya pemukiman yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan data yang diketahui bahwa dari sekitar 88.989 buah rumah yang ada di Kabupaten Pasaman, 46,23 % rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari 18.656 yang telah diteliti di Kabupaten Pasaman. Disamping itu masih terdapat kawasan kumuh dengan rumah yang tidak layak huni (RPJM Kab. Pasaman 2006 – 2010)

Pemukiman yang layak huni dengan sarana dan prasarana yang memadai merupakan dasar untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Berkembangnya berbagai fasilitas pemukiman di sepanjang jalan alteri dan kolektor menunjukkan adanya perkembangan fasilitas Kota. Akan tetapi perkembangan tersebut sering sekali tidak sesuai dengan konsep lingkungan pemukiman yang seharusnya seluruh fasilitas pemukiman tersebut berkelompok pada pusat-pusat pemukiman sehingga dapat diperoleh efektifitas pemanfaatan lahan dan fasilitas kota yang optimal. Kondisi ini akan berimplikasi pada penyebaran dan produksi hasil sampingan terutama limbah padat (sampah) dan limbah yang sulit untuk dikelola secara optimal pula. Penanganan dan pengelolaan sampah mempunyai potensi yang besar



berkaitan dengan penanganan masalah kebersihan kota yang diakibatkan oleh berkembangnya aktivitas perekonomian dan pemukiman.

2. Tekanan dan Dampak

Dengan adanya pertambahan penduduk di Kabupaten Pasaman tentu membutuhkan sarana dan prasarana pemukiman yang lebih banyak dan tersebar hampir seluruh wilayah Kabupaten Pasaman. Jumlah penduduk dan kebutuhan akan perumahan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, serta ditunjang dengan keberadaan kota Lubuk Sikaping dan pusat transaksi ekonomi dan jasa (pasar dan aktivitas perkotaan), maka tingginya aktivitas tersebut sebanding pula dengan hasil samping yang akan dihasilkannya seperti limbah padat berupa sampah (organik dan an organik) dan limbah cair serta hasil samping lainnya.

Masih banyaknya pemukiman yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai antara lain disebabkan oleh :

- 1) Pembangunan perumahan oleh pengembangan tanpa adanya kewajiban dari pemerintah untuk melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang memadai,
- 2) Pengembangan kawasan pemukiman yang tidak mempunyai konsep yang jelas sehingga banyak fasos dan fasum yang harusnya tersedia menjadi terabaikan,
- 3) Pembangunan kawasan pemukiman dilakukan secara bertahap sehingga sarana dan prasarana yang awalnya tersedia dan mencukupi dengan



adanya pengembangan kawasan menjadi tidak berimbang dengan penghuni kawasan yang di manfaatkan.

Masih terdaptnya kawasan kumuh dengan kondisi rumah yang tidak layak huni atau tidak memenuhi standar kesehatan. Hal ini disebabkan oleh :

- 1) Perencanaan kota yang dibuat tidak sesuai dengan aturan,
- 2) Belum adanya kebijakan, fasilitas, dan stimulasi dari pemerintah dan hal penyediaan pemukiman yang layak dan sehat terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,
- 3) Resesi ekonomi dan tingkat inflasi yang jauh meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan semakin menurunnya daya beli masyarakat.

Banyaknya kawasan perumahan yang terdapat di daerah rawan bencana yang perlu segera di relokasi. Pada umumnya pemukiman ini terdapat di lereng bukit atau dataran rendah. Masyarakat tertarik untuk membuat pemukiman di kawasan sejenis ini karena pada umumnya harga tanah murah sekali atau sama sekali tidak dibeli tetapi didapatkan dengan cara membersihkan lahan dari pepohonan atau semak belukar, atau pada awalnya lokasi didapat tidaklah termasuk daerah rawan bencana, tetapi semakin banyaknya orang yang berminat untuk tinggal di daerah tersebut, lambung bukit semakin terbuka sehingga menjadi daerah rawan longsor.

3. Respon Pemerintah dan Masyarakat

Untuk mengatasi masih banyaknya pemukiman yang tidak dilengkapi sarana yang memadai, pemerintah Kabupaten Pasaman berusaha



meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana lingkungan. Selain itu dilakukan kajian, evaluasi dan revisi tentang pembangunan pemukiman beserta komponen sarana dan prasarannya. Sedangkan respon masyarakat dapat dilihat melalui goro bersama di berbagai kompleks perumahan, membersihkan got/parit untuk mencegah banjir di musim hujan. Untuk mengatasi masalah terdapatnya kawasan perumahan yang tidak memenuhi standar kesehatan pemerintah Kabupaten memprogramkan kegiatan perbaikan lingkungan pemukiman dan perumahan, serta revitalisasi dan pelestarian kawasan pemukiman. Pemerintah merencanakan untuk merelokasi semua pemukiman yang terdapat di kawasan rawan bencana.

Pengelolaan sampah telah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dengan membuat TPS dan mobil kendaraan pengangkut sampah. Akan tetapi penanganan tersebut masih mengalami hambatan karena adanya keterbatasan dalam pengadaan fasilitas pengelolaan sampah baik jumlah mobil dan kualitasnya, terbatasnya TPS yang ada (kontainer dan bak sampah), terbatasnya tenaga dan kemampuan dana.

Dilain pihak, kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih kurang. Sebagian besar masyarakat hanya terbatas pada pengelolaan sampah dilingkungan rumahnya sendiri, tanpa mempedulikan lingkungan lainnya. Kurangnya kepedulian individu dalam mengatasi masalah sampah oleh sebagian besar masyarakat, mungkin disebabkan kemampuan mereka untuk membayar retribusi sampah dan pengetahuan tentang arti penting menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya, mereka lebih mudah/gampang membuang



sampah dari berbagai lingkungan yang ada termasuk ke sungai dan ke got atau drainase.

Disamping itu, diperlukan adanya himbauan/sosialisasi, atau program pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat tentang arti penting kebersihan lingkungan. Untuk mendukung program pemerintah dan mendapatkan piagam Adipura untuk Kabupaten Pasaman sebagai kota kecil terbersih.

3.2.4. Fasilitas Umum

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten pasaman Nomor : 06 Tahun 1989 yang sebelumnya berbentuk Badan Pengelola Air minum (BPAM) Kabupaten Pasaman, dialih status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten pasaman pada tahun 1990. Sesuai dengan Undang – Undang 1945 Pasal 33 ayat 3, bahwa udara, air, dan bumi serta yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, maka sesuai maksud UUD 1945 diatas PDAM sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Air bersih yang merupakan utilities bagi masyarakat, PDAM Kabupaten Pasaman mengemban 2 (dua) fungsi yakni :

1. Memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Menghimpun pendapatan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih untuk hajat hidup orang banyak PDAM sebagai pelaksana sedangkan otoritas yang lebih kuat dan



berkepentingan adalah Pemerintah Daerah sebagai stakeholder PDAM, maka untuk kesinambungan pelayanan air bersih kedepannya PDAM perlu melakukan pembuatan dan pemeliharaan dan rehabilitasi antara lain :

1. Pembuatan bak reservoir
2. Penggantian jaringan perpipaan yang sudah tua, baik itu pipa transmisi maupun pipa distribusi.
3. Pembuatan bangunan baru intake.

Dengan pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh PDAM tentunya tidak akan terlepas dari dukungan lingkungan disekitarnya. Saat ini PDAM Kabupaten Pasaman mengelola sebanyak 12 (dua belas) unit lokasi sumber air baku yang terdiri dari sumber air bawah tanah dan permukaan tanah, antara lain :

1. Lubuk Sikaping sebanyak 6 (enam) unit sumber yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit sumber air bawah tanah lokasi Bulakan Tanjung Beringin.
 - b. 5 (lima) unit sumber air permukaan tanah lokasi Air manggis, Jambak, Pagariang Tanjung Beringin, Pakau Tanjung Beringin dan Tanjung Alai.
2. Bonjol sebanyak 1 (satu) unit sumber air bawah tanah lokasi Tanjung Bunga.
3. Kumpulan sebanyak 2 (dua) unit sumber air bawah tanah lokasi Kampung Melayu Kumpulan dan Toboh Simpang.
4. Panti sebanyak 1 (satu) unit sumber air permukaan tanah lokasi Batu Hampar Panti.



5. Rao sebanyak 1 (satu) unit sumber air permukaan tanah lokasi Mudik Tampang Rao.
6. Cubadak sebanyak 1 (satu) unit sumber air bawah tanah lokasi Paraman Kakar Cubadak.

Ditinjau dari kondisi lingkungan sumber – sumber air yang dikelola PDAM Kabupaten Pasaman pada saat ini dapat disampaikan sebagai berikut :

- ▶ Terjadinya pencemaran pada beberapa sumber air permukaan akibat perubahan pemanfaatan hutan seperti adanya ladang berpindah oleh penduduk sekitar lokasi sumber.
- ▶ Makin berkurangnya debit air produksi pada sumber air bawah tanah akibat dari pembabatan hutan sekitar lokasi sumber.

Terhadap kondisi lingkungan sumber yang ada tersebut diatas, maka PDAM Kabupaten Pasaman maupun Dinas / Instansi terkait kedepannya dalam pelestarian lingkungan sumber air harus melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat arti pentingnya air bersih untuk kehidupan.
2. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat akibat dampak yang akan ditimbulkan apabila terjadinya pembabatan hutan.



3. Perluasan pemukiman yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah pembangunannya harus berada pada lokasi dibawah sumber air permukaan yang dikelola oleh PDAM .

Untuk kelestarian lingkungan sumber air PDAM kedepannya dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah antara lain:

1. Pembebasan hak kepemilikan seluruh tanah lokasi sumber di lingkungan PDAM Kabupaten Pasaman yang belum mempunyai sertifikat.
2. Pembebasan tanah disekitar lokasi sumber air bawah tanah radius 50 M ' (Compleat Area)
3. Pelaksanaan penghijauan disekitar lingkungan sumber dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas ketersediaan kandungan air di lingkungan sumber.

Berdasarkan 3 (tiga) hal dimaksud mengingat Cash Flow dana PDAM yang sangat terbatas, maka diharapkan bantuan / subsidi dari Pemerintah Daerah untuk pendanaannya. Berdasarkan banyaknya pelanggan dan pemakai air bersih PDAM menurut lokasi dapat dilihat pada kumpulan data SDA tabel 3.7. dimana untuk kelompok I berjumlah 159 dengan volume 71.112 m³/tahun, kelompok II berjumlah 669 dengan volume 153.567 m³/tahun, kelompok III dengan jumlah 6.327 dengan volume 2.255.085 m³/tahun dan kelompok IV dengan jumlah 1.682 dengan volume 26.031 m³/tahun. Dari data diatas tersebut tersebar pada beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten



Pasaman yakni : Lubuk Sikaping, Bonjol (kumpulan), Panti (petok) , Rao , dan Cubadak.

A. KELOMPOKI

Kelompok pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara lain:

- Hydrant Umum
- Kamar Mandi / W C Umum
- Terminal Air

a. Tempat Ibadah

B. KELOMPOK II

Kelompok pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat ekonomi lemah serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatan antara lain :

- Panti Asuhan
- Yayasan Sosial Sekolah Negeri
- Rumah Sakit Pemerintah
- Instansi Pemerintah dan ABRI
- Rumah Sangat Sederhana, rumah dengan bahan bangunan dari kayu ukuran 6 X 7 M²



C. KELOMPOK III

- Rumah sederhana, rumah dengan bahan bangunan permanen dan semi permanen.
- Niaga Kecil / Industri Rumah tangga, rumah yang termasuk kelompok tarif III akan tetapi terdapat usaha tambahan didalamnya dan atau diluar bangunan dalam persil tersebut yang dapat menghasilkan keuntungan tarif air minumnya.
- Instansi Pemerintah / TNI dan POLRI Tingkat Kabupaten dan Kodya, jika Instansi Pemerintah / TNI dan POLRIserta Rumah Dinas yang rekening air minumnya dibayar oleh instansi terkait,

D. KELOMPOK IV

- Rumah Mewah, tangga dengan bahan bangunan yang termasuk menengah sampai dengan mewah tidak ada kegiatan usaha termasuk didalamnya antara lain :
 1. Rumah tangga permanen berlantai II atau berbentuk ruko.
 2. Rumah tangga permanen Type 100
 3. kelompok perumahan Real Estate type 100 atau lebih keuali perumnas dan BTN sebelum merubah bentuk sesuai dengan perjanjian kontrak.



- a. Industri besar, yang termasuk kelompok ini adalah Golongan Pelanggan yang dalam kegiatan usahanya setiap hari untuk mendapatkan keuntungan seperti Ruko, Kantor Perusahaan Milik Swasta, Biro Jasa, Rumah Makan, Losmen/Penginapan, Hotel, Pabrik Minuman dan usaha industri lainnya.

3.2.5. Pariwisata

Kabupaten Pasaman mempunyai objek wisata antara Rimbo Panti, dan Museum Tuanku Imam Bonjol, ini merupakan salah satu pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman. Jumlah pengunjung atau kedatangan wisatawan pada objek-objek tersebut diatas dimana dari data tahun 2005 wisatawan dari manca negara yang berkunjung ke objek wisata tersebut adalah berjumlah 10.567 . pada tahun 2006 terjadi penurunan kunjungan wisata baik manca negara maupun wisata nusantara yakni berjumlah 9.670 orang (Tabel SDB. 3.19)

Dengan adanya kunjungan wisatawan tersebut maka berpengaruh terhadap penginapan atau hotel yang terdapat di Kabupaten Pasaman dimana pada tahun 2006 jumlah hotel atau penginapan yang beropesari berjumlah 8 penginapan dan 5 Hotel/Wisma) dengan jumlah kamar untuk penginapan berjumlah 83 kamar, dan untuk hotel berjumlah 62 buah kamar. untuk lebih jelas lihat tabel SDB 3.2.1.

a. Kondisi Lingkungan



Ditinjau dari sudut pandang masing – masing instansi pada saat ini yaitu :
Masih kurangnya peduli (perhatian) terhadap lingkungan oleh masing – masing Dinas, Badan, Kantor, BUMD, serta lembaga pertical lainnya. Terlihat disana sini masih gersang dan kurang terurus karena:

-Belum punya taman dan pohon pelindung
-Sanitasi yang kurang diingini.
-Belum semua kantor yang punya K3 / taman
-Belum tersedianya dana untuk membuat taman .

2. Tekanan dan Dampak

Tekanan dan dampak terhadap lingkungan baik alam, lingkungan buatan ataupun lingkungan sosial yang bertentangan dengan prinsip konservasi dan pembangunan, dilengkapi dengan dampak yang ditimbulkan.

- Bencana Alam dan Lingkungan Sosial
 - 1.....Penebangan liar, hutan menjadi gundul, erosi yang tidak dapat menahan menyebabkan banjir.
 - 2.....Pembuangan sampah kesungai, keselokan, bandar yang menyebabkan aliran tersumbat dan menimbulkan banjir.
 - 3.....Pembangunan tempat pemukiman dengan bertambahnya jumlah penduduk tidak seimbang dengan ekosistem sehingga menimbulkan banjir.

3. Respon Pemerintah dan Masyarakat



-Kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan terbukti banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau selokan.
-Kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan terbukti kurangnya dana untuk mengurus aliran sungai

3.2.6. Sektor Perekonomian

Kondisi ekonomi Kabupaten Pasaman mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2005 Indeks Harga PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk lapangan usaha secara nominal terjadi peningkatan lapangan usaha (pertanian) yakni tahun 2005 berjumlah 857.083,67 pada tahun 2006 terjadi peningkatan untuk usaha pertanian yaitu 1.029.453,54 untuk tahun 2007 belum adanya data tersedia. Untuk lebih jelas lihat kumpulan data SDB. 3.22.

Indeks berantai atas dasar harga konstan (laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman) tahun 2005 dan tahun 2006 (SDB tabel 3.23) digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu gambaran mengenai dampak pelaksanaan pembangunan yang digariskan khususnya di bidang ekonomi. Indikator ini mempunyai arti penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di suatu daerah dan menentukan arah pembangunan di suatu daerah pada masa yang akan datang. Dalam Memahami perekonomian suatu daerah secara umum ada tiga indikator yang menjadi fokus perhatian yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi
 2. Struktur Ekonomi
 3. Pendapatan Perkapita / Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB),
- ketiga indikator ini menjadi perhatian dalam menaikkan target perkembangan ekonomi Kabupaten Pasaman selanjutnya akan dilihat dan dianalisis ketiga indikator tersebut.

Data PDRB Kabupaten salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisai perekonomian suatu wilayah tiap tahunnya. Dari data PDRB ini dapat ditarik empat manfaat antara lain :



- b. PDRB atas hanya berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan PDRB yang besar merupakan sumber daya ekonomi yang besar juga dan sebaliknya.
- c. PDRB atas hanya berlaku menunjukkan pendapatan yang mungkin dapat diminati oleh penduduk suatu daerah.
- d. PDRB hanya konstan (Riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap ekonomi dari tahun ke tahun
- e. Distribusi PDRB hanya berlaku menurut sektor ekonomi atau perubahan sektor ekonomi dalam suatu Daerah.

Untuk melihat perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Pasaman dalam hal kemajuan pembangunan dapat pula diketahui dengan melihat perubahan struktur ekonomi suatu daerah, karena perubahan struktur juga merupakan unsur penting dalam proses pembangunan daerah. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang bervariasi antar sektor lapangan usaha menyebabkan terjadinya pergeseran struktur perekonomian. (Sumber: BPS dan Pasaman Dalam Angka Tahun 2006)

1. Kondisi Lingkungan

Bagi Industri Kecil (Golongan Industri Lemah) dalam penanganan limbah industri dan peraturan – peraturannya, ditambah lagi dengan keterbatasan dana, akan tetap menempatkan pengendalian limbah dan dampak lingkungan pada prioritas terakhir, padahal apabila kondisi seperti ini terus berlangsung maka dalam jangka panjang atau jangka pendek akan membuat perubahan pada lingkungan. Untuk mengetahui hal tersebut pemerintah harus merencanakan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan, salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dari sektor industri adalah dengan memiliki tim pengawas terhadap dampak lingkungan (AMDAL) sehingga pengaruh yang ditimbulkan dapat diatasi dengan baik.

Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam dan faktor produksi yang dimilikinya. Hal ini berarti perekonomian di suatu daerah terbentuk



dari berbagai macam aktivitas atau kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. Kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasaman tahun 2003 sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya kinerja pembangunan ekonomi ini disebabkan karena kondisi sosial politik dan keamanan yang lebih kondusif.

2. Tekanan dan Dampak

Apabila jumlah penduduk diproyeksikan ke luas lahan pertanian yang ada menampakkan adanya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian yang cukup tinggi terutama di Kecamatan Lubuk sikaping, Kecamatan Bonjd dan Kecamatan Duo Kota

Kepadatan penduduk tersebut sudah dapat memberikan suatu gambaran masalah yang akan mengancam kelestarian sumber daya alam, terutama pada lahan kawasan lindung, karena secara dimensi keruangan lahan pertanian serba terbatas sebaliknya tuntutan penduduk terhadap lahan pertanian cenderung meningkat setiap tahunnya secara linear.

Eksplorasi hutan akan semakin tinggi dengan terjadinya peningkatan usaha masyarakat ke pertanian khususnya ladang diiringi dengan semakin terjadinya pergeseran fungsi lahan. Hal ini dari waktu ke waktu akan semakin tinggi seiring dengan semakin terbatasnya lapangan usaha non pertanian, makin tingginya jumlah penduduk dan pergeseran fungsi lahan yang ada akibatnya hutan sebagai daerah tangkapan air akan semakin dieksplorasi



3. Respon Pemerintah dan Masyarakat

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas apabila kegiatan manusia yang terkonsentrasi pada satu tempat tertentu dan upaya pengendaliannya tidak segera dilaksanakan akan dapat membahayakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan masyarakat. Oleh sebab itu salah satu langkah yang mungkin bisa ditempuh adalah mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah yang tidak berdampak pada eksploitasi hutan secara berlebihan dan dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan diperlukan upaya pengendalian lingkungan berupa rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang berwawasan lingkungan.

3.2.7. Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi sekunder dan tersier yang relevan dengan konsep Kabupaten sesuai dengan fungsi peran kabupaten sebagai pembangunan daerah. Kabupaten Pasaman dikenal saat ini tengah berupaya menggali sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Industri besar yang terdapat di Kabupaten Pasaman tidak ada untuk itu pemantauan emisi industri besi dan baja, pemantauan emisi pulp dan kertas, pemantauan emisi pembangkit listrik tenaga uap, pemantauan emisi industri semen, pemantauan emisi industri logam dan non logam seperti ditampilkan dalam kumpulan data SDB tabel 3.45.a, 3.45b, 3.45c,,3.45d, 3.45e, dan tabel SDB 3.45e data nihil.

Dengan tidak adanya industri besar di Kabupaten Pasaman lapangan usaha yang mempunyai peluang untuk dikembangkan antara lain adalah perkebunan, pertanian, pertambangan, industri dan perikanan darat. Dari sektor pemasaran Kabupaten Pasaman memiliki Daerah yang cukup strategis ini terbukti bahwa Kabupaten Pasaman merupakan salah satu jalur lintas Sumatera dan merupakan gerbang utara Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau.



Mengingat perkembangan sektor pertanian yang cukup baik di Kabupaten Pasaman merupakan salah satu prospek untuk berkembangnya agro industri dan industri kecil dan industri rumah tangga pada umumnya. Diharapkan pada gilirannya nanti dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari data dapat dilihat untuk masing-masing potensi Industri Kecil Menengah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 dimana untuk nilai produksi yang terbanyak terdapat di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dengan Nilai Produksi 149.295.200 . Dilihat dari investasi yang ditanamkan diberbagai kecamatan dan dari potensi industri kecil menengah dikuasai oleh Kecamatan Panti dengan nilai investasi Rp. 3.751.500 untuk potensi Industri Kecil Menengah dalam penerapan tenaga kerja dikuasai oleh Kecamatan Rao dengan penyerapan tenaga kerja 829 orang. Untuk lebih jelas lihat kumpulan data SDB tabel 3.24.

Kegiatan industri selama lima tahun terakhir mengalami pasang surut , fluktuasi ini sangat erat kaitannya dengan krisis moneter yang terjadi di akhir tahun 1997, seterusnya berlanjut menjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia secara merata pada saat itu industri mengalami kelesuan. Namun dua tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah industri sekitar ($\pm 10\%$).

Meskipun kegiatan Industri di Kabupaten Pasaman belum termasuk kegiatan utama dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun dalam bidang perindustrian ini dapat ditingkatkan, peningkatan ini dimungkinkan bahwa masih banyak potensi SDA (Sumber Daya Alam) yang bisa diolah menjadi produk industri misalnya adalah Produk Pertanian, Perkebunan kehutanan dan Pertambangan. Saat ini banyak hasil pertanian dan perkebunan yang dijual kedaerah lain seperti Riau, Medan dan Batam.



Hanya saja nampaknya diperlukan perbaikan – perbaikan dalam hal – hal perizinan Penegakan kepastian Hukum dan lain – lain adanya peningkatan dalam kegiatan industri ini tentu akan meningkatkan pendapatan daerah disamping meningkatnya daya serap tenaga kerja.

1. Kondisi Lingkungan

Sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Pasaman Yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, perkembangan industri di Kabupaten Pasaman sangatlah pesat hal ini terbukti banyaknya industri-industri besar yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit namun setelah terjadi pemekaran maka Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Pasaman tidak lagi memiliki industri yang berskala besar hanya memiliki industri – industri yang berskala kecil atau home industri hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Sumber Daya Alam yang belum diolah secara maksimal
2. Sumber Daya Manusia yang terbatas dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah
3. Teknologi yang tidak tepat guna dan masih menggunakan cara konvensional
4. Keterbatasan modal dan industri yang dimiliki pengusaha itu sendiri.

2. Tekanan dan Dampak

Dengan terdapatnya sejumlah industri pada beberapa ruas sungai yang masih menjadi sumber pencemaran. Hal ini dapat terjadi karena intensitas pengawasan yang kurang oleh instansi terkait, rendahnya pengetahuan masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan terhadap pembuangan limbahnya seperti industri rumah tangga pembuatan jerat babi dengan membakar ban-ban bekas dipinggir jalan dan pembuangan limbah hasil olahan ke badan sungai. Kondisi ini menyebabkan rendahnya mutu air sungai dengan dampak ikutan berupa pendakalan sungai. Dengan pendakalan sungai akan berakibat meningkatnya intensitas banjir di daerah hilir sungai terutama pada saat hujan lebat. Sehingga mengakibatkan hilangnya berbagai jenis flora dan fauna air akibat ketidak mampuan beradaptasi dengan pencemaran lingkungan.



3. Respon Pemerintah dan Masyarakat .

Untuk masa mendatang Pemerintah Kabupaten akan membebaskan pajak kepada perusahaan yang membuang limbah cairnya ke badan air. Dengan adanya ketentuan ini maka semua perusahaan, pengusaha pertambangan rakyat atau industri rumah tangga yang menjadikan sungai sebagai outlet limbah cairnya akan berusaha melakukan recycle dan reuse air limbahnya sehingga tidak ada yang perlu dibuang ke badan air dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar pajak.

Selain itu pemerintah Kabupaten akan melakukan peningkatan penataan lingkungan industri dan pemanfaatan kawasan, dan menjaga kondisi lingkungan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pemerintah Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan instruksi tentang kewajiban bagi setiap usaha/kegiatan untuk dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa Amdal, UKL/UPL maupun SPPL. Sampai bulan November 2007, dari sekian banyak perusahaan atau usaha/kegiatan baru 6 perusahaan yang melengkapi dengan dokumen UKL/UPL, 2 SPPL, dan 1 SOP. Meningkatnya perhatian pemerintah Kabupaten Pasaman terhadap kualitas lingkungan ditunjang oleh semakin pekanya masyarakat tentang kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan lestari. Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui instansi teknis seringkali mendapat laporan dari masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan maupun usaha/kegiatan.

Seiring dengan meningkatnya kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan sektor industri, dari pihak pengusaha menjadi cambuk untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan. Selain mewaspadai disinsentif yang akan dikenakan jika mereka mampu melakukan pengelolaan lingkungan dengan benar, seperti kinerja proper yang dihargai dengan predikat emas dan kapan perlu sampai mendapatkan ISO 14000 (sistem manajemen lingkungan).

Pengawasan dan pemantauan yang selama dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman terhadap berbagai jenis usaha dan industri telah berimplikasi positif terhadap kemajuan dan mutu limbah yang dihasilkan oleh berbagai jenis usaha dan kegiatan tersebut.



3.2.8. Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang pertanian, tanaman pangan dan Hortikultura di Kabupaten Pasaman menampilkan Luas tanam dan luas sawah, palawija, buah – buahan, dan sayur – sayuran. Dilihat dari topografi Kabupaten Pasaman untuk bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura ini sangat mendukung sekali kondisi alam dan juga masyarakatnya. Data keseluruhan dari Pertanian yang ada di Kabupaten Pasaman untuk tahun 2006, dimana luas panen dan produksi padi untuk padi sawah luas tanam terbesar terdapat di kecamatan Panti dengan luas 7.115. pada ladang yang terluas terdapat pada kecamatan Mapat Tunggul. (SDB tabel. 3.25).

Luas sawah menurut jenis pengairan (irigasi) yang terluas untuk irigasi teknis pada kecamatan Panti dengan luas 880 Ha, untuk setengah teknis terdapat pada kecamatan Tigo Nagari dengan luas 2638 Ha, untuk lebih lengkap dapat dilihat pada kumpulan data SDB 3.26.

Luas panen sayur-sayuran dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman untuk jenis kacang panjang terdapat pada kecamatan Lubuk Sikaping adalah 15 Ha, disusul kecamatan Padang Gelugur 12 Ha. Untuk Cabe kecamatan yang terbesar dalam hal panen adalah Panti dan disusul oleh kecamatan Lubuk sikaping untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data SDB. Tabel 3.27.

Luas panen palawija yang terbesar terdapat pada kecamatan untuk tanaman jagung adalah Tigo Nagari 394 Ha dengan produksi 1745, disusul Kecamatan Panti dengan luas 258 Ha dengan nilai produksi 1011 Ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data SDB tabel. 3.28.

Dan untuk tanaman buah-buahan luas panen dan produksi tanaman pisang terdapat pada kecamatan Lubuk Sikaping dengan luas tanam 62 Ha dengan hasil



produksi 1302 ton, disusul kecamatan Bonjol dengan luas tanam 41 Ha dengan hasil produksi 820 ton. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada kumpulan data SDB tabel 3.29. untuk data banyaknya pupuk dan pestisida yang digunakan disawah setelah di konfirmasi dengan Dinas tanaman pangan dan hortikultura data tidak tersedia ini dapat dilihat pada SDB tabel 3.11 data nihil.

1. Kondisi Lingkungan

Masih kurangnya peduli (perhatian) terhadap lingkungan oleh masing – masing Dinas, Badan, Kantor, BUMD, serta lembaga pertikal lainnya. Terlihat disana sini masih banyak terdapat pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan pestisida yang berlebihan dan pembibitan yang tidak terkontrol dan kurang terurus rumah potong karena:

- Belum punya lahan yang cukup luas dan sistem irigasi yang kurang memadai sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan
- Sanitasi yang kurang diingini.
- Belum semua kantor yang punya K3 / taman
- Belum tersedianya dana untuk meningkatkan pemugaran dan penataan tata ruang untuk irigasi.

2. Tekanan dan dampak

Tekanan dan dampak terhadap lingkungan baik alam, lingkungan buatan ataupun lingkungan sosial yang bertentangan dengan prinsip konservasi dan pembangunan, dilengkapi dengan dampak yang ditimbulkan.

- Bencana Alam dan Lingkungan Sosial
 1. Penebangan liar, hutan menjadi gundul, erosi yang tidak dapat menahan menyebabkan banjir dalam hal membuka lahan baru atau sawah.
 2. Pembuangan limbah hasil potongan kesungai, keselokan, bandar dan hasil dari penggunaan pestisida yang menyebabkan aliran air tercemar
 3. Pembangunan rumah pemotongan yang tidak tertata dengan baik.



3. Respon Pemerintah dan Masyarakat

- Kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan terbukti banyaknya masyarakat yang membuang sisa dari pemotongan hewan dan pembuangan bekas – bekas botol pestisida ke sungai atau selokan.
- Kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan terbukti kurangnya membuat drainase untuk pembuangan hasil pemotongan dan tempat – tempat pembuangan hasil pemakaian pestisida

3.2.9. Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Pasaman yang merupakan sub sektor pertanian sangat produktif dengan areal penggunaan lahannya seluas 33.167 Ha atau 8,3 % dari luas penggunaan lahan seluruhnya dapat berfungsi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan, sawah dan tegalan seluas 34.744 Ha atau 8,7 % sebagai ketahanan bahan pangan daerah. (SDA. tabel 3.14) Namun, perkembangan areal perkebunan di daerah ini masih memungkinkan dengan adanya konservasi lahan terhadap tanah belukar dan tanah rusak yang mencapai luasnya 45.333 Ha, disusul dengan hutan konversi yang merupakan alternatif dalam pengembangan investasi perkebunan secara besar-besaran di daerah ini. Melirik untuk daerah pengembangan perkebunan di Pasaman terdapat di beberapa kecamatan yang potensial dan memiliki lahan produktif yaitu di kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Rao Utara, Duo Koto, Tigo Nagari, Mapat Tunggul, Lubuk Sikaping, Bonjol dan Rao Selatan. Sumber RPJM 2005 -2010 Kabupaten Pasaman). Luas tamanan perkebunan menurut jenis taman yang terdapat di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman seperti kelapa, karet, kopi dan lain-lain dimana pada tahun 2006 luas tanam dan produksi terdapat pada tanaman karet dengan jumlah 22.595,5 ha, dengan produksi 15.006 ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel SDB kumpulan data 3,30.



Untuk tanaman kopi, karet dan kakao yang diserang hama pada tahun 2007. kecamatan yang paling tinggi diserang hama tanaman kopi (bubuk buah) terdapat pada kecamatan Lubuk Sikaping dengan 10 ha, kakao (helopeltis) terdapat di Kecamatan Rao 139 ha. (SDB.3.31). untuk tanaman karet yang terserang hama penyakit sadapan berat yang terluas terdapat pada kecamatan Mapat Tunggul seluas 338 Ha dan penyakit jamur akar putih terdapat pada kecamatan Simpang Alahan Mati dan Duo Koto seluas 19 ha. (SDB tabel 3.32).

1. Kondisi Lingkungan

Dipandang Dinas Perkebunan saat ini masih pada ambang toleransi, dengan alasan :

1. Petani membuka lahan baru sudah memperhatikan aspek teknis, seperti topografi, jenis tanaman yang dibudidayakan. Jenis tanaman yang banyak dibudidayakan adalah Kakao dan Karet. Secara morfologi kedua tanaman tersebut mempunyai perakaran yang dalam, percabangan dan daun yang lebat serta umur ekonomis yang cukup panjang (25 tahun). Tanaman kakao sepanjang hidupnya membutuhkan pelindung yang cukup. Maka jenis tanaman tersebut diatas disamping berfungsi sebagai sumber pendapatan juga dapat menjadi tanaman penutup tanah / pencegah erosi dan pengawet tanah dan air.
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1995 pasal 19 Bab III tentang perlindungan tanaman, bahwa penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan alternatif terakhir, Hal ini sudah diterapkan pada sektor perkebunan di Kabupaten Pasaman. Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat sudah mengembangkan musuh alami agensia hayati di Laboratorium Hayati Ulu Gadut Padang seperti antara lain :



- Jamur Akar Putih (JAP) dikendalikan dengan Musal Tricode Derma Koningli.
- Spicaria untuk mengendalikan hama penggerek cabang, ranting dan buah kopi.
- Jamur Metarhizium untuk mengendalikan hama kumbang kelapa.
- Pengendalian hama Helopeltis dan hama coconout dengan sistem kondomisasi (penyarungan buah)

Semua musal tersebut diatas sudah dilepas / diterapkan di Kabupaten Pasaman sejak tahun 1995.

2. Tekanan dan Dampak

Tekanan dan dampak terhadap lingkungan alam dan sosial yang bertentangan dengan prinsip konservasi dan pembangunan dan dampak yang ditimbulkan.

- keterbatasan luas lahan usaha (rata – rata 0,5 – 1 Ha), rendahnya pendapatan, tidak dapat menabung, tidak ada investasi (berada dalam lingkaran setan yang tidak berujung pangkal) keadaan ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat.. Situasi tersebut mendorong tekanan terhadap lingkungan dan sosial, masyarakat akan memandang hutan sebagai sumber ekonomi dan menggarap hutan dengan cara mereka sendiri – sendiri.
- Fluktuasi harga dan jatuhnya harga sebagian komoditi seperti kulit manis.
- Pengolahan Hasil, perbaikan mutu dan menciptakan sistim pemasaran yang baik melalui pasar lelang.

3. Respon Pemerintah dan Masyarakat.

- Tuntuan ekonomi yang semakin kuat dan interaksi masyarakat semakin nyata, perlu diringi dengan bimbingan dan peraturan yang tepat dan kontinyu serta



penegakan hukum yang pasti. Bisa saja terjadi seseorang / kelompok tani membuka lahan di daerah aliran sungai dengan tingkat kemiringan tanah diatas 15 % tanpa mengetahui akibatnya dan setelah gagal lalu ditinggal begitu saja, sebaliknya walaupun di Daerah Aliran Sungai tetapi topografi lahan datar, hal ini akan lebih menguntungkan bila digarap.

- Langkah yang telah dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup petani perkebunan adalah :
 - Mengadakan Pelatihan Peningkatan pengetahuan keterampilan setiap petani
 - Pengadaan bibit kakao dan karet bersubsidi
 - Pemberdayaan tempat lelang karet
 - Pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil

3.2.10. Perikanan dan Peternakan

Kegiatan peternakan di Kabupaten Pasaman masih kecil perannya terhadap perkembangan ekonomi kabupaten ini. Walaupun sektor pertanian yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pasaman. Hal ini merupakan gambaran sampai sejauh mana usaha peternakan berperan dalam perkembangan perekonomian masyarakat di daerah ini.

Pengusahaan peternakan oleh penduduk di Kabupaten Pasaman masih merupakan usaha masyarakat yang bersifat sampingan sebagai tabungan hidup, namun cukup besar peranannya dalam menambah pendapatan keluarga. selama kurun waktu 1999–2006 terlihat bahwa beberapa jenis ternak mengalami perkembangan populasi yang cukup tinggi di antaranya adalah ternak unggas seperti ayam



kampung dan itik. Sedangkan untuk temak besar dan kecil juga memperlihatkan adanya perkembangan populasi terutama untuk jenis ternak sapi potong. Kenaikan produksi temak tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pasaman untuk mendorong para peternak melaksanakan intensifikasi, di samping dipengaruhi peningkatan kebutuhan masyarakat akan pangan khususnya yang berasal dari protein hewani yang berasal dari daging, telur, susu dan ikan. (Sumber RPJM Kab. Pasaman 2006 -2010)

Untuk peternakan seperti populasi dan produksi unggas yang terdapat di Kecamatan di Kabupaten Pasaman terdapat produksi telur dan daging dari temak unggas, produksi telur dan daging dari ternak unggas tertinggi untuk ayam buras Tigo Nagari jumlah 30698,17 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kumpulan data SDB tabel 3.33.

Untuk sarana pemotongan hewan di kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pasaman terdapat di kecamatan Lubuk Sikaping. (SDB tabel 3.34) dan untuk banyaknya jumlah ternak pemotongan dan produksi daging menurut jenis temak untuk jenis ternak kuda, sapi, kerbau, kambing dan domba aynng tertinggi adalah ternak sapi dengan jumlah temak 8.290 ekor dan pemotongan 1.217 ekor dengan harga perkilonya Rp. 50.000,- (SDB tabel 3.35

Untuk jumlah dan jenis ternak seperti ternak Sapi perah, sapi potong, kambing, kuda, kerbau, domba, babi, aym buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik di kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman yang terbesar terdapat pada untuk sapi potong kecamatan Tigo Nagari dengan jumlah 4359. kerbau kecamatan Tigo



Nagari berjumlah 1500 untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data SDB tabel 3.37.

Berikutnya jumlah rumah tangga pemelihara ternak berdasarkan jenis temak tiap Kecamatan di Kabupaten Pasaman untuk ayam buras jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Lubuk Sikapinmg untuk ayam Buras, Untuk lebih jelas lihat kumpulan data tabel SDB 3.38 .

Dari gambaran perkembangan populasi ternak dan jumlah rumah tangga pemelihara dapat memberikan kesan bahwa masyarakat tidak mempunyai keinginan untuk mengembangkansapi perah, sapi potong, kuda, domba, serta kambing. Posisi kepemilikan temak ini lebih cenderung sebagai pelengkap dan cadangan untuk mendapatkan dana, ternak ayam ras pedaginghanya untuk memenuhi kebutuhan suatu kelompok masyarakat. Untuk ternak ayam petelur sudah terjadi pergeseran intensif, yang sebagian sudah melirik kepada nilai komersil dengan pemeliharaan intensif. Namun demikian penempatan temak ayam petelur sebagai cadangan untuk mendapatkan dana masih belum ditinggalkan.

1. Kondisi Lingkungan

Dari data diatas dapat dinyatakan bahwa tekanan dibidang peternakan terhadap lingkungan adalah berupa pemenuhan ternak untuk memproduksi melalui pengadaan pakan yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Berikut jumlah limbah dari pemotongan hewan yang belum terkoordinir sepenuhnya baik berupa kotoran, isi rumen, tulang, darah dan air cucian pasca pemotongan. Isi rumen dan kotoran ini sebenarnya sebagai bahan organik dapat didah menjadi pupuk organik melalui proses pengomposan, tulang darah dapat diolah menjadi sumber kalsium dan



sumber protein bagi ternak. Limbah lain pada pasca Pemotongan juga diendapkan dulu oleh IPAL (Instalasi Pengdahan Air Limbah) yang nantinya diperdeh endapan yang juga bisa berguna sebagai pupuk organik.

2. Tekanan dan Dampak

Tekanan untuk pemenuhan kebutuhan hewan juga dapat diatasi dengan penanaman hijauan secara sisipan dilahan – lahan pertanian atau perkebunan , penanaman biji – bijian sebagai selingan sesudah panen palawija lainnya.

Tekanan lingkungan terhadap ternak juga terjadi oleh sempitnya lahan untuk pengembalaan karena alih fungsi lahan, musim yang tidak teratur, pemotongan hewan yang meningkat, program sanitasi peternakan yang tidak ketat di kalangan peternak, faktor teknologi bidang peternakan yang lambat berkembang dan belum cukup teknologi dengan kondisi lokal.

3. Rekomendasi Pemerintah dan Masyarakat

Walaupun kegiatan usaha di sektor peternakan menghadapi berbagai tantangan dan kendala, namun demikian terdapat banyak peluang yang perlu dimanfaatkan dalam pengembangan dan peningkatan produksi peternakan di oleh pemerintah :

1. Pemerintah telah melakukan pembangunan di sub sektor peternakan yang telah dilaksanakan selama ini baik pengadaan sarana dan prasarana maupun pengalaman dari masyarakat/ peternak dan juga penerapan teknologi dalam pembangunan usaha peternakan, merupakan modal dasar yang perlu diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya untuk menunjang kegiatan pembangunan dimasa mendatang .



2. Permintaan masyarakat yang terus meningkat karena masih rendahnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani asal ternak, kebutuhan bahan baku industri dan kecendrungan peningkatan pendapatan perkapita.
3. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang semakin tinggi merupakan peluang tersedianya tenaga kerja yang cukup berkualitas, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha peternakan yang mengarah kepada agribisnis yang dilaksanakan secara bertahap, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani ternak.

3.2.11. Sub Sektor Perikanan

3.2.11.1. Perikanan Budi Daya

Sejak pemisahan Kabupaten Pasaman menjadi dua Kabupaten, yaitu menjadi Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, maka sektor perikanan di daerah ini pun menjadi terbagi, antara lain Kabupaten Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan laut, didominasi oleh kegiatan Perikanan Laut.

Sedangkan Kabupaten Pasaman merupakan daerah daratan, sehingga kegiatan perikanan pun diarahkan kepada yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di daratan, yaitu kegiatan Perikanan Budidaya dan Perikanan Perairan Umum, karena memang daerah ini tidak mempunyai kawasan laut lagi.

Berdasarkan kondisi di atas, maka potensi daerah Kabupaten Pasaman adalah terutama Perikanan Budidaya (baik budidaya di kolam maupun keramba) dan penangkapan ikan di perairan umum.



Perikanan Budi daya di Kabupaten Pasaman adalah dalam bentuk pemeliharaan ikan di Kolam, Sungai (keramba), rawa, Danau dan Telaga. Ikan-ikan yang dibudi dayakan adalah dari jenis ikan mas rayo, nila, gurami, lele dan mujair. Dalam perikanan Budidaya ini pakan yang diberikan untuk makanan ikan terbagi dalam dua kelompok :

- 1.....Pakan ikan dalam bentuk batang padi, sisa dari makanan, daun - daun dan pupuk kandang.
- 2.....Pakan buatan yang berupa pakan buatan pabrik (pelet) yang didatangkan dari medan atau dibeli ke Bukittinggi dan lain-lain.

Pada tahun 2007 Luas areal yang dipergunakan dan produksi ikan perairan umum yang terdapat dikecamatan - kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman adalah luas lahan perikanan untuk kolam/tambak pembenihan yang terbesar terdapat pada kecamatan Rao Selatan seluas 356,4 Ha dengan pembesaran 580,8 Ha. Untuk karamba terdapat Pada Kecamatan Panti untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data SDB tabel 3.40. Jumlah petani pembudidayaan ikan yang terdapat di kabupaten Pasaman yang terbesar terdapat pada kecamatan Rao Selatan dengan jumlah petani pembudidaya ikan adalah 1662.(SDB tabel 3.41)

Untuk banyaknya produksi ikan budidaya menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman untuk sawah yang terbesar terdapat pada kecamatan Rao Selatan 4844,4 dan sawah 13,10 (SDB tabel 3.43)

populasi dan produksi ikan menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman baik melalui BBI, Perikanan Rakyat dan Perairan umum dimana luas yang tertinggi terdapat di Kecamatan Rao dengan jumlah 3,80 ha untuk BBI dengan produksi 135.000.000 ekor, dengan luas 3,80 Ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel SDB. 3.43

Kondisi diatas dapat dikembangkan antara lain faktor manusia, faktor teknis, faktor alam, faktor manusia memberikan pengaruh positif terhadap produktifitas usaha



perikanan faktor teknis jelas ikut mendampingi keseriusan dalam usaha perikanan, salah satu faktor teknis yang sudah membaik adalah perkembangan pasca peningkatan hasil perikanan dan faktor alami juga memberikan efek positif terhadap kondisi air yang diperlukan.

3.2.11.2 Perikanan di Perairan Umum

Perikanan di perairan umum di Kabupaten Pasaman meliputi perairan Danau, Sungai, Rawa dan Telaga di Kabupaten Pasaman berjumlah 830,4. (SDB 3.44). Luas areal budidaya ikan perairan umum terbesar terdapat di kecamatan Lubuk Sikaping dan Mapat Tunggul (Sungai). (SDB tabel 3.39).

Untuk data alat tangkap ikan di perairan umum yang terdapat Kecamatan di Kabupaten Pasaman seperti jaring insang dan jala, jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan jumlah 135 unit, Anco berjumlah 40 unit terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping, Serok / tangguk jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan jumlah 135 unit, tikalak juga terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan jumlah 20 unit, Kecamatan yang banyak menggunakan bubu terdapat di Kecamatan Rao Selatan dengan jumlah 103 unit, dan menggunakan alat pancing jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan jumlah 137 unit. (Data sumber Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2007). untuk lebih jelas lihat kumpulan data 3.42.

Untuk data banyaknya pupuk dan pestisida yang digunakan di kolam dan tambak setelah dikompimasikan dengan Dinas Perikanan dan Peternakan tidak ada data. (SDB. 39, dan 3.10) data nihil.

1. Kondisi Lingkungan



Kondisi Lingkungan dari sudut pandang masing – masing instansi pada saat ini :
Terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan terjadinya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau yang sangat mengganggu usaha perikanan, terjadi pencemaran sungai oleh sampah rumah tangga, pengelolaan dan pengembangan usaha budidaya perikanan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan, kegiatan penangkapan ikan diperairan umum dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan seperti menggunakan setrum dan racun.

2. Tekanan dan Dampak

- Tekanan dan dampak terhadap lingkungan baik alam, lingkungan buatan maupun lingkungan sosial yang bertentangan dengan prinsip konservasi dan pembangunan
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan perairan secara optimal
 - Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan usaha perikanan berwawasan lingkungan.
 - Tidak terlaksananya penegakan aturan dengan baik.

3. Respon Pemerintah dan Masyarakat

(Agar diamati langkah – langkah penanggulangan baik oleh Pemerintah maupun Masyarakat, keberhasilan dan kegagalan yang dialami, upaya penataan dan penegakan hukum, serta tantangan, kendala dan hambatan dalam upaya melakukan restorasi atau pemulihan lingkungan)

- Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan usaha perikanan yang berwawasan lingkungan.
- Pembinaan masyarakat melalui pelatihan / percontohan usaha pembenihan dan budi daya perikanan.
- Terbentuknya kelompok masyarakat perikanan seperti kelompok lubuk larangan, unit pembenihan rakyat, kelompok pembesaran ikan dan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan.



Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Baru

Pembagian / pemekaran Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat yang berdasarkan UU No. 38 tahun 2003 telah menimbulkan masalah bagi Kabupaten Pasaman dimana pembagian dari Pemetaan kawasan seperti kawasan hutan lindung sekitar 80 % berada di kawasan Kabupaten Pasaman, masalah tersebut sangat merugikan Kabupaten Pasaman itu sendiri dimana hanya 20 % yang akan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Untuk itu perlu ditata ulang kembali pemetaan dari kawasan hutan lindung tersebut. Untuk pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Pasaman diprioritaskan sesuai dengan geografi dan topografi, terlihat bahwa prospek utama pengembangan adalah terhadap SDA terutama potensi Bahan Galian Tambang yang bernilai ekonomis dan berpengaruh terhadap pengembangan wilayah. Sampai saat ini pengembangan dan pembangunan wilayah baru yang berada di Kabupaten Pasaman terkendala dimana untuk meningkatkan PAD (Pendapatan asli Daerah) belum maksimal untuk Kabupaten Pasaman dikarenakan terhambat oleh kawasan lindung. Dilihat dari potensi yang ada di Kabupaten Pasaman seperti halnya bidang pertambangan misalnya penambangan emas, batu bara, Bijih Besi, marmer, timah hitam dan lain – lain.

Pembangunan kawasan baru baik sebagai invasi pemukiman baru atau perkantoran perlu dicermati secara hati – hati dan terukur untuk pembangunan dan pengembangan wilayah perlu adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan mampu meminimalisasikan dampak ekologis dan sosiologis yang biasanya bermuara dengan munculnya Bencana Alam dan Bencana Sosial.

Masalah Investasi dan Tanah Ulayat

Di era otonomi dan era reformasi ini Kabupaten Pasaman semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jalan meningkatkan investasi. Seperti halnya mendatangkan investor – investor baik untuk bidang pertambangan, industri besar dan menengah dan perikanan dengan adanya investor sering menimbulkan atau berhadapan dengan konflik penguasa tanah. Tertama tanah ulayat, pemilik tanah yang bersifat ulayat ini atau dimiliki secara bersama oleh



anggota ka um dianggap sebagai penghambat dalam penyelesaian pembebasan tanah yang dibutuhkan untuk industri baik bidang perkebunan maupun pertambangan dan ditambah lagi Kabupaten Pasaman yang lebih besar berada di kawasan lindung.



3.3. Sumber Daya Manusia

3.3.1. Kependudukan

Kependudukan merupakan bagian dari aspek pembangunan, dimana peranan kependudukan diharapkan dapat mendorong proses percepatan dari pembangunan itu sendiri dan bukan menjadi beban atau faktor penghambat dari kelancaran pelaksanaan pembangunan. Pengendalian penduduk dirasa perlu dilakukan terutama dalam rangka mewujudkan kualitas penduduk Kabupaten Pasaman yang berkualitas dan menjadi keluarga yang sejahtera. Komponen yang membentuk kualitas kependudukan adalah besarnya angka kelahiran, komposisi penduduk dan migrasi penduduk.

Dari temuan data yang ada, jumlah penduduk tahun 2004 berjumlah 243.451 Jiwa sedangkan pada tahun 2006 berjumlah 265.060 jiwa. Ini berarti laju pertumbuhan penduduk kabupaten Pasaman masih tergolong tinggi, yakni mencapai 0,9 % setiap tahunnya (Tabel SDM 3.1 kumpulan data). Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk Tahun 2004 sebesar berjumlah 243.451 jiwa yang terdiri dari 120.450 orang laki – laki dan 123.001 orang perempuan, Sementara pada Tahun 2006 jumlah laki-laki 126.911 dan perempuan 129.149 untuk data tahun 2007 belum dapat data yang kongkrit. (SDM tabel 3.2).

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi per seribu kelahiran, dimana pada Tahun 2007 (keadaan Juli) tingkat kematian bayi 5,07 per mil. Dengan arti kata bahwa setiap 1000 bayi yang dilahirkan terdapat sekitar 3.941 jiwa yang lahir hidup pada 12 kecamatan dan sekitar 48 Jiwa bayi lahir mati (Tabel SDM 3.3).



Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman yang terendah terdapat pada Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dengan jumlah 0,35 (Tabel SDM. 3.4). Bervariasinya laju pertumbuhan penduduk dapat dijelaskan oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Tingginya angka kelahiran hidup
- 2) Pertumbuhan penduduk pendatang / migrasi

Sedangkan rendahnya laju pertumbuhan penduduk disebabkan karena adanya migrasi keluar dari Kecamatan untuk menuju kedaerah lain apakah itu karena alasan untuk mengikuti pendidikan maupun karena alasan mencari lapangan pekerjaan.

Berdasarkan struktur kelompok umur, ternyata penduduk pada kelompok umur 0 – 4 Tahun, 5 – 9 Tahun, dan 10 – 14 Tahun jumlah penduduk laki – laki jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sisanya jumlah perempuan yang lebih dominan. Pada pengelompokan penduduk berdasarkan struktur penggolongan umur berbentuk pyramid yang mengerucut keatas dari kelompok usia muda ke kelompok usia yang paling tua. Lompatan jumlah penduduk yang mencolok adalah terjadi pada usia kelompok umur 15 – 19 Tahun ke kelompok umur 20 – 24 Tahun yang mencapai 1.32% (Tabel SDM 3.2)

Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya peralihan aktifitas mereka yang semula berpendidikan SLTA dan hendak melanjutkan studi kependidikan yang lebih tinggi keluar Kabupaten, atau hendaknya mencari pekerjaan kedaerah lainnya diluar propinsi. Dilihat dari kepadatan penduduk, rata – rata kepadatan penduduk didaerah kota sangat tinggi bila dibandingkan daerah pingiran atau perkampungan,



artinya keberadaan penduduk di daerah Kabupaten sangat berpengaruh terhadap kepadatan penduduk tersebut.

Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasaman dari tahun ke tahun seperti tahun 2006 mengalami peningkatan yang signifikan yang terdapat di 12 Kecamatan yaitu dengan luas daerah 3.947,63 dengan jumlah penduduk 256.060 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada kumpulan data Tabel SDM 3.5. Dengan demikian penyebaran penduduk masih terpusat pada Kecamatan Lubuk Sikaping sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman dan Kec. Panti dan kecamatan Duo Koto sebagai pusat atau sentra dari pengembangan perekonomian di Kabupaten Pasaman.

Pedoman yang dijadikan patokan dalam pengukuran tingkat kesejahteraan adalah sebagai berikut :

1. Kondisi miskin digambarkan dengan kriteria tidak terpenuhinya indikator keluarga sejahtera I, atau keadaan ini disebut dengan pra sejahtera
2. Keluarga Sejahtera I (KS I), dengan indikator
 - a. anggota keluarga melaksanakan ibadah agama
 - b. pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
 - c. anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/ sekolah dan bepergian
 - d. bagian lantai yang terluas bukan dari tanah
 - e. anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan
3. Keluarga Sejahtera II (KS II), dengan indikator :
 - a. anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur
 - b. paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ ikan/ telur



- c. setahun terakhir anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
 - d. Luas lantai rumah paling kurang 8 M² untuk tiap penghuni
 - e. Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas/ fungsi masing-masing
 - f. Ada anggota keluarga umur 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap
 - g. Anggota keluarga umur 10 – 60 tahun bisa baca tulisan latin
 - h. Anak umur 7 – 15 tahun bersekolah
 - i. Pasangan usia subur dengan anak hidup dua atau lebih saat ini memakai kontrasepsi
4. Keluarga Sejahtera III (KS III), dengan indikator :
- a. keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
 - b. sebagian penghasilan keluarga ditabung
 - c. kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari dan dimanfaatkan untuk berkomunikasi
 - d. keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
 - e. keluarga berekreasi di luar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan
 - f. keluarga memperoleh berita dari surat kabar / radio / televisi / majalah
 - g. anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi setempat
5. Keluarga Sejahtera II Plus (III +), dengan indikator :
- a. keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial



- b. ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau institusi masyarakat.

Berdasarkan pedoman sebagaimana tersebut diatas, kondisi kependudukan di kabupaten Pasaman ditinjau dari indikator tingkat kesejahteraan terdapat keluarga yang berada dalam kelompok keluarga yang berada dalam kelompok pra sejahtera / kategori keluarga miskin 3.007 keluarga, dalam kondisi sejahtera I, berjumlah 18.680 keluarga, kelompok keluarga sejahtera Tahap II sebanyak 19.311 keluarga, Kelompok dan keluarga sejahtera Tahap III sebanyak 10.789 keluarga untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel SDM 3.6.

Dari data tersebut menunjukkan angka bahwa keluarga sejahtera I dan Keluarga sejahtera II memperlihatkan angka yang cukup tinggi dan juga kelompok pra sejahtera dan perlu penanganan yang lebih serius lagi dari pemerintah terutama kebijakan yang mendorong kearah perbaikan peningkatan kesejahteraan melalui berbagai program pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan.

a. Kondisi Lingkungan

Dari uraian permasalahan kependudukan di Kabupaten Pasaman, kemiskinan menjadi faktor utama terhadap penurunan kualitas lingkungan. Kenyataan menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat miskin untuk pengelolaan lingkungan sangat rendah sekali, hal ini terlihat pada pola hidup dan kondisi serta sarana dan prasarana yang ada dilingkungan perumahan yang terbatas seperti tidak adanya sarana MCK dan saluran pembuangan air limbah.



b. Tekanan dan dampak

Apabila dilihat dari jumlah penduduk, komposisi penduduk dan sekaligus tingginya tingkat pertumbuhan penduduk serta penyebaran penduduk yang tidak merata, masih menjadi faktor tekanan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Dari tekanan sebagaimana tersebut diatas, membawa dampak terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Pasaman, hal ini terlihat antara lain padatnya pemukiman penduduk pada beberapa wilayah yang juga ditandai dengan tingginya volume sampah dan pembuangan air limbah masyarakat yang mengalir pada beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan drainase – drainase dilokasi pemukiman masyarakat.

c. Respon Pemerintah dan Masyarakat

Sebagai tindak lanjut dari upaya pemecahan permasalahan kependudukan yang membawa tekanan dan dampak terhadap kualitas lingkungan adalah sebagai berikut :

1) Penurunan angka kelahiran

Target dari Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam penurunan angka kelahiran untuk 5 Tahun yang akan datang adalah penurunan angka kelahiran dari angka 3,7 % menjadi 3,3 %

2) Pelayanan khusus daerah miskin dan padat penduduk

Pelayanan khusus daerah miskin dapat diupayakan melalui pemetaan daerah yang menjadi sasaran program dengan kriteria dimana pencapaian rendah dan PUS baru juga rendah.

3.3.2 Kesehatan



Kajian aspek kesehatan bila dikaitkan dengan Status Lingkungan Hidup Daerah dapat dilihat dari berbagai indikator utama yang diperkirakan akan berpeluang menjadi tekanan dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan dibidang kesehatan. Indikator utama tersebut adalah keadaan angka kelahiran hidup bayi, persoalan status gizi balita, keadaan kesehatan dan persoalan pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari upaya peningkatan sarana dan prasarana dibidang kesehatan. Saat ini 9 jumlah sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan di Kabupaten Pasaman bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani dapat dilihat dari tabel SDM 3.7 kumpulan data. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan jauh dari sasaran atau target yang diharapkan, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dirasa masih rendah. Hal ini terlihat pada sebagian penduduk yang cenderung memanfaatkan fasilitas kesehatan didaerah lain seperti di Bukit Tinggi dan Padang .

Angka kematian bayi pada Tahun sekarang ini mencapai 20 per 1000 kelahiran, angka tersebut sudah jauh lebih rendah dari kondisi tahun 2006, namun masih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil kajian menunjukan bahwa relatif tingginya angka kematian bayi disebabkan karena beberapa faktor utama. Pertama adalah masih tingginya angka kelahiran yang dibantu oleh tenaga yang tidak terlatih, kedua adalah jarak kelahiran yang relatif pendek, sumbangan jenis penyakit utama seperti ISPA, kurang gizi, diare, dan jenis penyakit lainnya seperti tetanus. Penyakit yang dominan yang banyak diderita oleh pasien dapat dilihat pada Tabel SDM 3.8 kumpulan data. Selain itu



juga terdapat penderita penyakit seperti kulit, diare dan ISPA dimana jumlah penderita terbesar untuk kulit terdapat pada kecamatan Bonjol, Diaren Pegangan Baru (Padang Gelugur) dan ISPA Bonjol. (SDM tabel. 3.12)

Disamping itu juga disebabkan karena faktor latar belakang sosial ekonomi rumah tangga serta perilaku lingkungan yang tidak mendukung diantaranya adalah masih banyak rumah tangga yang tidak mempunyai Septic Tank yang akan menyebabkan penyakit kulit data dapat dilihat pada kumpulan data SDB 3.8. selain itu adalah pendidikan orang tua yang rendah, keluarga miskin dan memiliki proses sanitasi yang kurang mendukung. Artinya akar dari persoalan kematian bayi di Pasaman tidak saja disebabkan karena faktor infeksi, namun faktor-faktor yang dapat dikendalikan sebelum terjadinya infeksi.

Kebijakan daerah dalam rangka menanggulangi penyebab kemiskinan lebih diarahkan pada faktor tingkah laku yang mendorong berkurangnya peranan faktor penyebab kematian dan kesakitan, pemanfaatan akses pelayanan kesehatan serta peningkatan sanitasi dan jumlah masukan komposisi makanan.

Selain dari pada itu penanggulanagn angka kematian bayi dapat juga dilakukan melalui perbaikan tingkah laku reproduksi Pasangan Usia Subur (PUS) dimana sasaran utama adalah dengan mengatur jarak kelahiran, menunda usia perkawinan, meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, dan intervensi gizi, serta mengurangi jumlah kelahiran, sehingga efek dari keberadaan jumlah anak dapat dikunrangi bersama – sama dengan faktor lingkungan, tingkah laku dan program pelayanan kesehatan.

Pemanfaatan fasilitas layanan kesehatan dapat dijadikan tolok ukur lain bagaimana dampak pelayanan kesehatan sendiri. Pada saat keadaan pemanfaatan layanan



kesehatan semakin tinggi, maka semakin baik dampaknya terhadap status dan derajat kesehatan masyarakat.

Pada tabel SDM 3.9 kumpulan data, dapat dilihat data tentang sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar dimasing-masing Kecamatan dalam Kabupaten Pasaman. Dari data tersebut terlihat bahwa ditingkat Kecamatan telah memiliki Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat, hanya 3 Kecamatan lagi yang belum memiliki Puskesmas yaitu Kecamatan Simpang Alahan Mati, Rao Utara dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Akan tetapi di Kecamatan tersebut telah memiliki Puskesmas Pembantu sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Data perkembangan banyaknya sarana kesehatan di Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada tabel SDM 3.13.

Pada Tabel SDM 3.10, dapat dilihat tenaga kesehatan yang tersebar dimasing-masing Kecamatan dalam Kabupaten Pasaman. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa tidak merata tingkatnya penyebaran tenaga kesehatan dimasing-masing kecamatan dalam Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan kualifikasi tenaga kesehatan yang tersebar pada berbagai rumah sakit, puskesmas dan tempat praktek dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani (tabel SDM 3.11) Namun demikian masih terlihat kecenderungan bahwa sebagian penduduk memanfaatkan fasilitas kesehatan di daerah lain seperti Bukittinggi dan Padang.

Pada sisi lain tingkat kematian bayi dibandingkan kelahiran hidup bayi di Kabupaten Pasaman sebesar 3.941 per-mil, artinya tiap 1000 bayi yang dilahirkan terdapat 20 bayi lahir mati.

a. Kondisi lingkungan



Adanya kegiatan Penebangan Hutan yang dilakukan masyarakat secara liar merupakan suatu masalah yang ditemui di wilayah kecamatan Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Rao Utara, Duo Koto, Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul Selatan. Penebangan hutan ini akan berdampak terhadap kuantitas cadangan air dan sekaligus akan menyebabkan tingginya resiko tanah longsor.

Di Kecamatan Tigo Nagari pemakaian pestisida belum dikontrol dengan baik. Ditemui di lapangan masih adanya penjualan pestisida yang belum dipisahkan dengan bahan makanan pokok.

Pengelolaan limbah pasar yang tidak optimal dapat menimbulkan penyakit berbasis lingkungan seperti KLB diare, penyakit kulit, malaria. Sampai dengan saat ini limbah pasar di kecamatan Tigo Nagari, Panti, Rao, Duo Koto dan Padang Gelugur belum dikelola dengan baik. Di Kecamatan Duo Koto, aliran Batang Pasaman justru juga dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. Untuk ketersediaan sumber air bersih masih ditemui di Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Rao Utara.

Wilayah Kecamatan Bonjol merupakan Kawasan yang sejak lama telah dikembangkan pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ini masih dikelola secara tradisional, dimana belum memperhatikan pengolahan limbahnya, dikhawatirkan adanya mercury yang dibuang ke sungai dan masyarakat sekitar akan terakumulasi mercury tentunya akan sangat beresiko untuk kesehatannya. Longsor terutama



dapat terjadi di Kecamatan Bonjol (pengaruh sesar dan aktivitas penambangan emas) dan Panti.

Limbah rumah tangga hampir menjadi masalah utama yang perlu dipertimbangkan dan mengingat dampak yang dapat ditimbulkannya. Kondisi ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan arti kebersihan lingkungan bagi kesehatan dan bagi keselamatan lingkungan dari kerusakan dan pencemaran.

Wilayah Kecamatan Panti merupakan wilayah yang memiliki penduduk yang padat, ditemui banyaknya saluran pembuangan limbah rumah tangga yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Ditemui juga pada sepanjang irigasi yang berada pada areal permukiman masyarakat, sampah dibuang ke irigasi tersebut dan ini berdampak terhadap tidak berfungsinya saluran irigasi sebagaimana mestinya dan sekaligus terciptanya kawasan Slum Area. Disamping itu banyaknya Industri Rumah tangga di kecamatan Panti yang masih belum dibina dan limbahnya belum ditangani secara baik. Disamping itu pengelolaan limbah pasar belum dilaksanakan dengan optimal. Kecamatan Padang Gelugur adalah kecamatan yang paling kecil wilayah kerjanya tapi memiliki penduduk yang padat, mengingat hal ini Limbah rumah tangga dan SPAL merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindarkan. Kecamatan Rao dan Rao selatan merupakan daerah yang sumber mata pencarian penduduknya banyak yang berkolam ikan, sementara itu dalam pengembangan kolam ikan tersebut masyarakat menggunakan Pakan Ikan yang mengandung unsur Kimia, ini merupakan masalah yang perlu diteliti lebih lanjut, dan sumber air bersih di daerah ini sangat minim sekali, sehingga aliran sungai Sumpu digunakan untuk aktifitas MCK. Permasalahan SPAL dan limbah rumah tangga juga menjadi permasalahan yang rumit di daerah Kecamatan Rao Selatan.

B. Tekanan dan Dampak



Penyebab tekanan dan dampak terhadap Lingkungan baik alam, lingkungan buatan ataupun lingkungan sosial yang bertentangan dengan prinsip konservasi dan pembangunan adalah :

1. *Rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang manfaat Hutan sehingga masih banyak terjadi Penebangan Hutan secara Liar*
2. *Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan Aliran sungai sebagai tempat aktifitas MCK yang beresiko terhadap kesehatan*
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya membuang sampah dan limbah rumah tangga ke Irigasi Panti Rao sehingga menciptakan Slum Area disekitarnya.
4. Masih minimnya pembinaan yang dilakukan instansi terkait terhadap pemanfaatan fasilitas MCK dan sumber air bersih serta SPAL yang memenuhi sayarat kesehatan.
5. *Masih minimnya tempat pembuangan Sampah sementara sehingga masyarakat belum membudayakan membuang sampah pada tempatnya.*

C. Respon Pemerintah dan Masyarakat.

Agar diambil langkah – langkah penanggulangan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, terutama yang menyangkut penebangan hutan secara liar, dampak mercury terhadap kesehatan di Bonjol agar dilakukan penelitian lebih lanjut, dan penambahan fasilitas MCK dan Sumber Air bersih. Upaya penataan dan penegakan hukum masih belum terlaksana dengan baik, serta banyaknya tantangan, kendala dan hambatan dalam upaya melakukan restorasi atau pemulihan lingkungan.

3.3.3. Pendidikan



a. Kondisi Lingkungan

Tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan penduduk merupakan salah satu modal dalam berbagai aktivitas pembangunan pada suatu wilayah. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Pasaman pada umumnya paling utama adalah tingkat sekolah dasar, murid laki-laki berjumlah 20.497 dan perempuan berjumlah 18.514 dengan total 39.011 orang murid. Sedangkan siswa SLTP dan SMU berturut-turut adalah 13.171 dan 7.798 orang murid (Tabel SDM 3.14.0 jumlah personil menurut tingkat pendidikan untuk pnegelolaan Dinas Lingkungan dapat dilihat pada tabel SDM 3.19.

b. Tekanan dan Dampak

Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk (jumlah yang tidak tamat SD / putus sekolah) dapat berdampak terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan khususnya pada masyarakat di pinggiran hutan. Kasus membuang sampah ke sungai adalah cerminan dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungan.

c. Respon pemerintah dan masyarakat

Dalam meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan telah diprogramkan untuk membangun unit – unit sekolah dari tingkat dasar sampai sekolah dari tahun sebelumnya telah dibangun beberapa sekolan diantaranya



SLTA. Yang terdapat pada kecamatan Duo Koto dan Lubuk Sikaping. Penambahan jumlah unit sekolah ini juga diiringi dengan direkrutnya tenaga pengajar baru baik PNS maupun guru bantu. Dengan program ini diharapkan layanan pendidikan dapat menjangkau penduduk yang berada di daerah – daerah terpencil. Dan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan terutama ke sekolah lanjutan atas tidak perlu ke daerah lain di luar kabupaten seperti Bukittinggi dan Padang.

3.3.4. Ketenagakerjaan

Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, kualitas penduduk Kabupaten Pasaman dibedakan atas kategori angkatan kerja yang mencapai 53 % laki-laki dan bukan angkatan kerja 38,97 % perempuan. Penduduk yang termasuk angkatan kerja, diantaranya 112.450 merupakan penduduk yang bekerja dan 5.227 penduduk yang sedang mencari pekerjaan.

Bagi penduduk yang tergolong dalam bukan angkatan kerja sebesar 76.576 dan diantaranya 41.906 berstatus sedang sekolah, 26.064 beraktivitas mengurus rumah tangga dan 8.606 sisanya beraktifitas pada sektor lainnya. (Tabel SDM 3.16)

Ditinjau dari lapangan usaha yang diisi oleh tenaga kerja yang bekerja dijumpai sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan sebagai sektor lapangan usaha yang menonjol yakni sebesar 77,03. Disamping itu terdapat dua sektor lapangan usaha yang perlu menjadi perhatian untuk didorong dalam perkembangannya, yakni sektor perdagangan, rumah makan dan hotel (7,61) dan sektor jasa-jasa lembaga keuangan (6,22) (Tabel SDM 3.17). Menonjolnya



keberadaan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Demikian pula tenaga kerja di sektor perdagangan dan sektor-sektor jasa lembaga keuangan memberikan dukungan bagi lapangan usaha sektor pertanian. Sedangkan tenaga kerja di sektor industri seiring masih belum optimalnya potensi industri yang ada di Kabupaten Pasaman.

Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pasaman ke depan, sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan dan sektor usaha perdagangan dan jasa lembaga keuangan berikut dengan potensi tenaganya mutlak menjadi fokus perhatian yang serius bagi pemerintah, disamping mendorong adanya upaya mendapatkan lapangan usaha sampingan termasuk "*home industry*" bagi penduduk yang bukan angkatan kerja.

a. Kondisi lingkungan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih cukup tinggi, artinya beban yang ditanggung oleh penduduk yang bekerja cukup besar. Dengan kata lain angka pengangguran masih cukup tinggi. Sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan terbesar penduduk.

b. Tekanan dan Dampak



Tingginya angka pengangguran berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomipenduduk dan tindak kriminal yang meningkat.Eksploitasi dan eksplorasi pada sektor pertanian yang juga mencakup kebutuhan semakin besar. Tekanan terhadap pemanfaatan hutan secara tidak terencana akan berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan.

C. Respon Pemerintah dan Masyarakat

Masyarakat secara mandiri berusaha membuka lapangan kerja baru, sedangkan pemerintah harus memfasilitasi dan membangun kondisi industri yang sehat.

Sumber daya manusia yang tersedia dalam memberikan layanan kesehatan di tingkat Kabupaten telah memadai tapi di tingkat Kecamatan masih belum memadai dimana sebagian besar desa – desa yang ada di Kabupaten Pasaman belum memiliki Bidan yang PNS, dimana dari 195 Jorong / Desa yang ada Cuma dilayani oleh Bidan Desa PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 63 orang sedangkan sisanya belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Pada tingkat Puskesmas pelayanannya masih dikelola secara asal – asalan karena payung hukum yang belum jelas, serta manajemen Puskesmas masih dikelola oleh seorang dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) hal ini berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas yang jelek dan kurangnya tanggung jawab terhadap upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan



penunjang yang harus dilaksanakan di Puskesmas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Jumlah tenaga Dokter yang ada di Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman secara rasio telah cukup jumlahnya tetapi karena fungsinya tidak sebagai fungsional medis (Menjadi Pimpinan Puskesmas) maka kegiatan pelayanan medis di kecamatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Dokter malah dilaksanakan oleh perawat (paramedis) dan petugas administrasi kesehatan lainnya.



BAB IV

REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1. Kebijakan Upaya Perbaikan Lingkungan

Kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Pasaman dalam mengendalikan berbagai perubahan lingkungan selama tahun 2007, secara umum telah memberikan hasil yang cukup berarti dalam mengendalikan perubahan kualitas lingkungan, agar tidak menuju ke arah yang tidak diinginkan. Namun usaha yang telah ada masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama dalam menerapkan berbagai peraturan perundang lingkungan hidup secara nyata terhadap setiap orang yang telah melakukan perubahan lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, disamping itu tindak lanjut kedepan/diupayakan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, juga melihat kecendrungan semakin meningkatnya permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran, kerusakan maupun pelanggaran hukum lingkungan, pemerintah perlu melakukan upaya perbaikan dengan memperhatikan dan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif antara sektor baik pusat dan propinsi.
2. Memperhatikan kecinya anggaran untuk lingkungan perlu adanya "*Political Will*" dan perhatian semua pihak untuk meningkatkan anggaran pengelolaan lingkungan hidup secara signifikan.
3. Melibatkan masyarakat dalam pengkajian pengelolaan sumber daya dan pemulihan ekosistem, sehingga pembangunan dan pemanfaatan berbasis masyarakat dan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang ada.



4. Pengelolaan keanekaragaman hayati agar dilaksanakan secara berkelanjutan supaya pemanfaatan dapat meningkatkan income generating mesyarakat.
5. Melakukan reformasi kebijakan tentang pengelolaan sampah untuk mendorong perubahan cara pandang masyarakat dari anggapan sampah sebagai limbah atau bahan tidak berguna lagi menjadi sampah sebagai sumber daya, dan selanjutnya dengan kebijakan tersebut disusun rancangan undang-undang pengelolaan persampahan.
6. Penataan kebijakan pengelolaan bahan dan limbah B3 serta pelaksanaan secara sinergi dan konsisten oleh semua pihak melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan, training perngelolaan limbah B3 dengan cara 3R (*recycle, reuse, dan recovery*)
7. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh semua unsur terkait, termasuk masyarakat dan LSM untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efektivitasnya dalam memulihkan kerusakan hutan dan lahan.
8. Mensinergikan kepedulian lingkungan dalam meningkatkan kembali peran posyandu, PKK, program-program kerja bakti dan mengembangkan kearifan yang terkait dengan kesehatan dan lingkungan yang berkembang di masyarakat untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat dan melestarikan lingkungan.

Berdasarkan atas pembahasan terhadap kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, analisis isu pokok lingkungan serta evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan tekanan, status dan upaya penanggulangan yang dilakukan, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

4.2. Sumberdaya Alam



4.2.1. Hutan

- a. Perlunya dijaga hutan kabut dengan baik karena memiliki topografi berlereng curam. Perlu diperhatikan bahwa hutan tidak meniadakan bahaya banjir tapi hanya mengurani saja bahaya itu.
- b. Kegiatan tersebut di atas lebih berarti bila ada perda yang mencegah kerusakan sumber daya alam
- c. Kegiatan lain untuk mejaga supaya kerusakan hutan tidak terjadi antara lain:
 1. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hasil hutan terhadap illegal logging, pencurian kayu dan peladang berpindah. Dimana akan memberikan tekanan terhadap hutan yang dimanfaatkan tersebut, karena sudah beralih fungsi.
 2. Untuk pengusaha yang akan memanfaatkan hutan seperti HPH atau HPHTI maka pihak pemerintah harus lebih tegas dengan pemberian izin-izinya dan harus dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan
 3. Izin mendirikan pengolahan kayu seperti saw-mill harus dibatasi jumlah dan lokasinya, jangan berada pada daerah Kawasan Lindung atau Taman Nasional.

Realisasi terhadap penanggulangan kerusakan dan kebakaran hutan memerlukan pendekatan terpadu dari aparat terkait, untuk itu maka beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dijadikan pertimbangan adalah:

- a. Perlunya dibentuk tim yang terdiri dari pemda, masyarakat dan kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan sumber daya alam.



- b. Kegiatan tersebut di atas akan lebih berarti bila ada Perda yang mencegah kerusakan sumber daya alam

4.2.2 Pemulihan Lahan Kritis

Upaya pemulihan dan perbaikan lahan kritis tidak saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga mengedepankan peran dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah Kabupaten Pasaman terutama dalam mengedepankan kebijakan dan pelaksanaan program rehabilitasi lahan kritis diantaranya adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap upaya perubahan fungsi lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan
2. Penggunaan metode yang tepat dalam melakukan rehabilitasi dan pemanfaatan lahan kritis untuk dapat dipergunakan sebagai areal pertanian dan perkebunan yang produktif.
3. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak terkait dalam pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan peruntukan terutama lahan untuk konversi.
4. Perlu alternatif dalam pembangunan pemukiman penduduk, agar tidak memanfaatkan lahan produktif maupun lahan hutan.
5. Menetapkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah (perda) tentang pelestarian tanah dan larangan pemanfaatan lahan produktif untuk keperluan lain.
6. Melakukan revegetasi dan reboisasi areal atau kawasan yang memiliki penutupan tajuk vegetasi jarang.
7. Perlindungan dan penekatan kawasan lindung, terutama penekatan tapal batas kawasan lindung.



8. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya pelestarian sumberdaya lahan dan hutan.
9. Pemantapan ruang lahan untuk budidaya pertanian dan perkebunan pada *catchment area* terutama menyangkut luas berdasarkan faktor daya dukung lingkungan setempat.
10. Pengawasan dari pemerintah dan dinas-dinas terkait serta penegakan hukum yang tegas bagi pelaku *illegal logging*.
11. Melakukan rehabilitasi lahan yang telah rusak melalui program reboisasi dan penghijauan.
12. Melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi lahan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

4.2.3. Pengendalian Pencemaran Air dan Sungai

Pencemaran pada air sungai merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi, industri dan pertambahan penduduk. Dari berbagai bentuk aktivitas seperti pasar, bengkel (workshop), rumah sakit, penginapan, dan pertambangan bahan galian golongan C yang menghasilkan limbah baik langsung maupun tidak langsung masuk kesungai ataupun darinase kota. Menghadapi hal tersebut beberapa kebijakan yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah beserta masyarakat melakukan peningkatkan upaya pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran air.
2. Melakukan monitoring/pengawasan terhadap implementasi kepedulian pengelolaan lingkungan dari setiap kegiatan usaha baik, rumah sakit dan kegiatan lainnya.



3. melakukan monitoring /pengawasan dan peneguran terhadap usaha dalam hal pembuangan limbah domestik ke sungai/badan air.
4. Memberikan tindakan tegas terhadap masyarakat penambang sirtukil maupun emas pada palung sungai yang tidak memiliki izin.
5. Memperketat proses perizinan kepada setiap usaha/kegiatan yang diperkirakan akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan.
6. Melakukan penegakan hukum lingkungan kepada siapapun yang melanggar (melakukan pencemaran dan kerusakan) lingkungan.
7. Melakukan pembersihan dan rehabilitasi sungai yang telah mengalami pencemaran.
8. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah atau limbah kesungai.
9. Melibatkan masyarakat dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran baik bersal dari industri maupun domestik.

4.2.4. Pengelolaan Pencemaran Udara

Hal terbesar yang mempengaruhi kualitas udara adalah penggunaan bahan bakar untuk keperluan transportasi, industri rumah tangga (pembakaran ban bekas) maupun kegiatan domestik. Seiring dengan berkembangnya Kabupaten Pasaman tentu sejalan dengan ikut berkembangnya kawasan perekonomian, transportasi. Hal ini kan berdampak pada penurunan kualitas udara di Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu beberapa langkah antisipasi perlu dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut :



1. Melakukan dan memperketat izin kelaikan jalan kendaraan (meningkatkan pengawasan uji kendaran bermotor), dan melakukan regulasi jalur dan peremajaan kendaraan tua bila perlu.
2. Melakukan pengawasan/monitoring terhadap kondisi udara yang ada, memasang alat detektor kualitas udara dilokasi-lokasi tertentu seperti pasar, perusahaan pengolahan stone crusher dan AMP dan lain-lain.
3. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi tegas kepada pihak industri yang mencemari lingkungan.
4. Melakukan pengkajian ulang/evaluasi terhadap dokumen UKL/UPL dan AMDAL yang telah ada dengan memperhatikan kondisi rona lingkungan eksisting dan kemajuan teknologi pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatkan kegiatan penanaman pohon pelindung dan peneduh pada sebagian besar jalan kota, pembentukan jalur hijau dengan penataan yang baik pada semua jalan yang ada dalam wilayah kota dan jalan menuju luar Kabupaten Pasaman.
6. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan penghijauan kota.

4.2.5. Keaneekaragaman Hayati

1. Memperhatikan izin pembukaan perkebunan dan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung atau lahan yang bervegetasi.
2. Diperlukan kebijakan, penegakan hukum dan fungsi kelembagaan yang memadai pada daerah untuk permasalahan lingkungan hidup



Memperhatikan potensi keanekaragaman hayati, hasil analisis lingkungan dan kebijakan pembangunan Kabupaten Pasaman maka perlu disarankan :

- a. Perlindungan habitat satwa yang dilindungi dan terancam punah
- b. Peningkatan pelestarian plasma nutfah in-situ dan ex-situ
- c. Menanamkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dengan melakukan penyuluhan tentang konservasi dan pelestarian sumber daya hayati
- d. Melakukan usaha konservasi, reboisasi dan rehabilitasi serta pelestarian hutan yang merupakan habitat flora dan fauna serta melindungi sumber daya hayati yang langka dan bernilai potensial
- e. Melakukan pengawasan ketat dan menindak tegas bagi siapapun yang melakukan pengrusakan sumber daya hayati

4.2.6. Kegiatan Pertambangan, Energi dan Bahan Galian

1. Untuk penggunaan bakar (minyak, batu bara) harus sudah memperhatikan kualitasnya dengan arti kata ramah lingkungan
2. Memperhatikan pengeluaran izin pertambangan, agar sesuai dengan tata ruang dan kondisi lingkungan
3. Menertibkan penambangan tanpa izin (PETI) karena bahaya lingkungannya.

4.3. Sumberdaya Buatan

4.3.1. Pengelolaan Lingkungan Pemukiman



Konsentrasi pertumbuhan kawasan pemukiman di Kabupaten Pasaman tersebar pada daerah seperti Kawasan Daerah Aliran Sungai, catchment area, dan lain-lain. Dalam kondisi perkembangan dan pertumbuhan serta dinamika kegiatan sosial ekonomi yang berlangsung di Kabupaten Pasaman, serta penambahan jumlah penduduk kota akan mempengaruhi pegeseran penggunaan lahan. Pergeseran penggunaan lahan tersebut dapat dilihat dari tumbuh dan berkembangnya bangunan baru untuk menampung kegiatan-kegiatan pemukiman, perdagangan, jasa maupun industri. Dengan makin tingginya aktivitas tersebut akan sebanding pula dengan limbah yang akan dihasilkan seperti limbah padat berupa sampah padat (organik dan an organik) dan limbah cair serta hasil sampingan lainnya. Oleh karena itu, beberapa dampak antisipasi yang perlu dilakukan untuk mendapatkan lingkungan pemukiman yang layak dimas yang kan datang maka disarankan sebagai berikut :

1. Pengembangan pemukiman berskala besar merupakan pilihan kebijakan yang tepat karena mengoptimalkan fungsi lahan secara vertikal maupun horizontal termasuk fungsi uang dan barang serta pelayanan publik termasuk pengelolaan jaringan utilitas seperti air bersih, listrik, dan lain-lain.
2. Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu menetapkan pengelolaan sarana dan prasarana untuk komplek pemukiman secara jelas dan pengawasan pembangunan perumahan secara intensif.
3. Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu merangsang tumbuh dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan.



4. Menghindari pengembangan kawasan pada kawasan resapan air perlu dibatasi.
5. Menghindari pengembangan kawasan pemukiman di daerah longsor, banjir dan bencana lainnya. pemukiman yang berada pada daerah rawan longsor supaya dipindahkan ketempat yang aman.
6. Pemerintah perlu memprogramkan peningkatan dan perbaikan lingkungan yang kurang layak huni serta bantuan sebagai stimulasi bagi masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana lingkungan terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.
7. meningkatkan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah dalam jumlah yang cukup, baik jumlah TPS, mobil dan kualitasnya sehingga aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi lebih lancar diseluruh wilayah Kabupaten Pasaman.
8. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, sehingga masyarakat tidak lagi menbuang sampah kesembarang tempat.
9. Menerapkan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah/limbah rumah tangga dalam skala kecil di lingkungan pemukiman maupun skala besar di TPA sampah.
10. Melakukan patroli kebersihan pada tempat tempat strategis untuk pengontrolan sampah dan menindak tegas bagi siapapun yang melanggar peraturan tentang pembuangan sampah.

4.3.2 Fasilitas Umum



1. Melakukan penataan terhadap daerah objek wisata sebaik mungkin, dapat dilanjutkan dengan promosi
2. Objek wisata yang telah ada perlu dipelihara dan dilengkapi
3. Melakukan pembangunan terhadap masyarakat yaitu sadar wisata di sekitar objek wisata

4.3.3. Limbah

1. pengelolaan limbah cair pabrik atau kegiatan/ usaha lainnya sebelum dibuang ke lingkungan harus dilakukan pengelolaan sesuai dengan jenis kandungan limbahnya, dengan membuat instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
2. Limbah yang dibuang ke lingkungan harus memenuhi baku mutu limbah cair berdasarkan masing-masing kegiatan.
3. Agar pengelolaan limbah padat (sampah) dapat dilakukan harus tersedia tong sampah dan kontainer yang memadai dalam bentuk jumlah dan jenisnya
4. Distribusi fasilitas dan sarana persampahan yang merata dan sesuai kebutuhan

4.3.4. Industri dan Dunia Usaha

Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu mengendalikan dampak lingkungan melalui penegakan aturan pemanfaatan lingkungan dan pengawasan



pembangunan serta pembinaan kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Untuk mengendalikan dampak lingkungan dibutuhkan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah serta kerjasama antara pemerintah dengan lembaga lembaga masyarakat yang peduli lingkungan. Untuk menuju usaha dan industri yang ramah lingkungan dimasa akan datang, maka disarankan :

1. Pembuangan oli bekas dan minyak oleh bengkel, perusahaan dan industri yang beroperasi di bantaran sungai serta limbah rumah sakit harus mendapat perhatian yang serius.
2. Menegur usaha atau perusahaan yang belum mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan serta menutup usaha yang mencemari lingkungan.
3. Pemerintah Kabupaten Pasaman agar mempunyai SOP penyelesaian sengketa lingkungan dan penutupan usaha/kegiatan serta mensosialisasikan kepada pemilik usaha/kegiatan.
4. Mengkaitkan antara pengeluaran izin usaha dengan ketersediaan dokumen kelayakan lingkungan.
5. Tidak memberi izin bagi usaha/kegiatan yang melanggar tata ruang.
6. Pemerintah Kabupaten Pasaman agar melakukan pemantauan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan agar sesuai dengan dokumen yang dimilikinya.



4.3.5. Perikanan dan Peternakan

1. Memberikan bantuan usaha perikanan
2. Melakukan sosialisasi terhadap penangkapan ikan
3. Melakukan peningkatan produksi ternak dapat dilakukan dengan cara inseminasi buatan
4. Menyediakan fasilitas pemotongan hewan dalam bentuk RPH (Rumah Potong Hewan), TPH (Tempat Pemotongan Hewan) dan RPU (Rumah Potong nggas) yang memadai

4.3.6. Pembuangan Akhir Sampah

Kabupaten Pasaman memiliki banyak kebutuhan pelayanan terhadap pembuangan sampah. Pembuangan akhir sampah merupakan salah satu pelayanan yang dikelola pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam upaya terjaminnya kebersihan, ketertiban dan keindahan Kabupaten Pasaman. Dengan adanya lokasi pembuangan akhir sampah di nagari Balai Durian (Bukit Acek) merupakan upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam mengatasi sampah. Metode sanitary landfill yang dipilih juga sudah merupakan metode terbaik dan termodern saat ini di Indonesia. Namun keterbatasan dana yang juga mempengaruhi terbatasnya sarana dan prasarana telah menyebabkan Dinas LHKP Kabupaten Pasaman belum optimal dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Untuk pengelolaan pembuangan akhir sampah dimasa akan datang, maka disarankan :



1. Pengelolaan sampah sebaiknya dimulai dari sumber sampah, sehingga dapat dipisahkan sampah organik dan anorganik, sampah yang dapat didaur ulang serta kemungkinan adanya perubahan bentuk sampah.
2. Untuk memperpanjang umur teknis *sanitary landfill* perlu juga dukungan pemerintah kepada industri agar memproduksi kemasan yang dapat dipakai berulang disamping sosialisasi proses daur ulang sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha.
3. Pengelolaan sampah di masa yang akan datang harus didukung dengan teknologi pengelolaan sampah menjadi kompos untuk mendukung pengelolaan pertamanan kota serta pengembangan teknologi pengolahan bahan berupa kertas, plastik dan logam untuk kebutuhan industri rumah tangga.
4. Perlu adanya perhatian pemerintah Kabupaten Pasaman terhadap gangguan kesehatan yang disebabkan dekatnya lokasi penumpukan sampah dengan pemukiman penduduk.
5. Pengelolaan persampahan harus didukung dengan produk hukum daerah untuk meningkatkan kepedulian komunitas Kabupaten Pasaman terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk pemberian sanksi pelanggaran.

4.3.7. Perekonomian

Perkembangan Kabupaten Pasaman disegala bidang mengakibatkan semakin tinggi tingkat persaingan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan. Hal ini telah menyebabkan kesulitan ekonomi akibat terbatasnya lapangan usaha



bermodal kecil dengan keterampilan terbatas dan bersifat mandiri. Sehingga lapangan usaha/pekerja masyarakat menjadi beralih kelapangan usaha baru. Hal ini juga berdampak pada peningkatan permasalahan sosial di masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, untuk dapat mengambil langkah langkah yang dapat melindungi lingkungan sosial adalah dengan beberapa langkah antisipasi seperti rekomendasi dibawah ini :

1. Mengarahkan masyarakat untuk melakukan pengembangan sektor-sektor usaha kecil dan menengah yang tidak berdampak pada eksploitasi hutan secara berlebihan.
2. Melakukan penataan tempat-tempat usaha agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta ramah lingkungan.
3. Melakukan sosialisasi dan memperbanyak bentuk-bentuk pelatihan pengembangan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah.
4. Memberikan dana pengembangan usaha berupa kredit lunak tanpa agunan dan pemberian dana bergulir bagi pengusaha ekonomi lemah.

4.4. Sumber daya manusia

4.4.1. Kependudukan

1. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu tinggi seperti pada tahun 2004, dan yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas penduduk
2. Melakukan peningkatan sarana – prasarana pemukiman

4.4.2. Meningkatkan Kesehatan Lingkungan



Kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang amat menentukan kualitas sumber daya manusia. Derajat kesehatan masyarakat berubah dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan dan faktor genetik.

Lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kesehatan. Oleh karena itu semakin buruk kualitas lingkungan maka semakin rendah pula derajat kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya adat kebiasaan, status sosial, kepedulian sosial dan keberadaan organisasi kemasyarakatan amat mempengaruhi kualitas lingkungan.

Dari berbagai masalah lingkungan dan kaitannya dengan kesehatan maka usaha kesehatan lingkungan adalah mencakup semua bentuk kegiatan untuk mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan yaitu :

- a. Penyediaan air bersih, sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari
- b. Pengolahan dan pengendalian pencemaran air limbah
- c. Pengelolaan sampah, mulai dari sampah rumah tangga sampai ke tempat pembuangan akhir sampah
- d. Pengendalian vektor penyakit
- e. Pencegahan dan pengendalian pencemaran udara, air dan tanah
- f. Sanitasi makanan dan minuman, termasuk penggunaan bahan pengawet, zat warna dan sebagainya
- g. Pengendalian kebisingan dan radiasi
- h. Peningkatan keselamatan kerja
- i. Perumahan dan pemukiman
- j. Perencanaan daerah perkotaan, keselamatan dan ketersediaan alat transportasi
- k. Sanitasi tempat-tempat umum



Beberapa prinsip dasar pembangunan berwawasan lingkungan adalah:

- a. Mengurangi sumber pencemaran dengan menggunakan alat, bahan, dan zat-zat yang kurang bahayanya terhadap kesehatan
- b. Mengolah limbah sebelum dibuang ke alam bebas dengan menggunakan cara-cara yang aman
- c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya yang terlibat dalam memelihara lingkungan
- d. Prinsip-prinsip dasar penanggulangan penyakit perlu selalu dipegang dan diterapkan, yaitu promotif, preventif, early diagnosis prompt treatment dan rehabilitation.

Langkah – langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. *Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap Dampak Mercury bagi masyarakat disekitar penambangan emas di Bonjd*
2. *Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap efek Pakan Ikan bagi masyarakat*
3. *Perlu dilakukan pengelolaan terhadap Pasar yang ada di seluruh kab. Pasaman dengan baik dan benar*
4. *Perlu di tindak lanjuti Slum Area di Kecamatan Panti*
5. *Perlu pembinaan terhadap Industri Rumah tangga yang terdapat di wilayah Kab. Pasaman dalam hal pengelolaan limbahnya.*
6. *Perlu pengaman terhadap fungsi aliran Sungai Batang Pasaman dan Batang Sumpur*



4.4.3. Peningkatan Fasilitas Kesehatan

Sehubungan dengan permasalahan perekonomian, masih terdapatnya kondisi pemukiman yang tidak layak huni serta kurangnya kondisi kesehatan lingkungan, hal ini mengakibatkan banyaknya sumber penyakit. Disamping itu masih terbelitnya masyarakat dalam kondisi kemiskinan ini, menjadikan belum mampunya masyarakat untuk berobat ke RSUD atau Swasta apalagi sarana kesehatan yang ada jauh dari pemukiman mereka. Antisipasi pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mengatasi permasalahan kesehatan penduduk tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menindak lanjuti program pengiriman dan penyebaran dokter-dokter spesialis dengan berbagai bidang lainnya ke puskesmas pada daerah-daerah terpencil (pinggiran)
2. Meningkatkan sarana prasarana pendukung kesehatan secara merata dan tersebar di semua wilayah Kabupaten Pasaman
3. Meningkatkan mutu kesehatan dengan mengembangkan puskesmas-puskesmas utama yang telah ada sebagai pusat rujukan kesehatan sehingga mampu tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tetapi sekaligus mampu penanganan jenis penyakit yang ada di masyarakat tersebut tanpa perlu merujuk penderita (pasien) ke rumah sakit yang ada di ibu kota Kabupaten.
4. Menempatkan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi pendidikan yang dimilikinya (tenaga fungsional medis diharapkan tidak lagi menangani manajemen kesehatan di Puskesmas serta tenaga manajemen



kesehatan ditempatkan pada Puskesmas untuk mengelola manajemen kesehatan)

5. Diupayakan agar tenaga Bidan di Jorong / Desa yang statusnya PTT supaya dialokasikan sebagai Tenaga PNS agar pelayanan kesehatan ditingkat desa dapat dioptimalkan untuk mewujudkan pasaman sehat tahun 2010.

4.4.4. Pendidikan

Memperhatikan potensi dan permasalahan pendidikan di Kabupaten Pasaman, maka dirasa perlu diberikan rekomendasi kebijakan untuk dijadikan bahwa pertimbangan antara lain :

1. Meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dengan merealisasikan pelaksanaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
2. Meningkatkan SDM anak-anak putus sekolah, anak yang kurang mampu dan anak rawan sosial melalui program pendidikan berbasis kompetensi.
3. Meningkatkan anggaran pendidikan
4. Menyediakan fasilitas dan beasiswa bagi anak sekolah atau mahasiswa yang berprestasi namun sulit perekonomiannya



5. Menanamkan semangat peduli lingkungan kepada anak usia sekolah secara dini melalui program ekstrakurikuler peduli lingkungan.
6. Berkoordinasi dan besinergi dengan LSM dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisæi pelestarian lingkungan hidup.

Memperhatikan potensi dan masalah pendidikan tahun 2006 maka dirasa perlu dikemukakan beberapa rekomendasi kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu pendidikan
- b. Menanamkan program peduli lingkungan pada usia dini dengan program ekstrakurikuler peduli lingkungan
- c. Koordinasi yang efektif dengan instansi lain di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat serta instansi vertikal dalam kegiatan pelestarian lingkungan.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dengan ikut mendukung aplikasi hukum adat dan budaya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan
- e. Mendorong terbentuknya kelompok ataupun forum pemerhati lingkungan sebagai salah satu alat koreksi kebijakan pemerintah dalam pengendalian lingkungan.

4.4.5. Sosial dan Tenaga kerjaan

Kecendrungan semakin meningkatnya jumlah anak-anak dan mulai menggejalanya fenomena anak jalanan dan pencari kerja, disatu sisi ikut berdampak pada terjadinya masalah gangguan keamanan dan pelanggaran



ketertiban umum. Hal ini harus menjadi perhatian bagi setiap pengambil keputusan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut diatas perlu dilakukan beberapa langkah agar masalah ini tidak semakin berkembang. Antisipasi untuk mengatasi permasalahan penduduk tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja baik untuk lokal maupun untuk luar negeri, sesuai dengan kebutuhan
2. Menyediakan lapangan kerja atau lapangan berusaha bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dan keterampilan.
3. Meningkatkan program-program pemberantasan segala bentuk maksiat yang terjadi di masyarakat.
4. Meningkatkan upaya dan menjaga keamanan dan ketertiban umum, agar tercipta kondisi yang aman dan tertib.
5. Menyediakan kemudahan-kemudahan dalam bentuk bantuan dalam kemudahan pekerjaan dan kesempatan berusaha kepada masyarakat yang berekonomi lemah.

Dampak sosial yang terjadi akibat pembangunan sebenarnya adalah benturan – benturan atau pelanggaran – pelanggaran dalam sistem kemasyarakatan. Se jauh mana benturan sistem kemasyarakatan yang terjadi akibat adanya aktifitas pembangunan sebesar itulah dampak sosial yang timbul. Sedangkan dampak ekonomi adalah nilai moneter dari kegiatan pembangunan tersebut termasuk nilai dari pelanggaran sistem sosial.

Dampak sosial perlu diperhitungkan disamping dampak fisik, biologi, kimia, dan sosio ekonomi karena setiap aktivitas pembangunan tersebut akan bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

Masalah budaya hukum masyarakat:



1. kurangnya pengetahuan hukum masyarakat
2. masyarakat apatis dengan penegakan hukum
3. orientasi ekonomis yang sangat kuat

Penegakan hukum lingkungan di Sumatera Barat

- sangat lemah
- karena dua tahun terakhir tidak ada kasus besar pencemaran/ perusakan lingkungan yang diproses hingga pengadilan sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku lain

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 maka Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Dati II merupakan jabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I yang berisikan:

- a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya
- b. pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu
- c. sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman perdesaan dan perkotaan
- d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan
- e. penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/ kotamadya Dati II menjadi pedoman untuk:



- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/ kotamadya Dati II
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten / kotamadya Dati II serta keserasian antar sektor
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di kabupaten/ kotamadya Dati II
- d. penyusunan rinci tata ruang di Kabupaten / Kotamadya Dati II
- e. pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan

4.4.6. Masalah Sosial dan Ketenagakerjaan

1. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja baik untuk lokal maupun untuk luar negeri, sesuai dengan kebutuhan
2. Menyediakan lapangan kerja atau lapangan berusaha bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dan keterampilan.



DAFTAR PUSTAKA

Adegustara, F, 2003, Penegakan Hukum dalam Pelestarian dan Pemanfaatan Air. Fakultas Hukum Unand Padang.

Arbain, D. R. Tamin, A, Bachtiar, 2003, Konservasi Studi Etno Botani, Fitokimia dan bioaktivitas Flora Sumatera, Pusat Penelitian Unand Padang.

Azmardi. 1997. Inventarisasi Jenis-jenis Burung di Hpendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Skripsi Sarjana Biologi. FMIPA Unand. Padang.

Bapedalda Propinsi Sumatera barat, Buku Data Informasi Lingkungan Hidup Tahun 2006, Padang 2006

Bapeda kabupaten Pasaman – BPS Kabupaten Pasaman, Pasaman Dalam Angka Tahun 2005

BPS Kabupaten Pasaman, Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan usaha, 2005 – 2007, Pasaman – 2007

BPS Kabupaten Pasaman, Profil dan Peluang Investasi Kabupaten Pasaman, Pasaman 2005

BPS Kecamatan Dalam Angka Tahun 2005, Pasaman – 2006

Bujang Rusman, Prof. Dr. Ir. MS, Dampak pada Pembangunan Lahan dan Tata Ruang., Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas, Padang – 2001

dr. Zulkarnain Agus, MPH, Dampak pada Kesehatan Masyarakat', Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas, Padang – 2001



Drs. Rusjdi Tamrin, Dampak Pembangunan pada Flora dan Fauna Darat', Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas, Padang – 2001.

Drs. Abu Bakar, Dampak Pada Kualitas Udara, Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas, Padang – 2001

Pemerintah Kabupaten Pasaman, Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2001, Bappeda Kabupaten Pasaman – 2001

Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan pertamanan Kabupaten Pasaman; Rencana Strategis Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman 2006 - 2010, Pasaman – 2006.

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman tahun 2007 Data Base kehutanan Kabupaten Pasaman 2007

Dinas kesehatan Kabupaten Pasaman, 2007 Buku Statistik Kesehatan Kabupaten Pasaman (kecamatan) 2006

Otto Soemarwoto, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, Penerbit Gramedia, Jakarta

Pemerintah Kabupaten Pasaman, Nota Kesepakatan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun 2005, Bappeda Kabupaten Pasaman – 2004

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2004, Bappedalda Propinsi Sumatera Barat, 2005.

Pemerintah Kabupaten Pasaman, Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2006 – 2010, Bappeda Kabupaten Pasaman, 2005.

Pemerintah Kabupaten Pasaman 2006 RPJM Kabupaten Pasaman 2006 – 2010



Pemerintah Kota Padang, Stat us Lingkungan Hidup Daerah Kota Padang Tahun 2004 ,
Bapedalda Kota Padang – 2005.

Pemerintah Kota Padang, Stat us Lingkungan Hidup Daerah Kota Padang Tahun 2005 ,
Kota Padang – 2005.

Pusat Kajian Pilihan Penyelesaian Sengketa, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Perizinan Yang Berwawasan Lingkungan. – 2003

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman, 'Program Jangka Menengah
Lingkungan Hidup Kabupaten Dati II Pasaman' , 1998.

Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera SLHI tahun 2005.

Pembangunan kehutan : , Ismail Ahmad dan Yaakob M ohd Jani, 1994

Konservasi dan Kelestarian Hutan, Surtahman Kastin Hasan, 1997



DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMAMAN
KABUPATEN PASAMAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 39 Lubuk Sikaping
Telp : (0753) 20018
Fax : (0753) 20018
E-Mail : -
Web : -



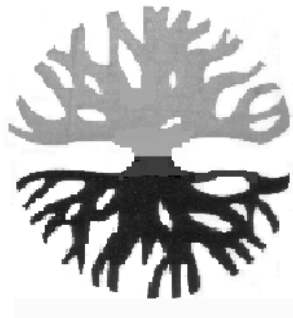
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN PASAMAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 39 Lubuk Sikaping
Telp : (0753) 20018
Fax : (0753) 20018
E-Mail : -
Web : -



LAPORAN

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2006





BUKU I



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT